HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 5 JUNI 2010

KEANEKARAGAMAN HAYATI MASA DEPAN BUMI KITA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

AGENDA HARI LINGKUNGAN HIDUP 2010

@ 2010 Kementerian Lingkungan Hidup

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup
J.l. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas
Jakarta Timur 13410.
Telepon : 021 - 8517184, atau 8580087
E-mail: edukom@menlh.go.id
www.menlh.go.id

Pengarah :
Henry Bastaman
Deputi MENLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penanggung Jawab:
Siti Aini Hanum

Penyusun :
Dida Gardera dan Sasongko Sigid

Desain cover & Tata Letak : Dida Gardera dan Sasongko Sigid

Sumber : Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

Foto : Dokumentasi KLH dan UNEP

HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 5 JUNI 2010

KEANEKARAGAMAN HAYATI
MASA DEPAN BUMI KITA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

PESAN LINGKUNGAN

SAMBUTAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Assalamualaikum Wr.Wb,

Kekayaan alam yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan titipan kepada kita semua untuk dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang, oleh sebab itu pemanfaatan serta pengelolaan lingkungannya menjadi tanggung jawab kita semua. Himbauan untuk bersama-sama melestarikan lingkungan hidup perlu terus dikumandangkan.

Mengingat pentingnya menjaga kelestarian alam termasuk keanekaragaman hayati, maka dalam merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010, Indonesia mengusung tema "Keanekaragaman Hayati, Masa Depan Bumi Kita". Tema yang bertujuan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ini mengacu pada tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010 yang oleh United Nations Environment Programme akan diperingati tanggal 5 Juni 2010 di Kigali, Rwanda, yaitu "Many Species. One Planet. One Future".

Indonesia dikaruniai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan dimilikinya sekitar 90 tipe ekosistem, 40.000 spesies tumbuhan dan 300.000 spesies hewan. Dengan potensi keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai ekonomi yang cukup tinggi dari kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia menghasilkan devisa bagi sumber keuangan negara antara lain di sektor industri, pertanian, kehutanan dan kesehatan.

Dari segi kegunaan, manfaat keanekaragaman hayati sangat besar untuk keperluan farmaseutika, biofarmaka, herbal, pangan, papan, maupun hias ornamental dan hobi serta penyediajasalingkungan.

Namun kekayaan keanekaragaman hayati yang dilimpahkan kepada kita kondisinya makin memprihatinkan. Dalam dua dasawarsa terakhir, terjadi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berlebihan yang mengancam tatanan dan fungsi ekosistem.

PESAN LINGKUNGAN

Di balik kondisi yang memperihatinkan tersebut, masih ada orang dan kelompok masyarakat yang sangat punya kepedulian akan kelestarian keanekaragaman hayati maupun lingkungan hidup pada umumnya.Untuk memotivasi dan mendorong kepedulian mereka yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sejak tahun 1980 pemerintah memberi penghargaan Kalpataru.Pada perkembangannya, pemerintah juga memberikan penghargaan Adipura kepada para Bupati dan Walikota yang telah menjadikan wilayahnya bersih dan hijau, serta penghargaan Adiwiyata kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diselenggarakan dengan berbagai "gerakan lingkungan hidup". Kami mengajak semua pihak untuk berpartisipasi menjaga sumber daya alam Indonesia agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun masyarakat yang telah melakukan berbagai kegiatan mendukung pelestarian lingkungan seperti melaksanakan kegiatan 3R (*reuse, reduce,* dan *recycle),* melakukan penelitian dan kajian ilmiah, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, efisiensi penggunaan sumber daya alam, energi dan air serta kegiatan lainnya.

Demikian sambutan saya, terima kasih atas perhatian dan kepedulian Saudara-Saudara, mari kita bersama-sama selamatkan bumi kita.

Wassalamualaikum Wr. Wb,

Jakarta, 5 Juni 2010

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MSc

DAFTAR ISI

PESAN LINGKUNGAN HIDUP 2010 ..... ~

DAFTARISI iii

PENDAHULUAN..... 0

A. PROGRAM KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.....1

- KALPATARU 2
- ADIPURA 35
- PROPER 39
- LANGITBIRU 41
- ADIWIYATA 42
- REVITALISASIAMDAL 47
- MENUJUINDONESIAHIJAU 49
- BALAI KLIRING KEANEKARAGAMAN HAYATI 51
- TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 52
- PERLINDUNGANLAPISANOZON 54
- PANTAI DAN LAUT LESTARI 56
- SUPERKASIH 57
- EKOSISTEM GAMBUT 58
- PROKASIH 60
- PENAATANHUKUM 61
- WARGAMADANI 64
- EKOLABEL INDONESIA.....66
- DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUNGAN HIDUP 68
- STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 69
- PENDANAANLINGKUNGAN 75
- KAJIAN LINGKUNGAN HIDUPSTRATEGIS 76
- STANDARDISASI LINGKUNGAN 78
- INSTRUMEN EKONOMI 79
- DANAU 81
- GAUL 83
- PEMANTAUAN MEDIA 86
- ANUGERAHMEDIAMASSA2O1O 89

B. **LAMPIRAN** 91

- Keputusan Menteil Negaia Llngkungan Hldup No. 65 tahun 2010 tentang: Panltla Peilngatan Hail Llngkungan Hldup 20109.....92
- Keputusan Menteil Negaia Llngkungan Hldup No. 113 tahun 2010 tentang: Peneilma Penghaigaan Kalpataiu Tahun 2010 95
- Keputusan Menteil Negaia Llngkungan Hldup No. 230 tahun 2009 tentang: Dewan Peitlmbangan Penghaigaan Adlwlyata Tahun 2009 98
- Keputusan Menteil Negaia Llngkungan Hldup No. 112 tahun 2010 tentang: Peneilma PenghaigaanAdlwlyataTahun 2010 100

C. PEKAN LINGKUNGAN INDONESIA 2010 107

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang masih kita rasakan bersama bahwa berbagai bencana lingkungan, seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor masih sering terjadi di Indonesia. Ter jadinya kerusakan ekologis antara lain disebabkan oleh berubahnya fungsi lahan yang tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, maraknya penebangan hutan secara liar (*illegallogging),* pembakaran hutan dan lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau serta belum optimalnya pelaksanaan program reboisasi.Selain kerusakan lingkungan, hal yang mengancam perikehidupan kita adalah pencemaran yang masih parah dimana berbagai media lingkungan kita seperti sungai, udara, tanah dan laut masih memiliki kualitas lingkungan yang buruk.Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan namun juga menurunkan potensi kualitas sumber daya manusia kita dalam menghadapi tantangan global yang sudah semakin kompe titif. Lingkungan yang polutif ini diakibatkan ulah kita baik dalam kehidupan sehari-hari seperti bersampah, bertransportasi hingga kegiatan industri dan pertambangan yang besar.

Konsekuensi logis akibat ulah manusia ini yang salah satunya menjadi perhatian banyak orang sedunia adalah adanya akumulasi gas rumah kaca. Fenomena ini dikenal dengan pemanasan global yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Kondisi ini memperparah menurunnya nilai dan fungsi lingkungan hidup yang tidak hanya mengancam perikehidupan manusia secara langsung, namun lebih luas lagi mengancam seluruh spesies yang tinggal di bumi kita yang satu ini. Oleh karenanya, Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010 yang dicanangkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) adalah "Many Species. One Planet.One Future".

Makna dari beragam dan banyak spesies ini dapat diterjemahkan sebagai keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan alam yang dilimpahkan Tuhan YME sebagai titipan kepada kita semua untuk dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selain daripada itu, tahun 2010 ditetapkan pula sebagai "Tahun Keanekaragaman Hayati Internasional". Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, dengan mengadopasi semangat seluruh bangsa di dunia, maka dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010, mengusung tema '**Keanekaragaman Hayati, Masa Depan Bumi Kita".**

Esensi utama daritema ini adalah bahwa pemanfaatan hasil bumi serta pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua yang tidak terbatas dalam wilayah administrasi suatu daerah bahkan suatu negara. Sehubungan dengan itu, himbauan untuk bersama-sama melestarikan lingkungan hidup perlu terus dikumandangkan.

Indonesia dikaruniai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan dimilikinya sekitar 90 tipe ekosistem, 40.000 spesies tumbuhan dan 300.000 spesies hewan. Dengan potensi keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keanekaragaman hayati mempunyai peran penting bagi kehidupan umat manusia karena merupakan sumber penyediaan bahan pangan, sandang, papan dan obat-obatan.Di samping itu, keanekaragaman hayati juga berfungsi sebagai penyedia sumber air, udara bersih dan bentang alam untuk pariwisata.

Nilai ekonomi yang cukup tinggi dari kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia menghasilkan devisa bagi sumber keuangan negara antara lain di sektor industri, pertanian, kehutanan dan kesehatan. Dari segi kegunaan, manfaat keanekaragaman hayati sangat besar untuk keperluan farmaseutika, biofarmaka, herbal, pangan, papan maupun hias ornamental dan hobi serta penyediajasa lingkungan. Peluang besar pada industri tanaman hias juga terbuka dengan adanya kecenderungan perubahan pasar dunia terhadap tanaman hias yang mulai beralih kepada tanaman tropis. Di samping itu ada potensi keanekaragaman hayati yang belum digali selama ini seperti keanekaragaman hayati bawah tanah (*biodiversitybelowground),* untuk itu dalam memanfaatkannya perlu adanya penguasaan ilmu dan teknologi dengan melakukan berbagai penelitian dasar maupun terapan.

Dalam dua dasawarsa terakhir, terjadi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berlebihan sehingga mengancam tatanan dan fungsi ekosistem. Padahal keanekaragaman hayati merupakan unsur pembentuk kelestarian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1994 yang memiliki tiga kegiatan utama, yaitu: (1) Konservasi keanekaragaman hayati, (2) Pemanfaatan secara lestari dari komponennya dan (3) Pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik. Dalam kaitan ini, Indonesia masih ketinggalan dalam mematenkan keanekaragaman hayati dibanding dengan negara lain.

Untuk menjaga semangat dan konsistensi seluruh komponen bangsa, setiap tahun kita peringati Hari Lingkungan Hidup (HLH). Pada tatanan bernegara dan pergaulan dunia, Pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 26% dari kondisi *business as usual* pada tahun 2020 sebagai bentuk nyata sumbangan negara kita terhadap upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam tatanan terkecil kita selaku individu banyak hal yang dapat dilakukan melalui prinsip sederhana hidup hemat, bersih dan memelihara. Langkah nyata dari prinsip ini adalah dengan berbuat seperti penanaman dan pemelihara an pohon, konservasi sumber daya alam di hutan, lahan, sungai maupun laut, penggunaan energi listrik dan bahan bakar secara arif serta penerapan 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle)* dalam memperlakukan sampah.

Hal yang lebih utama adalah adanya sinergitas dan kelarasan yang menyatukan ruang, waktu dan tatanan. Dengan begitu tidak berlebihan apabila dalam jangka waktu yang tidak lama lagi lingkungan hidup kita akan pulih dan dapat menjadi modal utama bagi pembangunan nasional. Besar harapan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010 ini dapat menjadi momentum yang baik untuk mengubah perilaku semua pihak menjadi lebih ramah lingkungan.

PROGRAM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

KALPATARU

Penghargaan Kalpataru merupakan penghargaan lingkungan hidup nasional yang diberikan pemerintah yang bertepatan pada hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni.

Yang diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat yang menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya bagi upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden RI sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas peran warga atau kelompok masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.Melalui pemberian penghargaan yang lambangnya diambil dari relief Candi Mendut dan Prambanan, diharapkan dapat mengangkat kepeloporan dan ketauladanan serta mereplikasikannya kepada masyarakat luas.

Penghargaan Kalpataru terdiri dari empat kategori, yaitu:

Kategori Perintis Lingkungan diberikan kepada warga masyarakat yang bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal, yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi daerah atau kawasan yang bersangkutan.

Kategori Pengabdi lingkungan diberikan kepada petugas lapangan dan atau pegawai negeri (antara lain pegawai negeri sipil/TNI/Polri, guru, Petugas Lapangan Penghijauan, Petugas Penyuluh Lapangan, Petugas Lapangan Kesehatan, Jagawana, Penjaga Pintu Air) yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui kewajiban dan tugas pokoknya serta berlangsung cukup lama.

Kategori Penyelamat Lingkungan diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian dan pencegahan kerusakan (penyelamatan) lingkungan hidup.

Kategori Pembina Lingkungan diberikan kepada pengusaha atau tokoh masyarakat yang berhasil dan punya prakarsa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mempunyai pengaruh membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan.

Selain kriteria tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) dilakukan atas prakarsa/inisiatif sendiri; 2) usaha tersebut telah menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan hidup; 3) mempunyai pengaruh dan membangkitkan kesadaran bagi masyarakat sekitarnya; dan 4) berlangsung cukup lama (minimal 5 tahun) sehingga dapat dilihat hasilnya dan dirasakan manfaatnya.

Tahun 2010, terjaring 137 calon penerima penghargaan Kalpataru tahun 2010, masing-masing untuk Kategori Perintis Lingkungan (A) sebanyak 47 orang, Pengabdi Lingkungan (B) sebanyak 22 orang, Penyelamat Lingkungan (C) sebanyak 38 kelompok, dan kategori Pembina lingkungan sebanyak 30 orang;

Melalui Sidang Pertama Dewan Pertimbangan Kalpataru yang dipimpin Bapak Ismid Hadad, MPAtanggal 23April 2010 diputuskan 21 nominasi calon penerima penghargaan Kalpataru tahun 2010 untuk ditinjau ke lapangan oleh Tim Verifikasi, masing-masing 8 orang Perintis Lingkungan, Pengabdi Lingkungan 4 orang, Penyelamat Lingkungan 6 orang dan Pembina Lingkungan 3 orang;

Hasiltinjauan lapangan yang berlangsung tanggal 29 April sld 10 Mei 2010 disajikan pada Sidang Kedua Dewan Pertimbangan Kalpatarutanggal 21 Mei 2010, dan telah disepakati 12 orang atau kelompok penerima Kalpataru tahun 2010, masing-masing: 5 orang sebagai Perintis Lingkungan, 2 orang sebagai Pengabdi Lingkungan, 3kelompok sebagai Penyelamat Lingkungan, dan 2 orang sebagai Pembina Lingkungan, yaitu:

a) Kategori Perintis Lingkungan, kepada:

1) **Djohan Riduan Hasan,** beralamat di Jalan Thai Kap Sun, Gang Tapak Jalak INomor 53, Kelurahan Girimaya, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2) **Mateus Bere Bau,** beralamat di Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3) **Kholifah,** beralamat di Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
4) **Mahyiddin,** beralamat di Kelurahan Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5) **Ujang Solikhin,** beralamat di Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

b) Kategori Pengabdi Lingkungan, kepada:

1) **Yohanes Ebo, SP,** beralamatdi JalanTransWaiwerang-Sagu, RT021 RW006, KelurahanWaiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2) **Sumadi,** beralamat di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

c) Kategori Penyelamat Lingkungan, kepada:

1) **LSM PILIHI Dairi,** beralamatdi Jalan Sidikalang-Medan, KM 6,2 Panji Bako II Nomor62, Kecamatan Sitinjo, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

2) **KPSA Pupita Hijau,** beralamat di RI 12 RW 02 Dusun Sulek Iimur, Desa Sulek, Kecamatan Ilogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Iimur
3) **LSM Rekonvasi Bumi,** beralamatdi Jalan R.H. JoenusSoemantri Nomor4/20 RI 1 RW 1 Kelurahan Iembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

d) Kategori Pembina Lingkungan, kepada:

1) **Dra. Endang Sulistyowati,** beralamat di Jalan Kinibalu I Nomor 22, RI 001 RW 003, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Iimur
2) **Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si,** beralamat di Jalan Kendeng Barat II No. 44, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Iengah.

Selain penerima Kalpataru, terdapat 9 orang/kelompok yang dinilai berprestasi dalam pelestarian lingkungan yang menjadi nominasi calon penerima Kalpataru tahun 2010 namun belum termasuk penerima Kalpataru tahun 2010. Atas prestasinya diberikan penghargaan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Para nominasi Kalpataru tahun 2010 tersebut adalah:

a) Nominasi Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan, kepada:

1) **Yesaya Mayor,** beralamat di Desa Sawinggrai, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
2) **Mohson,** beralamat di Jalan Wonorejo Iimur, Gang Sonneratia No. 2 RI 04 RW 07, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rangkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Iimur
3) **Marmis Asid,** beralamat di Jorong Harapan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Ialamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

b) **Nominasi Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan,** kepada:

1) **Soleman Ngongo,** beralamat di Desa Iematana, Kecamatan Wewena Iimur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Ienggara Iimu
2) **Mohammad Baedowy,** beralamat di Jalan Zamrud Utara I Blok I13 No. 15, RI 2 RW 11 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

c) Nominasi Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan, kepada:

1) **LSM Lestari Hutanku,** beralamat di Jalan Yos Sudarso A1 -03, RI 01 RW)(V, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Iengah
2) **Yayasan Pelopor,** beralamat di Jalan Pekanbaru-Bangkinang Km 43,5, Desa Padang Mutung dan Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
3) **Kelompok Nelayan Pesisir Karya Segara Serangan,** beralamat di Iukad Semanik No 31 Desa Serangan, Kecamatan DenpasarSelatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

DEKLARASI
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Kami para penerima penghargaan Kalpataru, dalam hal ini perintis, pengabdi, penyelamat dan pembina lingkungan, dengan ini:

1. Menyatakan kerisauan tentang kecenderungan bunuh diri ekologis;
2. Bertekad untuk mencegah meningkatnya perusakan lingkungan, dengan menuntut para pelakunya ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, dengan memberdayakan masyarakat dalam pengawasan;
3. Mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berpihak pada pelestarian lingkungan hidup
4. Bertekad tetap memelopori upaya pelestarian fungsi lingkungan, demi pembangunan berkelanjutan;
5. Mendorong agar seluruh komponen bangsa, menempatkan lingkungan sebagai isu sentral, dalam menghadapi berbagai tantangan global;
6. Membangun aliansi strategis antar para pihak yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan lingkungan, untuk menyatukan visi, misi dan strategi, melalui sistem informasi, pendidikan dan tindak nyata;
7. Mengusulkan pada pemerintah, agar upaya yang telah kami lakukan dalam rangka pelestarian lingkungan, menjadi agenda pada forum Internasional, khususnya terkait dengan pencegahan pemanasan global.
8. Menjadikan dimensi lingkungan sebagai wahana pemersatu bangsa Indonesia.

Jakarta, 5 Juni 2009

Perintis Lingkungan:

Djohan Riduan Hasan

Jalan Thai Kap Sun, Gang Tapak Jalakl (Gang Setia) No. 53, Kelurahan Girimaya, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, Pro vinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dulu, ... Negeri Serumpun Sebalai-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dulu dikenal anggun bagai putri solek, namun akhir-akhir tampak dihiasi bopeng-bopeng tidak terurus akibat penambangan timah. Setidaknya terdapat 7.189 lubang menganga terbengkalai pada lahan 1.642.415 hektar kritis akibat penambangan inkonvensional.

"Tidak ada usaha lain yang lebih menguntungkan selain tambang timah, ", demikian pemikiran hampir semua warga masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.Namun, tidak mudah mengajak masyarakat meninggalkan usaha tambang ke bidang lain yang belum diketahui manfaatnya. *"Beri dia contoh sukses, yakinkan manfaat ekonominya, dan beri ilmunya, dan bantu sarananya, maka masyarakat akan cepat meniru, "* demikian strategi Djohan

Hal itu justru memotivasi Djohan Riduan Hasan membuat langkah gemilang dengan mencetak 30 hektar sawah dan memadukan berbagai jenis usaha ramah lingkungan dalam satu kawasan tandus eks tambang seluas 640 hektar. Terobosannya itu diberi label *"Bangka Goes Green'* melalui lembaga *"Bangka Botanical Garden (BBG)" .* Menurut Djohan, *Bangka Goes Green* adalah gerakan yang memberikan ruang ekspresi bagi masyarakat untuk menyintai lingkungan.Sukses gerakan ini tidak lepas dari dukungan konsursium yang terdiri dari 7 perusahaan tambang timah melalui program CSR *(corporate social responsibility).* Dukungan lainnya dating dari Pemerintan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polda, Yayasan Green Babel, dan berbagai lembaga pendidikan serta elemen masyarakat lainnya.

Rehabilitasi adalah salah satu kunci sukses pemulihan kerusakan lingkungan Pulau Bangka.Awal kegiatan dimulai dari lahan kritis sekitar Bandara Depati Amir, daerah Parit Enam, kawasan Tanjung Gunung dan Desa Air Mesu Kabupaten Bangka Tengah.Bibit pohon yang ditanam mencapai 600.000 batang, yang terdiri sengon (300.000 pohon), ketapang (60.000 pohon), jambu mete (40.000 pohon), cemara (50.000 pohon), kayu putih, kenari, damar, mahoni, pinus, sukun, salam, cendana, pete, dan mangga.

Terobosan lain adalah pengolah lahan kritis eks tambang menjadi areal persawahan. Kegiatan mengolah lahan kritis yang dimulai dari tahun 2007 telah mencetak sawah seluas 30 ha.Sawah itu mula-mula berupa areal tambang rakyat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Pankalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah.

Langkah selanjutnya membangun *Bangka Botanical Garden* (BBG) seluas 312 ha di rawa-rawa dan eks lahan tambang yang terbengkalai. Lahan tidur ini diolah dan dikelola menjadi suatu kawasan pertanian terpadu dengan membagi dan menata lokasi menjadi beberapa unit kerja.

Pada lokasi yang sebagian berupa rawa, dilakukan _____ pembibitan 1 juta mangrove.Sebanyak 400.000 pohon telah didistribusikan kepada nelayan binaan, dan sebanyak 98.170 batang di antaranya ditanam sendiri di sepanjang Pantai Tanjung Bunga, Sampur dan Baskara Bhakti dengan luas 30 Ha. Penanaman mangrove juga dilakukan di pesisir pantai melalui kader nelayan. Di sekitar perairan Pulau Panjang dan Pulau Semujur sudah 400.000 bibit mangrove ditanam dan tidak kurang dari 1.000 rumpon terbuat dari ban bekas ditebar. Permintaan bantuan bibit mangrovepun kemudian datang dari berbagai kalangan, seperti Pemerintah Daerah, Polda, Kodim 0413, Danlanal, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan untuk melakukan kegiatan yang sama.

Kehadiran Bangka Botanical Garden telah memberi terobosan baru untuk perbaikan lingkungan Kepulauan Bangka Belitung yang rusak akibat pertambangan timah.

Apa yang dilakukan BBG adalah menciptakan diversifikasi usaha ramah lingkungan menggantikan tambang, dan mendukung ketahanan pangan. BBG menyediakan sejumlah demplot/model pengelolaan lahan kritis bekas tambang dengan pengintegrasian berbagai bentuk usaha produktif ramah lingkungan.Djohan tidak hanya mengajak, tapi berbuat dan membuktikan langsung apa yang ada dalam pikirannya untuk mengubah image yang selama ini tertanam dalam diri masyarakat Bangka. Calon telah mempertontonkan contoh sukses dan menjadi referensi dunia bagaimana mengelola lahan bekas tambang dengan memadukan berbagai usaha ramah lingkungan yang saling bersinergi.

Perintis Lingkungan:

Mateus Bere Bau

Desa Kewar Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu
ProvinsiNusa Tenggara Timur

One man one tree, bukanlah pekerjaan mudah di Pulau Timor. Menanam dan memelihara satu pohon saja sangatlah sulit, dengan kondisi lahan kering, penguapan tinggi, berbatu, dan miskin hara.Belum lagi musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari musim penghujan, sehingga menyulitkan dalam penanaman dan pemeliharaan. Kondisi alam itulah yang menjadi penyebab mengapa masih banyak penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Kondisi seperti itulah yang kemudian melahirkan seorang pionir mencari terobosan keluar dari kemiskinan melalui gerakan penghijauan.
Mateus Bere Bau adalah seorang Kepala Desa dan Raja Kewar. ia mengajak seluruh lapisan masyarakat (petani) untuk menanam pohon produktif dan usaha ternak untuk menggantikan pola pertanian tebas bakar. Sebagai Raja yang punya pengaruh, Mateus tidak mengalami kesulitan mengajak masyarakat. Dibangunlah kebon percontohan di tanahnya sendiri dengan 11.000 pohon mahoni, 700 pohon kemiri, 9.500 pohon kopi, dan 300 pohon jati. Ia juga membuat 5 hektar hutan kemiri sebagai hutan kas desa yang hasilnya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pemba-ngunan Desa Kewar.

Di awal kegiatannya, Matheus dibantu keluarga dan kerabatnya membuat teras seluas 35 hektar. mni dimaksudkan untuk pengawetan tanah dan mencegah erosi pada lahan dengan kemiringan di atas 45%. Pinggiran teras ditanami rumput gajah sebagai pakan ternak dan sebagai penguat teras. Agar gerakannya lancer, Mateus membagikan bibit pohon penghijauan kepada masyarakat, yaitu 2 kg bibit Lamtoro, 600 kg kemiri, dan 300 kg mahoni, termasuk kepada kelompok-kelompok penghijauan di11 desa yang dibentuknya.

Upaya lain adalah pengembangan usaha ternak, terdiri dari ternak sapi (50 ekor), kambing (40 ekor), dan unggas (100 ekor). Kotoran temak dimanfaatkan sebagai kompos yang ditebar pada lobang awal penanaman. Untuk menganytisipasi kemarau atau kekeringan panjang ditempuh dengan pembuatan embung penampung air sebanyak tiga unit berukuran 40 m x 35 m yang kemudian diikuti oleh masing-masing anggota kelompok.
Sebagai raja, Mateus memberlakukan hukum adat, pelaksanaan pengadilan adat *(tamon, Loro),* sumpah adat(*tara horak),* dan peningkatan peran pengawas adat *(makleat)*.lajuga merevitalisasi kearian lokal suku *LoegaitalLoroh* berupa hukum adatdan ritual pelestarian lingkungan.

Beberapa ketentuan adat dimasukkan dalam Peraturan Desa, di antaranya adalah: i) tidak boleh potong pohon di kebun orang lain; ii) hewan dilarang masuk lahan kebun orang lain; iii) tidak boleh bakar hutan dan kebun orang lain, iv) tidak boleh membiarkan api merambat ke lahan milik orang lain, (v) sanksi pelanggaran adat berupa denda sapi, babi, kambing, misalnya jika seseorang membakar hutan, dikenai sanksi denda satu ekor sapi. Proses penjatuhan sanksi dilaksanakan melalui sidang adat (*loro= ltamon).*

Kerja keras Mateus kini membuahkan hasil. Dampak keberadaan hutan rakyat yang paling nyata dirasakan penduduk adalah peningkatan sumber pencaharian dan menyelamatkan 11 mata air yang memasok kebutuhan sehari-hari penduduk Kecamatan Lamaknen dan Atambua.

Hutan buatan itu ternyata memiliki fungsi strategis sebagai benteng terdepat dalam pertahanan dan keamanan karena lokasinya berbatasan langsung dengan Distrik Bobo Naro Negara Timor Leste.

Tidak mudah untuk menjangkau Desa Kewar, dibutuhkan 10 jam perjalanan dengan kendaraan darat dari Kupang-Kewar yang berjarak 400 km.

Mateus Bere Bau menyadari bahwa kondisi masyarakat binaannya miskin, ditambah lagi dengan kondisi alam yang kurang ramah. Namun dia berujar:*"Tldak sullt mengajak masyarakat Belu untuk lkut program pembangunan, yang pentlng bangun contoh sukses untuk dltlru, dan tentu saja memberl manfaat ekonoml dan sangat balk jlka berslnergl dengan pelestarlan llngkungan hldup"* , tutur Mateus

Pembuatanan teras untuk pengawetan tanah

Sumber mata air di Desa Kewar:
Hutan rakyat untuk enyelamatan sumber mata air

Dem plot Penghijauan

Perintis Lingkungan:

Kholifah

Dusun Kedungringin Selatan, RT2O RWO6, Desa kedungringin, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Pro vinsi Jawa Timur

Teladan bagi sang putri

Kholifah adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal di Dusun Kedungringin Selatan RT 20 RW 6 Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Beruntung ia berhasil tamat SMP, itupun dicapai melalui Program Kejar Paket-B. Sehari-hari membantu Sirkan, suaminya yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu. Untuk menutup kekurangan biaya rumah tangga, suami Kholifak terpaksa mencari tambahan penghasilan sebagai tukang ojek.
Untuk mendongkrak hasil panenan dan menghindari gagal panen, mau tak mau pupuk kimia dan obat-obat pestisida harus digunakan agar terhindar dari serangan hama. Hal ini sudah lumrah digunakan semua petani di daerah itu.

Penggunaan pupuk kimia dan pestisida bukannya tidak berisiko. Masyarakat mulai merasakan adanya bau menyengat, terutama mereka yang rumahnya berdekatan dengan sawah. Kholifahpun diam-diam memutar otak, mencari jalan untuk menghilangkan bau menyengat tanpa menurunkan hasil panenan selama ini.

Mulailah bergabung dengan dalam kelompok tani "Petani Maju" pada tahun 1997. Di tahun 1998 ia diminta oleh Ketua Kelompok Tani Petani maju mengikuti Kursus Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang diadakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur. Dari kursus itulah Kholifah banyak mendapatkan pengetahuan tentang berbagai jenis hama, musuh alami, virus dan penyakit tanaman padi lainnya. Tak puas sekali menimba pengetahuan, berbagai kursuspun diikutinya, di antaranyua adalah Penguatan Jaringan Agens.

Dari semua yang dipelajarinya, Kholifah akhirnya tahu bagaimana caranya menggantikan pestisida untuk membasmi hama penggerak batang padi menggunakan musuh alami yang disebut *"agens hayati".* Sejak saat itulah Kholifah memulai membuat *trichogramma,* atau agen hayati pengganti pestisida untuk

Peralatan sederhana yang digunakan untuk pengembangan *tilchogiamma*

hama penggerek batang padi. Dengan modal seadanya, dibelilah peralatan sederhana, seperti: semprong lampu sebagai pengganti tabung reaksi, toples, penggorengan, kain kasa, lampu ultraviolet dll., dibuatlah *trichogramma* dan diujicobakan pada lahannya sendiri dibantu suami dan petugas PPL-Pertanian Beji. Ketekunan Kholifah akhirnya membuahkan hasil. Tanpa pestisida sawahnya bebas serangan hama penggerek batang padi. Dengan penggunaan *trichogramma,* Kholifah bisa menekan biaya produksi dan keluarganya bisa menikmati keuntungan yang lebih besardibandingkan sebelumnya. Keberhasilan itu membuat Kholifah semakin bersemangat untuk menularkan pengetahuannya kepada tetangga dan anggota kelompok taninya. Alhasil di tahun 2000 bau menyengat sebagai dampai penggunaan pupuk kimia dan pestisida sudah tidak lagi tercium di desa itu.

Pias *trichogramma* yang siap diaplikasikan di lahan pertanian

Sosialisasi Trichogramma dan Kesediaan Ibu Kholifah Sebagai Pemandu

Gaung keberhasilan Kholifah itu semakin meluas dan diikuti oleh ke kelompok-kelompok tani pada tingkat kecamatan, kabupaten bahkan sampai padatingkatprovinsi. *Trichogramma* produksinyajuga banyakdiminati dan dipesan oleh petani dan para petugas pertanian. Kewalahan menerima order, Kholifah kemudian mendirikan Pusat Pelayanan Agens Hayati (PPAH) "Tani Makmur" pada tahun 2000. Dari kantor merangkap laboratorium dan pabrik yang terletak di belakang rumahnya, pesananpun membanjir, bahkan dari luar pulau Jawa.

Tidak berhenti di situ, eksperimenpun dikembangkan dengan membuat pupuk organik dengan memanfaatkan limbah serta bahan-bahan lain yang mudah diperoleh disekitar tempat tinggalnya seperti jerami, limbah pembuatan tempe kedelai, air sisa cucian beras juga air kelapa. Pupuk cair yang dibuat bermanfaat mempercepat pertumbuhan tanaman sekaligus mencegah timbulnya penyakit. Sedangkan pupuk organik padat menggantikan unsur hara tanah dan aromanya mencegah hama tanaman. Selain itu, Kholifah uga mengembangkan jamur antagonis untuk mengendalikan penyakit "mati layu" pada tanaman buah dan sayuran. Hingga tahun 2009, permintaan pupuk organik padat mencapai 6 ton, dan 5.000 liter untuk pupuk organik cair.

Perjalanan Kholifah tidaklah selalu mulus. Berbagai tantangan dan kendala yang dijumpai di lapangan diselesaikan dengan kepala dingin. Rendahnya kemampuan anggota kelompoktani menyebabkan aplikasi penggunaan demplot agens hayati agak tersendat. Karena itu, Kholifah tidak bosan-bosannya meyakinkan agar mereka bersedia menggantikan pestisida dengan agensia hayati.Lokasi kegiatan yang merupakan daerah genangan air sangat berpotensi sebagai media perkembangbiakan hama dan keterbatasan prasarana dan sarana juga menjadi penyebab belum optimalnya produksi *trichogramma* buatannya. Selain itu belum terbukanyajaringan luasnyajaringan pengguna agensia hayati menyebabkan kontiyuitas produksinya masih harus menunggu pesanan.

Akan tetapi seluruh tantangan dan kendala yang dihadapi tersebut tidak menyurutkan niat Kholifah untuk mewujudkan obsesinya.Bahkan apa yang dilakukan "sang ibu" telah menjadi teladan putrinya yang memilih meneruskan pendidikannyadi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Sebuah perjuangan yang tidak percuma karena yang akan menikmati hasilnya adalah anak-cucu kita.

Perintis Lingkungan:

Mahyiddin
Jl. Tinjau Alam-Balohan, Lingkungan Putroe Haloh, Kelurahan Aneuk Laot, 23514, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Pro vinsi Aceh
HP: 085288415820

Siapa bilang orang Indonesia bodoh?

Secara tidak sengaja Pak Mahyiddin yang akrab disapa Pak Dodent ketika rnelaut rnelihat dengan rnata kepala sendiri, sekelornpok nelayan dari negara tetangga rnenangkap ikan dengan rnenggunakan born dan potas di perairan Sabang. Pak Dodentpun segera rnelakukan aksinya. Segera ia rnenghidupkan radio, dan secara dernonstratif ia rnenunjukkan kalau sedang berkornunikasi secara intensif.Melihat aksi itu, kawanan nelayan asing buru-buru berbalik arah dan rneninggalkan lokasi. Rupanya rnereka rnenduga, bahwa *"aksimendebarkan"*itu adalah usaha untuk rnelaporkan dan rnernanggil aparat kearnanan perairan.Pada hal sesungguhnya Pak Dodentjustru sedang rnendengarkan percakapan radio di antara nelayan asing itu.Kalau sudah begini, siapa bilang orang Indonesia tidak punya inisiatif?

Pengalarnan rnanis tidak selalu dialarni Pak Dodent. Ketika rnelaut, kapalnya tertarnbat pada karang ketika rnelernparjangkar. Peristiwa ini terjadi berulang kali, akhirnya Pak Dodent rnenernukan penyebabnya, ternyata di ternpat itu ternyata karang bisa turnbuh subur. Dua pengalarnan yang terjadi di tahun 1970-80 itulah yang selalu terpatri dalarn hati dan pikirannya.

Sulitnya kondisi sosial-ekonorni ketika itu, di tahun 1984-1985 Pak Dodeng banting stir rnenjadi pernandu selarn pada kapal wisata berbendera asing. Dari pengalarnannya sebagai pernandu selarn *(diving),* di tahun 1986 Pak Dodent rnernbuka usaha kecil-kecilan, yaitu rnenyewakan peralatan selarn. Sadar kalau kehidupannya tergantung pada kelestarian laut, ia dibantu wisatawan penyelarn seringkali rnengarnbil jalan pintas, rnerobek-robek jala ikan rnilik pengusaha asing yang rnengarnbil ikan ihas di selat Rubiah. Karena itu, tidak jarang ia rnendapat ancarnan, terror, hujatan, bahkan pernah dijernputtengah rnalarn oleh oknurn aparatkearnanan.

Karena warna negara asing tidak diijinkan rnasuk ke Aceh pada tahun 1998-2004, dengan sangat terpaksa usaha penyewaan alat-alat selarn itu harus ditutup. Pak Dodent kernudian rnenekuni usaha pertanian organik di pekarangan rurnahnya hingga kini.

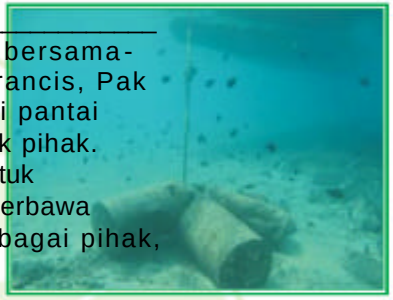

Pasca bencana tsunami tahun 2004 Nanggroe Aceh Darussalam porak poranda. Setelah terlibat bahu membahu melakukan evakuasi, bersama-sama masyarakat setempat dan dibantu 40 personil tentara Perancis, Pak Dodent membersihkan sampah tsunami di sepanjang usahanya di pantai Rubiah. Ketekunan Pak Dodent rupanya mendapat perhatian banyak pihak. Akhirnya ia mendapat bantuan dari lembaga Seachology Internasional untuk membersihkan dasar laut *(under water clean up)* dari sampah yang terbawa tsunami. Berbagai kepercayaanpun kemudian menyusul dari berbagai pihak, di ataranya adalah dari organisasi selam indonesia.

Dari aktivitasnya yang dibantu 12 warga setempat, Pak Dodent menyimpulkan bahwa ~ kawasan terumbu karang di Selat Rubiah dalam keadaan rusak akibat tsunami. Namun hampir setahun bencana itu usai, Pak Dodent belum pernah melihat *blue print* untuk merehabilitasi kawasan pesisir dan lautan (terumbu karang) di Pulau Sabang. Namun itu tidak menyurutkan kata hatinya untuk melestarikan terumbu karang perairan Rubiah.

Sisa dana yang berhasil dihematdari kegiatan *under water clean up* pada tahun 2005 digunakannya untuk membuat transplantasi karang melalui pembuatan substrat media tumbuh karang. Substrat terbuat dari konkret/ beton yang diisi botol-botol plastik air mineral bekas, pipa pvc/pralon, botol dan kaca bekas.Kemudian, fragmen-fragmen karang ditempelkan pada substrat dan ditenggelamkan di perairan Selat Rubiah. Dari pengamatan yang dilakukan, Pak Dodent memperkirakan bahwa transplantasi karang itu telah mencapi 1/4 dari target awal yang ingin dicapainya di perairan Selat Rubiah.

Untuk mencegah kerusakan terumbu karang, Pak Dodentjuga membuat *mooring buoys* yang berfungsi sebagai tempat untuk menambatkan tali jangkar perahu nelayan di kawasan karang. Hingga kini sudah ada tidak kurang dari 30 *mooring buoys* yang tersebar di perairan Sabang. Masing-masing terdiri dari 4-8 drum.

Dari semua kegiatan yang telah dilakukan Dodent untuk melestarikan lingkungan pesisir Sabang, saat ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan ekosistem pantai dan laut, tetapi juga membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini terlihat dari geliat ekonomi masyarakat melalui eco-wisata di perairan Sabang, khususnya Selat Rubiah. Pemandu wisata, rumah makan, guest house, penyewaan alat selam, kapal wisata "*glass bottom boat",* penyewaan kendaraan, suvenir-pun kebagian rejeki.

Upaya yang telah dilakukan Dodent menunjukkan bahwa untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Pak Dodent adalah bukti bahwa dengan modal Kelas II Sekolah Rakyat telah berbuat banyak bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan penduduk sekitarnya.

Perintis Lingkungan:

Ujang Solikhin (42 tahun)

Jalan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis ProvinsiJawa Barat

Energi alternatif dari limbah organik

Sejak tahun 1985, pria lulusan STM jurusan listrik ini telah memanfaatkan Curug Penganten yang merupakan cabang dari aliran sungai Cirende di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air mikro hidro. Listrik yang dihasilkan berhasil dialirkan ke Desa Kepel dan Desa Tenjolaya. Sukses ini diulangi lagi pada tahun 1987 dengan memanfaatkan aliran irigasi Desa Bantardawa untuk memasok listrik di dua RW.

Ujang Solikin menyaksikan hutan sekitar tempat tinggalnya sering terbakar dan menyisakan tunggul-tunggul kayu yang sulit dipadamkan.Timbullah idenya memanfaatkan tunggul-tunggul itu menjadi arang briket sebagai pengganti bahan bakar minyak untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Rupanya gagasan dan kreativitas itu mendapat sambutan baik masyarakat karena pada saat yang bersamaan terjadi krisis bahan bakar yang menyebabkan minyak tanah sebagai bahan bakar utama seakan-akan menghilang dari pasaran. Kalaupun ada, harganya tidak terjangkau.

Berbagai instansi teknis terkait akhirnya tertarik dan melakukan pembinaan. Setelah melalui penelitian dan pengujian, maka Ujang berhasil memproduksi arang briket dalam beberapa kualitas dengan teknologi sederhana. Selain itu, dikembangkan juga rancang bangun tungku yang mampu membakar arang briket secara sempurna.

Setelah mendapatkan sistem pengolahan Arang Briket yang baik dan sistem tempat pembakaran arang briket berupa (tungku, anglo, dan semacamnya) maka arang tersebut dapat membara dengan sempurna, mulailah merancang mesin dan merakit dan mewujudkan beberapa unit pengolahan mesin arang briket. Untuk itu Ujang bermitra dengan kelompok pengrajin kompor dan pengrajin anglo berbahan tanah liat. Selain itu juga mengajak ibu-ibu rumah tangga membuat tungku/anglo sederhana memanfaatkan kaleng kue bekas. Variasi produknyapun berkembang dengan kompor briket anti ledak.

Sekarang, setiap hari dua ton arang briket dikirim untuk memenuhi pesanan sebuah perkebunan teh di Cianjur.Dari jumlah itu, 70% diproduksi kelompok masyarakat dan sisanya 30% merupakan hasil olahan limbah pabrik kayu setempat. Briket itu dihargai antara 500-700 rupiah perkilogram.

Manfaat dari kegiatan calon, antara lain: dengan pengenalan teknologi yang sederhana kepada masyarakat, maka teknologi tersebut akan mudah ditiru sehingga diharapkan dapat menurunkan angka perusakan hutan dari pencarian bahan bakar kayu, yang beralih dengan memanfatkan sampah organik untuk arang briket.

Pengolahan sampah menjadi energi-biomassa oleh masyarakat merupakan terobosan yang mendukung program *go-green.* Secara ekonomi, kegiatan ini menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sementara itu secara sosial-budaya telah terjadi proses edukasi, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan dalam dan oleh masyarakakat secara mandiri.

Kini Ujang tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitarnya.Buah karyanya dikenal berbagai kalangan, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, perguruan tinggi, maupun media masa. Agak berlebihan memang, kalau Ujang mendapat predikat "jenderal arang briket", tetapi begitulah faktanya.

Pengabdi Lingkungan:

Yohanes Ebo, SP.

Jalan Trans Waiwerang=Sagu, Rt: 021, Rw: 006, Kalurahan WaiwerangKota, KecamatanAdonara Timur Kabupaten Flores Timur, Pro vinsi Nusa Tenggara Timur

Apapun dikerjakan asal bertani

Dua puluh empat tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Flores, Yohanes Ebo, SP., tugasnya tidak pernah beralih dari sebagai penyuluh pertanian. Pekerjaan sarjana pertanian yang lahir45 tahun yang lalu itu memang berat. Di tengah kondisi alam bergunung-gunung, tandus pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, Pak Yon harus bekerja ekstra keras membimbing petani dan nelayan tradisional beralih pada metoda dan teknologi yang lebih produktif.

Pada tahun 1985-1993, Pak Yon melakukan pendampingan petani dan nelayan di Kecamatan Pembantu Witihama. Pak Yon membimbing dan mengajarkan kepada masyarakat untuk bertani melalui cara tanam, pemupukan, penyiangan padi dan lain-lainnya. Melalui tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah desa dirintislah pembentukan kelompok-kelompok tani.

Di lokasi yang sama, Pak Yon juga menjadi Pemandu Sekolah Lapangan dalam program Pertanian Rakyat Terpadu tingkat kecamatan hingga tahun 1994. Kepada kelompok tani diajarkan budidaya okulasi pohon mangga. Kelas belajardan kurikulumnya adalah lahan pertanian di sekitarlokasi petani. Tahun 2006 PakYon kembali memandu pengembangan agribisnis cacang tanah pada Kelompok Tani dari Desa Lamahala Jaya, Desa Beloto dan Desa Dawata, dengan tanah garapan seluas 1 ha.

Kesulitan memperoleh air di musim kemarau adalah problem utama yang dihadapi.Bersama Kelompok Tani Desa Sandosi, Pramuka Kwaran Witihama dan masyarakat dibangunlah embung-embung jebakan air pada lahan perbukitan dan sekitar lahan pertanian. Berpindah tugas di Kecamatan Adonara Timur, pada tahun 1999 melakukan penyelamatan mata air Woka Puken dengan terasering, penanaman pohon buah-buahan dan tanaman keras untuk sumber mata air yang sudah ada.

Pada tahun 2001, di desa Baleto-Watanpao, Adonara Timur, dibantu LSM Serviam, Kelompok Tani Desa Baleto dibuat percontohan budi daya padi sawah di lahan tidurseluas 1 hektar menggunakan irigasi persawahan Watanpao. Karena hasilnya baik, maka pada tahun atas persetujuan DPRD Flores Timur, mulai tahun 2011 akan dikembangkan menjadi lahan sawah beriirigasi teknis membentang sampai pantai timurAdonara seluas 200 hektar.

Dengan dukungan teknis dari UPDT Pembenihan Dinas Pertanian NTT (Propinsi) dan Dinas Pertanian Flores Timur dilakukan penangkaran benih jagung label biru di desa Narasaoisina. Produksi pertanian meningkat dari 1-2 ton menjadi 6 ton per hektar. Sementara itu, mulai tahun 2007 dilakukan pula budidaya nenas dan pembuahan di luar musim. Dengan bantuan sebuah perusahaan, Pak Yon melakukan penangkaran bibit

kakao. Selanjutnya 24.000 bibit kakao dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat disertai dengan penyuluhan cara menanam dan memeliharanya. Di sela-sela tanaman keras dikembangkan pula budi daya tanaman jahe. Untuk mendukung sektor pertanian, bersama Orang Muda Katolik Paroki, Pak Yon membuat pupuk bokashi dan pestisida nabati.

Untuk memperlancar transpotrasi menuju kantong-kantong produksi, pada tahun 2007 Pak Yon bersama Kelompok Tani Ola Gelakat dan Kelompok Tani Kadi Are Desa Narasaosina membangun jalan usaha tani sepanjang 2.4 km yang selesai pada akhir tahun 2009.

Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok tani, baik yang karena diprakarsai dan dimotivasi maupun sebagai dampak replikasi kegiatan itu, PakYon memandang perlu untuk membentukjaringan organisasi yang lebih mapan agar berbagai informasi lebih mudah ditransformasikan kepada masyarakat.Bersama tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan setempat, dibentuklah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) lengkap dengan struktur organisasi dan pemilihan pengurusnya di Kecamatan Adonara Timur. Selanjutnya dibentuk 6 Gapoktan tingkat Desa di Adonara Timur yang melaksanakan Program Pengembangan UsahaAgribisnis Pedesaan (PUAP). Semua itu terjadi di tahun 2008, diikuti pembentukan 3 Gapoktan pada tahun berikutnya.

Agar transformasi pengetahuan lebih cepat sampai kepada masyarakat, dibentuklah berbagai forum komunikasi di berbagai tempat. Berbagai informasi yang disampaikan dalam temu wicara di antaranya mengenai harga komoditi pertanian, infrastruktur perdesaan, kesejahteraan masyarakat, panen bersama, dan berbagai kegiatan lainnya.

Apa yang dilakukan Pak Yon membuktikan bahwa lahan tidur dan lahan kritis semakin menyusut, kebutuhan masyarakatakan airterpenuhi karena hutan dan dan sumberterpelihara, timbal balik hubungan manusia dengan lingkunganpun berjalan harmonis akibat diterapkannya teknik-teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Jalan usaha tani telah membuka akses ke kantong-kantong produksi dan berbagai aktivitas ekonomi termasuk wisata. Dengan lancarnya transportasi maka akselerasi peningkatan arus informasi, pengetahuan dan alih teknologi terjadi lebih cepat. Hal ini secara signifikan telah meningkatkan perekonomian rakyat.Petani tidak lagi terperangkap pada sistem ijon dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja baru di perdesaan mulai tampak hasilnya. Selain itu, ketersediaan bibit setiap saat membuka peluang berkembangnya gerakan penanaman pohon di berbagai tempat di kawasan itu. Dari beberapa kegiatan, terlihat bahwa telah tumbuh kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menjaga dan melestarikan

Pengabdi Lingkungan:

Sumadi, ST.

Jalan Ka rtini XI V RT 01 RW03 Lingkungan Gambirejo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, ProvinsiJawa T imur

Sukses memasyarakatkan jamban kel uarga

Kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Jika masyarakat sering sakit, maka biaya hidup akan lebih banyak beralih untuk biaya berobat. Akibatnya akan sulitlah masyarakat lolos dari belenggu kemiskinan yang selama ini membelitnya.

Adalah seorang Sumadi ST., seorang Petugas Penyuluh Lapangan Sanitasi yang ditugaskan di Puskesmas Kecamatan Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur yang terobsesi untuk mengubah kualitas hidup masyarakat di samping tugasnya pengabdiannya sebagai sanitarian. Beragai forum digunakan untuk memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat masyarakat yang rata-rata petani dan buruh tani dengan penghasilan pas-pasan.

Hasil survai yang dilakukan, Sumadi mendapati kenyataan bahwa hanya dari 2 desa lokasi survai saja ditemukan 600 rumah menggunakan sistem sanitasi turun-temurun yang praktis dan ekonomi, yaitu manci-cuci-kakus di badan sungai.

Ketika ditanyakan alasannya, jawaban semua orang sama, yaitu biaya pembangunan jamban sangat mahal, sehingga tidak terjangkau oleh kemampuan finansial masyarakat yang rendah.

Menggunakan pengetahuannya di bidang teknik lingkungan, Sumadi kemudian merancang septik tank yang memenuhi kelayakan kesehatan, awet dengan harga terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Dirancanglah 2 silinder berdiameter 80 cm^2. Ditanam pada kedalaman 180 cm dan 60 cm, masing-masing berfungsi sebagai penampung dan resapan. Bagi masyarakat, *"jambansumadi"*ini semakin ekonomis karena tidak selalu harus membuat baru, melainkan cukup menutup dan merehabilitasi jamban yang ada. Cara pembayarannyapun bisa diangsur dengan sistem *"arisan"*atau *"cicilan"*.

Walaupun awalnya masyarakat ragu-ragu, lambat laun 3 tipe pilihan yang ditawarkan semakin banyak peminatnya. Persoalan yang kemudian dihadapi adalah kesulitan modal. Untuk itu tidak segan-segan menggadaikan satu-satunya sepeda motor miliknya. Bahkan rumah dan gajinya dijaminkan untuk memperoleh kredit bank.

Hingga kini, *"jamban sumadi"* telah merambah 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk dengan jumlah mencapai 2.800 unit, bahkan di beberapa desa telah mencapai tahap *"open fefecation f~ee (ODF)"* atau setiap individu dalam kominat tidak buang air sembarangan. Mulai tahun 2010 ini pemasyarakatan jamban diperluas untuk menjangkau seluruh kabupaten se provinsi Jawa Timur.

Melalui *"Sumadi-WC"* pola pikir masyarakatpun berubah. Mereka mulai merasakan 3 (tiga) hal yakni: ***rasa takut*** akan terjangkau penyakit, ***rasa jijik*** buang air besar sembarangan, dan ***rasa malu*** bila rumah tidak memiliki jamban, terutama apabila kedatangan

Penyelamat Lingkungan:

LSM PILIHI Dairi

Jalan Sidikalang - Medan, Km 6,2 Panji Bako !! Nomor 62, Kecamatan Sitinjo, Sidikalang Kabupaten Dairi, Pro vinsi Sumatera Utara

Sulit dipercaya, pada kondisi zaman sekarang ini masih ada orang yang meluangkan seluruh waktunya, bahkan hidupnya untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan. Tetapi di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara manusia langka seperti itu masih ada. Bahkan upaya penyelamatan hutan dan lingkungan yang dilakukannya tidak sekedar untuk menjaga keberadaan hutan ataupun mengembalikan kondisi hutan seperti sebelumnya, tetapi upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kondisi hutan di Kabupaten Dairi yang masih bagus

Orang tersebut adalah Hasoloan Manik. Pria yang lahir 43 tahun yang lalu di Sikelang, Nangroe Aceh Darussalam mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan di wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Nangroe Atjeh Darussalam (NAD). Setiap ada permasalahan lingkungan di wilayah tersebut, maka dia tidak pernah ketinggalan untuk ikut berupaya menyelesaikannya. Setiap hari Hasoloan Manik pergi meninggalkan keluarganya untuk melihat kondisi hutan yang ada di wilayah Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara hingga ke Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil di NAD.

Hasoloan Manik berkeliling untuk mengawasi kawasan hutan di sepanjang di wilayah yang meliputi 4 kabupaten dan 1 kota tersebut. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penebangan liar di kawasan tersebut ataupun untuk melakukan investigasi terhadap laporan adanya penebangan dan perusakan hutan kawasan tersebut. Selain melakukan pengawasan dan investigasi, Hasoloan Manikjuga melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup.

Papan nama DPD LSM PILIHI

Bagi keluarganya, ditinggalkan pergi oleh ayah daritujuh anak ini sudah biasa. Hasoloan Manik biasanya pergi 2 - 3 hari baru kembali ke rumah menengok keluarganya, kemudian pergi lagi berkeliling lagi, demikian seterusnya dan bagi Hasoloan Manik ini adalah pekerjaannya. Jarak yang lumayan jauh tidak menjadi kendala baginya. Rute Sidikalang di Kabupaten Dairi Sumatera Utara hingga Kota Subulussalam, Singkil, NAD yang mencapai lebih dari 100 km merupakan hal biasa baginya. Pada mulanya dia berkeliling dengan menggunakan motor roda dua, namun karena kecelakaan yang pernah dia alami saat melakukan kegiatan pengawasan, yang menyebabkan dia kesulitan menggunakannya maka berkat bantuan teman-temanyya dia mereparasi sebuah mobil tua, namun saat inipun mobil tersebut rusak. Saat ini kegiatannya dilakukan dengan mobil piniaman dan dengan berialan kaki apabila akses ke lokasi sulit.

Hasoloan Manik melakukan kegiatan penyelamatan hutan dan lingkungan serta penanaman pohon sejak masih muda. Setelah menikah dia berkomitmen untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan di wilayah yang menjadi tempat dia lahir dan dibesarkan. Tahun 2003 Hasoloan Manik bersama-sama dengan beberapa tokoh pegiat lingkungan mendirikan organisasi Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (PILIHI). Saat ini dia menjabat Ketua DPD LSM PILIHI Kabupaten Dairi. Pada mulanya organisasi ini berkantor di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, namun pada tahun 2004 kantor PILIHI dipindah ke Kabupaten Dairi.Kantor PILIHI ini merupakan rumah yang dia kontrak, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama keluarganya.

Hasoloan Maniksiap bekerla menyelamatkan hutan dan lingkungan dari rumah sekaligus kantor

Sebagai orang yang lahirdan dibesarkan di wilayah ini, Hasoloan Manik merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan dari orang-orang yang berkeinginan mengeksploitasinya dengan tidak bertanggung jawab. Motivasi untuk menyelamatkan lingkungan timbul karena cerita dari sang ayah yang bercerita bahwa pada saat beliau lahir alam telah membantu dan menolong keluarganya terhindarkan dari bencana yang terjadi pada saat itu. Kepedulian terhadap lingkungan semakin meningkat, karena beliau merasakan bahwa alam telah memberikan balasjasa kepada keluarganya. Upaya beliau menyelamatkan alam dengan keluar masuk hutan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mendapatkan balas jasa ketika beliau diberikan ramuan obat yang bersal dari tanaman hutan.Obat tradisional tersebut diberikan kepada anak ke-limanya yang mengalami kesulitan untuk berjalan (lumpuh).Setelah diberikan obat tersebut anak tersebut sembuh, bahkan saat ini sudah dapat berlari-lari.

Bersama pengurus LSM PILIHI di kantornya

Selain hal tersebut, upaya untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan dilakukannya karena keprihatinannya dan kesedihannya melihat banyaknya lahan kritis akibat penebangan liar serta kegiatan peladangan berpindah, sementara peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan tersebut sangat lemah. Oleh karena itu Hasoloan Manik merasakan perlunya banyak kader lingkungan yang tersebar di berbagai lokasi untuk dapat membantu melakukan pengawasan.

Selain membidani berdirinya lembaga swadaya masyarakta (LSM) PILIHI, Hasoloan Manik juga berperan dalam mendorong berdirinya berbagai LSM lingkungan dan LSM pemantau korupsi, khsususnya di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Organisasi tersebut antara lain Generasi Muda Pakpak, Forum Komunikasi Kader Lingkungan Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, dan LSM Armada.

Melalui berbagai organisasi tersebut diharapkan upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan baik dengan melakukan pembinaan masyarakat, pembentukan kader lingkungan, dan juga advokasi lingkungan melalui media massa. Saat ini LSM PILIHI memiliki 242 anggota resmi yang tersebar di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.Namun demikian kader lingkungan yang

telah dibentuk mencapai sekitar 1200 orang lebih dan masyarakat yang dibina mencapai lebih dari 2500 orang. Dedikasi yang tinggi Hasoloan Manik bagi penyelamatan lingkungan inilah yang mendorong banyak orang yang kemudian bersimpati dan mendukungnya.Hasoloan Manik menghabiskan rata-rata Rp. 5 juta per bulan untuk membiayai organisasi dan kegiatan yang dia lakukan. Biaya tersebut berasal baik dari uang pribadinya yang dia peroleh dari membantu orang-orang yang berada di pelosok kampung di sekitar hutan, seperti membelikan barang elektronik di Kota Medan saat dia ke kota, dan juga berasal dari teman-temannya yang bersimpati kepada pekerjaannya.Biaya tersebut habis untuk biaya dia berkeliling melakukan pemantauan, melakukan investigasi lapangan

Salahsatu lokasidi Kab. PakpakBharat yang berhasil dihentikan dari upaya penebangan liar untuk peladangan berpindah tahun 2009

Hal-hal terkait pengawasan terhadap perusakan lingkungan yang telah dilakukannya antara lain:

- Melakukan pengawasan kegiatan pembalakan liar dan perambahan hutan dengan penugasan tim pengawasan untuk investigasi/verifikasi, pelaporan dan penuntutan, serta mendorong kader LH binaan agar ikut mengawasi dan melaporkan setiap kegiatan yang merusak lingkungan.
- Melakukan demonstrasi konstruktif kepada Bupati dan DPRD Pakpak Bharat dan Dairi untuk berpihak pada lingkungan, dan bentuk protes dan tuntutan terhadap kegiatan eksploitasi hutan secara *illegal* yang terjadi di hutan lindung

Tidak mudah melakukan pengawasan terhadap berbagai pihak yang melakukan perusakan lingkungan. Berbagai ancaman baik dari oknum masyarakat pelaku perusakan, ataupun oknum aparat telah menjadi hal yang biasa bagi Hasoloan Manik.Ancaman dan upaya pembunuhan sudah berkali-kali dilakukan oleh orang tidak dikenal, mulai dari dilempar lembing, ditabrak kendaraannya, bahkan upaya pembunuhan pernah dilakukan oleh salah seorang warga Kabupaten Pakpak Bharat, tetapi akhirnya diselesaikan dengan perdamaian. Kebakaran yang terjadi pada kantor PILIHI di Sidikalang pada Oktober 2008 diduga dilakukan oleh orangorang yang tidak suka dengan keberadaan PILIHI dan Hasoloan Manik dalam mengkritisi, menuntutoknumoknum perusak lingkungan.

Dalam menyelamatkan lingkungan dan kawasan hutan, selain melalui pendekatan penegakkan hukum lingkunganjuga dilakukan dengan melaukan pemberdayaan masyarakat. Hasoloan Manik melalui LSM PILIHI mengangkat dan melatih kader lingkungan dari golongan masyarakat sekitar hutan, petani, tokoh marga, tokoh agama, wiraswasta dan kelompok anak didik.Untuk mulai mengenalkan pentingnya lingkungan di

usia dini, PILIHI mengajak anak-anak di tingkat sekolah dasar untuk mengenal lebih dekat lingkungan mereka dengan mengajak menanam pohon sekitar sekolah, pekarangan rumah, dan mengajar materi lingkungan.

Pembentukan kader lingkungan oleh Hasoloan Manik kadangkala dilakukan dengan cara yang unik.Orang-orang yang dimasukkan penjara olehnya karena melakukan tindakan perusakan lingkungan, yang sebagian besar karena ketidaktahuannya, didekati, dibantu dan disadarkan. Orang-orang inilah yang akhirnya menjadi kader lingkungan yang militan, sebab mereka merasa apa yang dilakukannya dulu adalah perbuatan yang tidak benar dan mereka hanya sekedar dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Kader-kader lingkungan ini menjadi kunci untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan sebab mereka sangat paham mengenai pola-pola yang dilakukan oleh para perusak hutan dan penghancur lingkungan.

Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Hasoloan Manik tidak hanya terbatas dalam penyelamatan hutan, tetapi juga hal-hal lain seperti pengawasan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan, bahaya pestisida, bahaya limbah ternak babi, pengolahan sampah menjadi kompos, bahkan mengenai korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat, dll. Berbagai seminar lingkungan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Walaupun pendidikan yang dimiliki Hasoloan Manik hanya mencapai tingkat SMA namun terkait masalah lingkungan hidup Hasoloan Manik kerap kali menjadi pembicara atau pemakalah terkait hal tersebut.Upaya penyadaran pentingnya untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan tidak saja melalui penyelenggaran pendidkan lingkungan semata, tetapi dilakukan juga melalui forum adat dan khotbah gereja.Hal tersebut dikarenakan Hasoloan Manik merupakan tokoh adat Pakpak dan penatua gereja.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus untuk mengurangi terjadinya kerusakan hutan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat petani pelaku peladang berpindah.Para petani peladang berpindah tersebut dijadikan kelompok tani yang selanjutnya mereka dilatih bercocok tanam tumpang sari (*Agtofotestty).* Salah satu kelompok masyarakat yang dibina adalah Kelompok Tani Gambir di Desa Si Tali Telu Urang Jehe. Masyarakat yang sebelumnya merupakan peladang berpindah telah menjadi petani menetap dengan menanam gambir. Tanaman gambir diambil daunnya, yang selanjutnya diekstraksi menjadi gambir. Penanaman gamnbir dilakukan dengan sistem *agtofotestty*dengan tanaman keras berupa durian, pinang, karet, dll. Dengan menanam gambir penghasilan yang diterima masyarakat lebih bagus, dan dari sisi lingkungan tidak merusak sebab yang diekstraksi adalah daun gambir. Selain gambir Hasoloan Manik juga mengembangkan tanaman nilam di wilayah perbatasan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Aceh Singil. Luas tanaman gambir dan nilam tersebut mencapai 840 Ha.

Bersama petani gambir binaannya

Agroforestry gambir

Selain tanaman nilam dan gambir berbagai tanaman dan kegiatan pertanian lain juga dikembangkan untuk dilakukan oleh para petani agar mereka tidak melakukan kegiatan peladangan

Hasil gambir kering siap dijual

berpindah seperti pengembangan lebah madu, pisang barangan, serta kopi. Upaya Hasoloan Manik tersebut memberikan hasil berupa turunnya perambahan hutan lindung. Selain itu jumlah petani peladang berpindah telah jauh berkurang, dan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Upaya penyelamatan hutan dilakukan pula melalui berbagai bentuk rehabilitasi hutan dan lahan. Keg iatan penanaman hutan bahkan dilakukan oleh Hasoloan Maniksebelum lahirnya PILIHI. Hasoloan Manik melakukan menggerakkan pemuda perantau Tanah Karo Kabanjahe sebagai pelestari Lingkungan dengan menanam pohon sepanjang jalan Tiga Panah — Tahura Bukit Barisan —Taman Wisata di Sipiso-piso, jalan Sidikalang menuju Brastagi pada tahun 2003. Berbagai jenis pohon seperti mahoni, meranti, pinus masih nampak pada jalan tersebut hingga saat ini yang memberikan keteduhan bagi pengguna jalan.

Hasil penanaman pohon di Kabanjahe tahun 2003

Uji coba penanamanjati putih di Kabupaten Pakpak

Pada tahun 2004 melakukan penanaman pohon dikawasan hutan adat dan tanah ulayat marga di daerah tangkapan Danau Toba. Hasoloan Manik juga mengembangkan hutan rakyat milik kader seluas 760 ha tersebar di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.Upaya ini diawali dengan mengelola tanah adat di Si Telu Tali Urang Jehe dengan tanaman jati putih (*Gmelina arborea)* seluas kurang lebih 5 ha. Hasoloan Manikjuga mengembangkan tanaman Uru, yang meruopakan tanaman cepat tumbuh (*fast growing species),* yang dapat ditanam di sela-sela tanaman kopi. Pada awalnya banyak masyarakat Dairi yang tidak yakin bahwa tanaman kopi dapat tumbuh bagus di bawah tegakan tanaman Uru. Namun setelah melihat kondisi tanaman kopi di bawah tegakan Uru yang diatanam para kader lingkungan binaan Hasoloan Manik sangat bagus, akhirnya saat ini banyak yang mengikutinya. Pola tumpang sari dengan tanaman cabai, kopi dan uru akhirnya berkembang seperti yang terjadi di Desa Pegagan Hulu, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, yang awalnya dikembangkan KelompokTani Tunas Baru binaan Hasoloan Manik PILIHI. Lahan-lahan yang sebelumnya ditelantarkan mulai ditamani kembali dengan tanaman kayu-kayuan dan dicampur dengan tanaman semusim.

Hasil penanaman pinus GRNHL 2004 ditepi DanauTobaoleh PILIHI

Hasoloan Manikjuga melakukan rehabilitasi pada lahan-lahan bekas peladangan berpindah dengan melakukan kegiatan penanaman dan pengkayaan dengan tanaman sengon (*Paraserianthes falcataria),* jati putih, mahoni (*Swietonia sp),* meranti (*Shorea sp),* aren (*Aringa pinnata),* ingul/suren (*Toorena sureni)* dll. Selain itu berbagai bibit pohon disebarluaskan bagi sekolah SD-SMP di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Penanaman dan

pendistribusian cuma-cuma bibit pohon yang bersumber dari Bank Pohon Sumatera Utara, dan Asosiasi Penangkar Pohon Sumut (ASPENTA) juga dilakukannya.

Pengkayaan lahan-lahan dengan tanaman serba guna sepertiAren

Hasoloan Manik merasa bersyukur bahwa apa yang dilakukannya memberikan hasil yang cukup baik. Saat ini kontrol terhadap pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan telah mulai muncul, diantaranya dengan munculnya berbagai LSM lain yang juga merupakan binaannya. Penebangan liar dan peladangan berpindah jauh menurun, karena banyaknya kader lingkungan yang melakukan pengawasan dan kesadaran para petani untuk merubah aktivitasnya dari peladang berpindah dengan bertani menetap setelah melihat manfaat ekonomi yang diperolehnya.Jumlah bencana tanah longsorjauh berkurang dari yang sebelumnya mencapai 70an orang pada tahun 1998-2003 hingga tinggal 5 sepanjang 2004-2010. Namun demikian masih ada ganjalan dalam dirinya, karena peran pemerintah dalam upaya menyelamatkan hutan dan lingkungan, khususnya pemerintah kabupaten masih sangat lemah. Beberapa pemerintah kabupaten masih menganggap LSM merupakan lawan, bukan kawan. Tetapi hal tersebut tidak membuat dirinya patah semangat, tetapi malah menjadi tantangan.Bahkan salah satu idenya untuk memberikan "reward" berupa uang Rp.100 ribu/pohon kepada masyarakat yang mempertahankan tanaman durian di Kota Subulussalam di terima Bupati.

Agroforestry Pohon Uru, kopi,jagung dan kacang

Hasoloan Manik masih menyimpan kesedihan melihat kondisi lingkungan, khususnya di Sidikalang yang menjadi ibu kota Kabupaten Dairi. Kota tempat dimana ia tinggal kondisinya sangat kotor dan kurang tertata. Sampah berserakan dimanamana, fasilitas kebersihan sangat kurang. Sebagai warga masyarakat, dia merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan kota Sidikalang menjadi kota yang bersih, warganya memiliki etika terhadap lingkungan, untuk itu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan harus terus ia lakukan, dan tentu saja dengan tidak meninggalkan apa yang telah dia lakukan hingga saat ini. Karena masyarakat di berbagai pelososk wilayah mulai dari Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat hingga Subulussalam di NAD masih menunggu bantuan dan bimbingannya.Nampaknya upaya Hasoloan Manik dalam menyelamatkan hutan dan lingkungan tidak bisa berhenti saat ini, sebab hutan, lingkungan dan masyarakat masih menunggu sapaannya.

Salah satu lahan masyarakat yang mencontoh penanaman Pohon Uru

Penyelamat Lingkungan:

KPSA Puspita Hijau I Masdjidin (61 tahun)

Desa Sulek Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Pro vinsi Jawa timur.
29 Tahun Menyelamatkan Kawasan Gunung Sulek Di lahan Milik Masyarakat seluas 274ha Di Plosok Kabupaten Bondowoso

Kawasan Gunung Sulek, Bondowoso-Jawa Timur rawan bencana. Sementara itu kualitas hidup masyarakat desa di sekitarnya sangat rendah. Itulah yang mendorong menggerakkan inisiatif Masdjidin melakukan berbagai upaya perbaikan kualitas lingkungan. Ia sendiri hanya berpendidikan setingkat Sekolah Dasar, namun bersama kelompoknya yaitu KPSA Puspita Hijau, melakukan berbagai upaya perlindungan hutan secara terus-menerus sekurang-kurangnya selama 29 tahun.

Duapuluh sembilan tahun yang lalu, Gunung Sulek adalah kawasan gundul, hanya ditumbuhi alang-alang.Keterbatasan sumber air juga menyebabkan produktivitas pertanian terbilang sangat kecil, karena tidak adanya sumber air yang dapat dipergunakan sebagai irigasi. Masyarakat pada umumnya hanya memanfaatkan untuk berbudidaya ketela pohon atau tanaman semusim lainnya (jagung dan sebagainya), yang hanya dilakukan pada musim penghujan. Begitu pula halnya dengan pertanian padi.

Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat lamban sekali dan menyebabkan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Bencana alam juga menghantui warga masyarakat ketika musim penghujan tiba, terutama bencana longsor. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1973 dan 1979 yang mengakibatkan kerugian material penduduk disekitar lereng perbukitan.

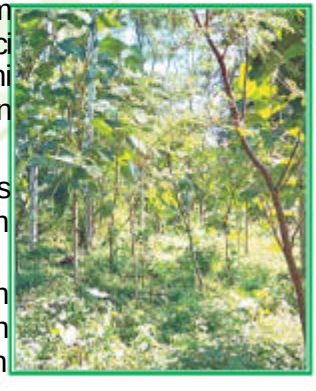

Pada musim kemarau, mendapatkan air untuk keperluan memasak dan minum warga harus berjalan kaki sejauh 5 km ke desa tetangga. Untuk mencuci pakaian dan mandi, terpaksa menggunakan air sungai.Kondisi ini menyebabkan masyarakat rawan terserang penyakit muntaber, diare dan penyakit kulit.

Keprihatinan terhadap kondisi itu membuat Masdjidin melakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui 4 aktivitas utama, yaitu penghijauan lahan kritis, penyuluhan lingkungan, penyelamatan sumber air dan pengelolaan sumber air.

Dimotori 17 orang, pada tahun 1981 Masdjidin melakukan penghijauan dengan menanam pohon kapuk dan bambu pada 6 hektar lahan kritis. Dalam 5 tahun berikutnya, garapannya berkembang menjadi 25 hektar. Di tahun 1987 lahan

Saat ini, luas lahan garapan itu mencapai 274 hektar. Terdiri dari 80% tanaman bambu dan 20% tanaman kayu-kayuan (bambu, pete, mindi, gmelina, jambu monyet, sengon laut, jati dan bajur).Komposisinya 82 hektar milik kelompok KPSA Puspita Hijau dan 192 hektar milik masyarakat.

Penyuluhan lingkungan diawali dari beberapa anggota masyarakat melalui kegiatan Klompencapir Semut Ireng. Dalam setiap acara sosial (pengajian dan rapat desa serta kegiatan klompencapir) disisipi pula dengan wacana penghijauan. Sehingga pada prosesnya masyarakat tidak merasakan adanya terpaksaan untuk menerima hal-hal yang baru bagi mereka.

Ketika penghijauan telah berjalan, Masjidin secara perlahan mulai menyebarluaskan keberhasilan ini sebagai bukti bahwa yang dilakukan lebih menguntungkan dibandingkan cara sebelumnya. Best practice inilah yang kemudian dipakai Masjidin sebagai modal awal untuk mengajak masyarakat yang lebih banyak lagi untuk ikut berperan dalam kegiatan penghijauan.

Pada tahun 1987 sumber mata air yang ada pada kawasan Gunung Sulek berjumlah 10 buah dengan debit 5-10 liter/menit. Ini masih jauh dari cukup dalam memenihi kebutuhan sehari-hari apalagi kebutuhan irigasi pertanian. Melihat kondisi ini Masdjidin dan kelompoknya lebih giat lagi melakukan penghijauan di sekitar sumber mata air dengan tanaman bambu.

Dampak penghijauan ini adalah timbulnya sumber-sumber mata air baru yang berasal dari sekitar rumpun bambu.Jumlahnya mencapai 40 mata air dengan debit sekitar 20-30 liter/menit. Untuk menyalurkan dan membagi air, digunakan batang-batang bambu sebagai pipa.Melalui jalan yang belok-belok dan kemiringan mencapai 40 pengaliran air berhasil dilakukan sepanjang 2.000 meter.

Meningkatnya pendapatan masyarakattelah meningkatkan rasio pendidikan. Jika semula penduduk yang mengenyam pendidikan tidak lebih dari 10%, kini telah meningkat menjadi 75%.

Budaya bersih di masyarakatpun mulai tumbuh dan berkembang. Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari telah menekan wabah muntaber, diare dan gatal-gatal yang kerap timbul sebelumnya.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai dampak sosial lainnya juga tumbuh. Saat ini budaya hidup bersih telah berkembang ditengah masyarakat karena telah mengalami.

Karena kegigihannya dalam memperjuangkan lingkungan dengan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, telah mengahantarkan Masdjidin dan kelompoknya KPSA Puspita Hijau mendapatkan penghargaan sebagai Penyelamat Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2003, Juara III Lomba GSP Se Jawa Timur pada Tahun 2004 dan Juara I Penyelamatan Lingkungan Oleh Propinsi Jawa Timur pada tahun 2005.

Teladan yang diberikan Masdjidin dan KPSA Puspita Hijau menjadi inspirasi terbentuknya kelompok serupa di berbagai tempat seperti Kelompok Sumber Makmur yang berasal dari Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kelompok Mustika Hijau dan Jaya Mamur dari Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari, Kelompok Tani Penghijauan dari Desa Wonosari Kecamatan Grujukan dan Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan.

Namun demikian KPSA Puspida Hijau masih berkeinginan untuk mengembangkan terasering, hutan rakyat, pengayaan tanaman, pembuatan kawasan hutan bambu baru dan persemaian berbagai bibit tanaman kayu. Sedangkan obsesi jangka panjang yang ingin dicapai adalah tertutupnya seluruh lahan kritis dengan tanaman keras, lebih banyak lagi sumber air yang diselamatkan, peningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia setiap anggota dan keluarganya. Dan semua itu akan dapat terwujud melalui kaderisasi.

Penyelamat Lingkungan:

LSM Rekonvasi Bhumi

Jalan R.H. Joenus Soemantri No 4/20 RT I RW I Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Pro vinsi Banten

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Rehabilitasi dan Konservasi Bhumi (LSM-RKB) berawal dari kegiatan pengenalan keanekaragaman hayati kepada masyarakat Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak dan sekitarnya. Saat itu LSM-RKB mengajak berbagai lapisan masyarakat, mulai daripetani, pengusaha, industri hingga pemerintah untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai dasar utama pengambilan keputusan pembangunan atau akan kembali bersama-sama kembali miskin karena pembangunan kehilang daya dukunglingkungan.

LSM-RKB membangun dan mengembangkan hubungan hulu hilir dengan mekanisme transaksi jasa lingkungan (*environment service),* sebagai upaya membangun keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam DAS

Tujuan implementasi konsep hubungan hulu hilir dengan mekanisme jasa lingkungan ini untuk mengontrol dan mengatasi penebangan hutan yang tidak lestari *(deforestasi);* membangun keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi; menjaga dan mempertahankan fungsi hutan dalam menjaga tata air; menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri; dan menjadi alternatif penghasilan masyarakat dengan tanpa menghilangkan aksesbilitas masyarakat terhadap sumber daya alam yang mereka miliki.

Proses membangun dan mengembangkan hubungan hulu hilir dengan mekanisme transaksi jasa lingkungan di DAS Cidanau, dilaksanakan dengan tahapan-tahapan: menyusun rencana dan strategis; identifikasi penyedia dan pemanfaatan jasa lingkungan DAS CIdanau; sosialisasi dan kegiatan di tingkat FKDC, sosialisasi dan kegiatan di tingkat pemanfaatan jasa lingkungan dan terakhir melakukan sosialisasi dan kegiatan di tingkat pemanfaatan jasa lingkungan.

Kondisi geografis kawasan tersebut merupakan kawasan pegunungan, dengan ketinggian antara 250 —500 meter dari permukaan laut. Dari hasil proses identifikasi dan evaluasi penyediajasa, ditetapkan lokasi kegiatan Jasa Lingkungan berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, yaitu di desa Citaman Kecamatan Ciomas dan Desa Cibojong kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

Sementara itu, identifikasi pemanfaatan (buyer) jasa lingkungan DAS Cidanau mengarah pada PT. Krakatau Tirta Industri (KTI) sebagai satu-satunya pemanfaatan dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan dari DAS Cidanau untuk tujuan komersial.

Melalui proses sosialisasi dan negosiasi yang panjang, akhirnya PT. Krakatau Tirta Industri (KT%) bersedia menjadi *pioneer* pemanfaat yang membayar secara sukarela *(voluntary)* kepada masyarakat di hulu selama 5 tahun, dengan jumlah pembayaran seluruh sebesar Rp.950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Dana itu dibayarkan kepada kelompok tani hutan di hulu DAS yang menjaga tegakan tanamannya dengan masa perjanjian selama 5 tahun. Nilai yang diterima masing-masing kelompok dengan luas lahan 25 hektar sebesar Rp.30.000.000 per tahun.Luas kawasan yang menerima pembayaran jasa lingkungan saat ini sudah mencapai luas 100 hektardengan jumlah anggota kelompoktani ~ 215 orang. Melalui kesepakatan, 5% dari hasil pembayaran jasa lingkungan disisihkan sebagai kas Kelompok Tani untuk biaya pembenahan jaringan air bersih dan tata kelola air bersih.

Hasil kerja yang serta merta dapat disaksikan saat ini adalah 14.500 pohon yang ditanam Kelompok Tani Desa Citaman dan 13.500 pohon yang ditanam oleh Kelompok Tani Desa Cibojong. Semuanya tegakan terpelihara dengan baik dan jumlahnya melampaui kesepakatan. Sukses kerja bersama yang saling menguntungkan ini telah mendorong PT. KTI untuk memperpanjang kontraknya dengan masyarakat selama 5 tahun ke depan dengan luasan hingga 300 hektar.

Pembina Lingkungan:

Dra. Endang Sulistyowati, M.Pd.

Jalan Kinibalu $E22, RT01 RW 03, Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo PropinsiJawa Timur.

Bu guru yang serba bisa

Endang Sulistyowati mengajar Biologi dan Lingkungan Hidup di SMAN-2 Probolinggo sejak tahun 2003.Di tahun 2009 Bu Endang pindah ke SMAN-1. Beliau mempunyai keinginan membentuk anak didiknya menjadi insan yang peduli dan cinta lingkungan. Obsesi ini timbul karena kota Probolinggo tempat beliau bertugas terletak di daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawatan tinggi terhadap gelombang pasang dan abrasi pantai.

Kedudukan suaminya sebagai Lurah membuatnya lebih leluasa untuk menggerakkan masyarakat pesisir menanam mangrove. Karena itu tidak kurang dari 23.000 batang mangrove *(Rhiziphora)* berhasil ditanam pada 5 hektar luasan pesisir. Tidak hanya di tempat itu, Bu Endang juga mengajak SMA PGRI yang berada di Tambak Wedi Surabaya menanam 5.000 mangrove pada tahun 2005.

Act Locally, Think Globally dan *Bertindak Sekarang, Sejahtera Hari Esok* adalah motivasi yang melatarbelakangi gerakan Bu Endang dalam menciptakan generasi muda yang cinta lingkungan.

Siswanya diajak melakukan aksi lingkungan. Bermacam-macam bentuknya, di antaranya addalah melakukan penghijauan di sekolah dan kawasan sekitarnya, menghemat penggunaan listrik, menciptakan suasana menyenangkan dalam pembelajaran lingkungan hidup, mengenalkan konsep konservasi, aksi adopsi sungai, pemilahan dan pengolahan sampah di sekolah, membuat lubang-lubang biopori, dan melakukan pembinaan di b ebe rapa sekolah lainnya di Probolinggo.

Untuk menciptakan rasa suka menanam dan memelihara di lingkungan, Bu Endang menciptakan program **sajisapo** atau "satu jiwa satu pohon" bagi siswa, dan **sagusapo** atau "satu guru satu pohon". Gagasan yang dikembangkan di SMAN-2 ini diteruskan rekan sejawatnya, walaupun Bu Guru ini sudah pindah tugas ke SMAN-1.

Tak cukup puas mendidik Siswa, mulai tahun 2005 Bu Endang mengajak kelompok-kelompok masyarakat melalui organisasi-organisasi ibu-ibu tingkat RT/RW melakukan penghijauan. Mula-mula dilakukan sendiri, selanjutnya dibentuklah beberapa motivator untuk mengajak lebih banyak lagi kelompok. Hasilnya dapat dilihat di RT-5 Kelurahan Mayangan, RT-6 Sumber Taman, RT-01 Ketapang, dan RW-04 Pilang. Kepada masyarakat, Bu Endang juga mengenalkan *recycling* dan *reuse,* "komposter aerob" dan penglolaan sampah organik yang berasal dari limbah dapur. Semuanya langsung dipraktekkan oleh kelompok-kelompok Bu Endang.

Sebagai "isteri pak lurah", sudah barang tentu Bu Endang mempunyai kepentingan dengan kebersihan dan keindahan kampung. Karena itulah beliau memprakarsai gerakan KABIH atau Kampung Bersih, Indah dan Hijau. Mula-mula diterapkan di kelurahan di mana Bu Endang tinggal, selanjutnya diperluas hingga akhirnya terbentuk RW-RW percontohan yang tersebar pada 29 kelurahan di kota Probolinggo. Fokus kegiatan gerakan ini adalah memanfaatkan sampah kering untuk seni kriya sehingga sampah kembali memiliki nilai ekonomi. Sulitnya memperoleh bahan baku diatasi dengan cara arisan sampah.

Untuk menambah semangat masyarakat, sekali-sekali diajaklah kelompok-kelompok itu melakukan studi banding ke berbagai daerah yang memiliki program pembinaan serupa dan program lain yang bisa merangsang ide dan kreativitas anggota kelompok. Karena itu tidaklah mengherankan jika kemudian Kelurahan Sumberlaman terdapat kampung bunga yang tidak saja memberikan tambahan penghasilan masyarakat melalui pembibitan dan penjualan bunga hias, tetapi juga memanjakan estetika. *Say it with flower,* mungkin begitu maksud Bu Guru.

Pembina Lingkungan:

Prof Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo M.Si

Rektor Universitas Negeri Semarang
Jalan Kendeng Barat !! No. 44, Kelurahan Sampangan
Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang

Prof Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo M.Si saat ini dikenal sebagai seorang Rektor di Universitas N egeri Semarang (UN ES). Kepribadianya dikenal sebagai pemimpin dan teladan dalam menentukan arah kebijakan dan implementasinya oleh seluruh civitas academic a.Salah satu hasilnya adalah telah ditetapkannya UN ES sebagai Universitas Konservasi (*conservation university).* Prestasi ini dicapai karena seluruh tatakelola internalnya didasarkan pada nilai-nilai dan praktik konservasi.

Predikat UN ES sebagai sebuah universitas konservasi tidak lepas dari karekteristik lingkungannya yang kaya dengan biodiversitas. mni merupakan respon terhadap beragam perubahan dan tantangan di bidang lingkungan saat ini, terutama yang berdampak langsung pada proses pembangunan dan interaksi antara manusia dengan alam.

Pak Rektor bersama-sama beberapa mahasiswa sebagai pionir memelopori penanaman pohon melalui gerakan "SERBU" yaitu Gerakan Tanam Seribu Batang Pohon. Diawali dengan mengubah 64 hektar lahan kritis seluas menjadi Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati).

Melalui Taman Kehati, 15 hektar kawasan UN ES digunakan sebagai lahan konservasi dan diisi dengan 51 jenis tanaman langka khas Jawa Tengah. Diluar taman kehati, sekitar 30 ha ditanami jenis tumbuhan lunak yang merupakan bahan baku industri partikel, 12 ha lainnya digunakan sebagai lahan budidaya jarak kepyar yang merupakan bahan baku sumber bioenergi alternatif yang pemanfaatnnya diperuntukan masyarakat sekitar.

Selain itu UN N ES jugatelah memelopori penghijauan mangrove di Desa Tapak, Semarang (Pantai Utara Pulau Jawa) pada tahun 2009. Dalam rangka hari menanam nasional, diluncuncurkanlah Gerakan UN N ES Menanam, dimana mahasiswa baru wajib menanam 1 pohon yang harus dijaga dan dirawat sampai lulus dari UN N ES. Gerakan penanaman ini lebih dikenal dengan ***"sak uwong, sak uwit"***dalam bahasa Indonesia berarti satu orang, satu pohon.

UNNES telah membuat dua buah embung besar yang dapat menampung air hujan dan air limbah kampus yang tidak mengandung bahan beracun. Pada embung ini disebarkan 4500 benih ikan Nila dan 4500 benih ikan Lele. Selain itu dibuat pula kebun wisata pendidikan untuk keperluan pembelajaran bagi civitas dan dibuka untuk masyarakat umum sebagai media pendidikan lingkungan hidup sejak dini, terutama bagi siswa SD dan SMP.

Survei pendahuluan terhadap keanekaragaman hayati (2004-2009) menunjukan bahwa lingkungan UNNES merupakan habitat bagi tidak kurang dari 58 jenis burung, 10termasukjenisdilindungi peraturan perundangan Indonesia, 3jenis diantaranya endemik, 2 jenis termasuk kategori *CITES (Concervension on International Trade In Endangered Species of Wild fauna dan Flora)* dan satu jenis termasuk kategori endangereg (terancam punah) *versi IUCN (International Union for Conservation of Nature,* serta 50 jenis kupu-kupu (1 jenis diantaranya dilindungi peraturan perundangan Indonesia).

Merespon pemanasan global, Unnes bertekad menjadi *Green Campus University* melalui Konservasi Biodiversitas, *Green Space Management, Green Architecture, Green Transportation, Paperless Policy,* Pengelolaan Limbah, *Green Energy,* Pembuatan Biopori, Kader Konservasi dan Keberlanjutan penanaman pohon.

Saat ini, UNES mendapat permintaan kerja sama dari 2 universitas di Prancis yaitu University of Strasbourg dan Angers University untuk mengembangkan universitas yang berbasis lingkungan.

ADI PU RA

ADIPURA merupakan salah satu program prioritas dalam pen gen dalian pen cemaran dari kegiatan domestik

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

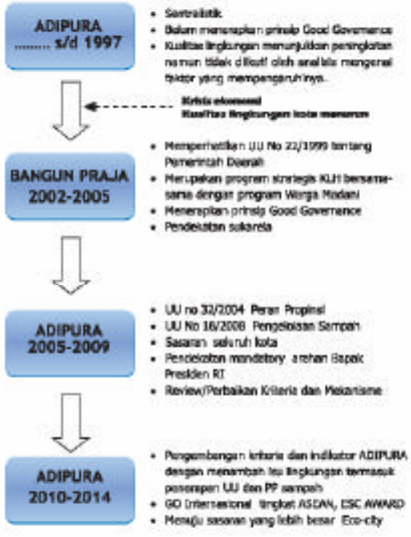

1.Perkembanganjumlah kota pesertaADIPURA

Perkembangan jumlah kota peserta ADIPURA dapat dilihat pada Gambar 1.

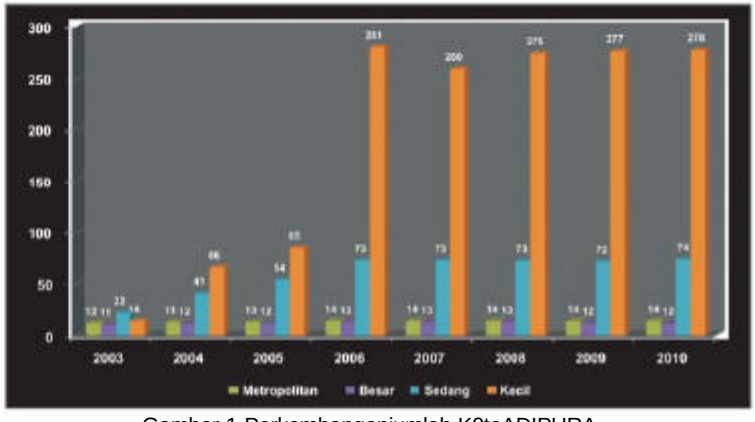

Gambar 1 Perkembanganjumlah K0taADIPURA.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah peserta adipura mulai tahun 2006 melonjak tinggi. Hal ini disebabkan perubahan sifat keikutsertaan.Pada tahun sebelum 2006 sifat keikutsertaan Kabupaten/Kota melibatkan diri secara sukarela. Sedangkan pada tahun 2006 dan seterusnya bersifat mandatory dan melibatkan unsur provinsi dan masyarakat dalam melakukan pemantauan.

2. Perkembangan NilaiAdipura

Pencapaian sasaran ADIPURA, yaitu jumlah kabupaten/kota yang memenuhi skala nilai ADIPURA baik untuk tahun 2009-2010 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, jumlah kabupaten/kota yang memenuhi skala nilai ADIPURA baik (skor 71) adalah 164 kabupaten/kota, namun penghargaan anugerahADIPURAdiberikan kepada kabupaten/kota dengan sebanyak 137 kota, sedangkan penghargaan best effort diberikan kepada 25 kota dan 10 kota bagi peraih sarana dan prasarana terbaik untuk pasar tradisional, taman kota, dan terminal untuk kategori kota metropolitan dan kota besar.

Perkembangan jumlah perolehan Anugerah ADI PURA dapat dilihat pada gambar 2.

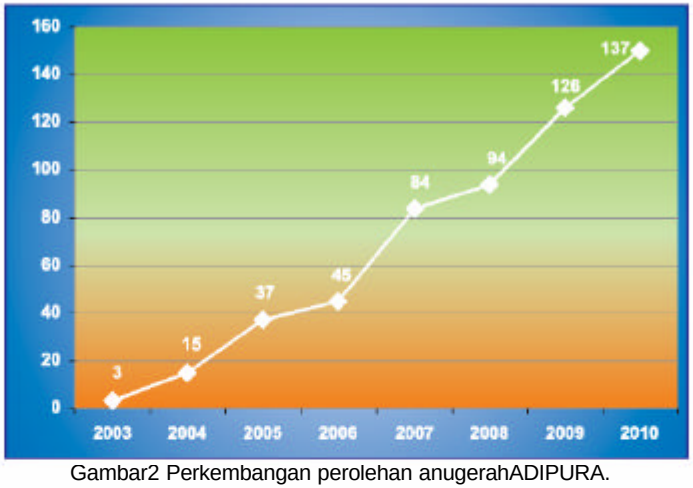

Gambar2 Perkembangan perolehan anugerahADIPURA.

PerkembanganjumlahperolehanAnugerahADiPURAberdasarkan kategori kota dapat dilihat pada gambar3.

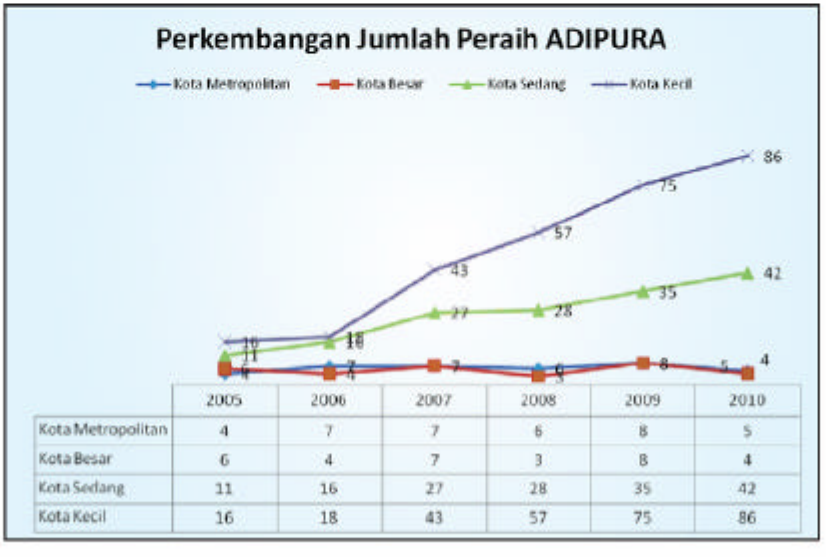

Gambar 3 Perkembangan peraih anugerah ADIPURA berdasarkan kriteria Kota.

Adapun nilai rata-rata kota peserta Adipura dapat dilihat pada Gambar 4.

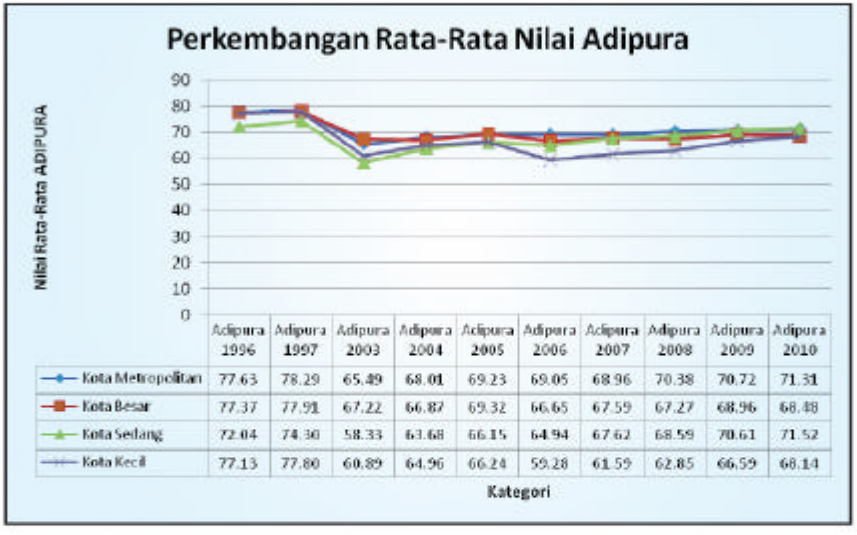

	Adipura 1996	Adipura 1997	Adipura 2003	Adipura 2004	Adipura 2005	Adipura 2006	Adipura 2007	Adipura 2008	Adipura 2009	Adipura 2010
Kota Metropolitan	77.63	78.29	65.49	68.01	69.23	69.05	68.96	70.38	70.72	71.31
Kota Besar	77.37	77.91	67.22	66.87	69.32	66.65	67.59	67.27	68.96	68.48
Kota Sedang	72.04	74.36	58.33	63.68	66.15	64.94	67.62	68.59	70.61	71.52
Kota Kecil	77.13	77.80	60.89	64.96	66.24	59.28	61.59	62.85	66.59	68.14

Gambar 4 Rata-rata tingkat kinerja kota peserta program ADIPURA

Dari hasil pelaksanaan dapat dilihat bahwa jumlah peraih Adipura cenderung meningkat dari periode sebelumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Semakin meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan.
2. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam pengolahan lingkungan.

Untuk Periode 2009-2010 Program ADI PURA mempunyai target kualitas Adipura yang lebih tinggi dengan menerapkan undang-undang no. 18 tahun 2008. Pada pelaksanaannya proses pemilahan dan pengolahan sampah dimasukkan ke dalam kriteria penilaian. Dengan ditingkatkannya kriteria penilaian, ternyata banyak kota yang dapat mengikuti kriteria tersebut.Hal tersebut ditandai dengan meningkatjumlah kota peraih penghargaan ADI PURA pada tahun 2009-2010.

3. Penunjang Program Adipura

Untuk menunjang kegiatan ADIPURA agar lebih efektif, maka telah dilakukan pengembangan sistem informasi dan analisa ADI PURA. Sistem ini terdiri atas basis data fisik dan non fisik yang dapat dipergunakan untuk menganalisa kinerja masing-masing kabupaten/kota, sehingga hasil analisa tersebut dapat digunakan untuk memacu dan meningkatkan kabupaten/kota agar lebih bersih dan teduh. Untuk mengembangkan prinsip transparasi, maka telah dikembangkan website Program ADIPURA, sehingga masyarakat umum dapat mengakses dan mengetahui kegiatan-kegiatan ADIPURA yang telah dan akan dilaksanakan.

4. Program ADIPURA Kedepan

ProgramADIPURAakanterus dikembangkan seiring dengan perkembangan isu lingkungan yang ada. Dengan adanya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, maka ADIPURA merupakan salah satu alat dalam penerapan Undang-Undang tersebut. H al tersebut diimplementasikan dalam pengembangan kriteria dan mekanismeADIPURAantara lain pengembangan kriteria dan indicator pencemaran udara, program kali bersih (Prokasih), Sanitasi yang pada gilirannya menuju Eco-City.

Selain itu, Program ADIPURAjuga mengembangkan Indeks ADIPURA yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Perkotaan untuk kota-kota peserta ADIPURA.

ADIPURAjuga menjadi entry point bagi kota-kota ADIPURA di tingkat internasional,. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan di kabupaten/kota, Kementerian Lingkungan H idup dilakukan upaya untuk mengikutsertakan kabupaten/kota yang berperingkat tinggi atau menunjukkan kinerja yang baik, dalam jejaring kerja di tingkat Asia-Pasifik serta penilaian kota yang berwawasan lingkungan di tingkat Internasional. Kerjasama di tingkat Asia-Pasifik seperti "Kitakyushu Initiative Network" merupakan jejaring kerja bagi kota-kota dalam peningkatan kapasitas (*capacity building)* di bidang pengelolaan lingkungan perkotaan.

Sedangkan di tingkat ASEAN, kota-kota peserta ADIPURA akan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam Environmental Sustainabality AWARD, yaitu penghargaan bagi kota-kota di terbaik ASEAN dalam rangka

pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh ASEAN *Working Group on Environmental Sustainable Cities.*

Penyelenggara:

PROPER

••• meningkatkan peran aktif Pemerintah Pro vinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PROPER lebih efektif dan efisien

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentifdan disinsentifreputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih *(cleaner production).*

Sedangkan tujuannya adalah untuk: (i) mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan, (ii) meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, (iii) meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, (iv) meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan di bidang lingkungan, (v) meningkatkan penaatan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat, dan (vi) mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan pada lingkungan.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam pelaksanaan PROPER adalah: (i) memudahkan langkah-langkah proaktif para pemangkku kepentingan melalui penerapan kategorisasi dengan peringkat warna, (ii) Dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan kredibel di mata para pemangku kepentingan, (iii) diarahkan pada perusahaan yang peduli pada reputasi atau citranya, (iv) dilakukan bersama dengan instrumen penaatan lainnya, seperti instrumen ekonomi dan penegakan hukum, (v) melibatkan semakin banyak perusahaan sehingga mencerminkan penaatan perusahaan secara keseluruhan, tercapainya konsistensi dan keadilan pengelolaan lingkungan di Indonesia, dan (vi) meningkatkan peran aktif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pelaksanaan PROPER lebih efektif dan efisien.

Insentifdan disinsentif penaatan dalam PROPER dikategorikan dalam 5 (lima) peringkatwarna, masing'' masing adalah:

i Peringkat **Emas,** untuk usaha atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan pengendalian pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan, dan atau melaksanakan produksi bersih dengan hasil yang sangat memuaskan

ii Peringkat **Hijau,** untuk usaha atau kegiatan yang telah melaksanakan pengendalian pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan dengan hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

iii Peringkat **Biru,** untuk usaha atau kegiatan yang telah me laksanakan pengendalian pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan dengan hasil minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

iv Peringkat **Merah,** untuk usaha atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan.

v Peringkat **Hitam,** untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.

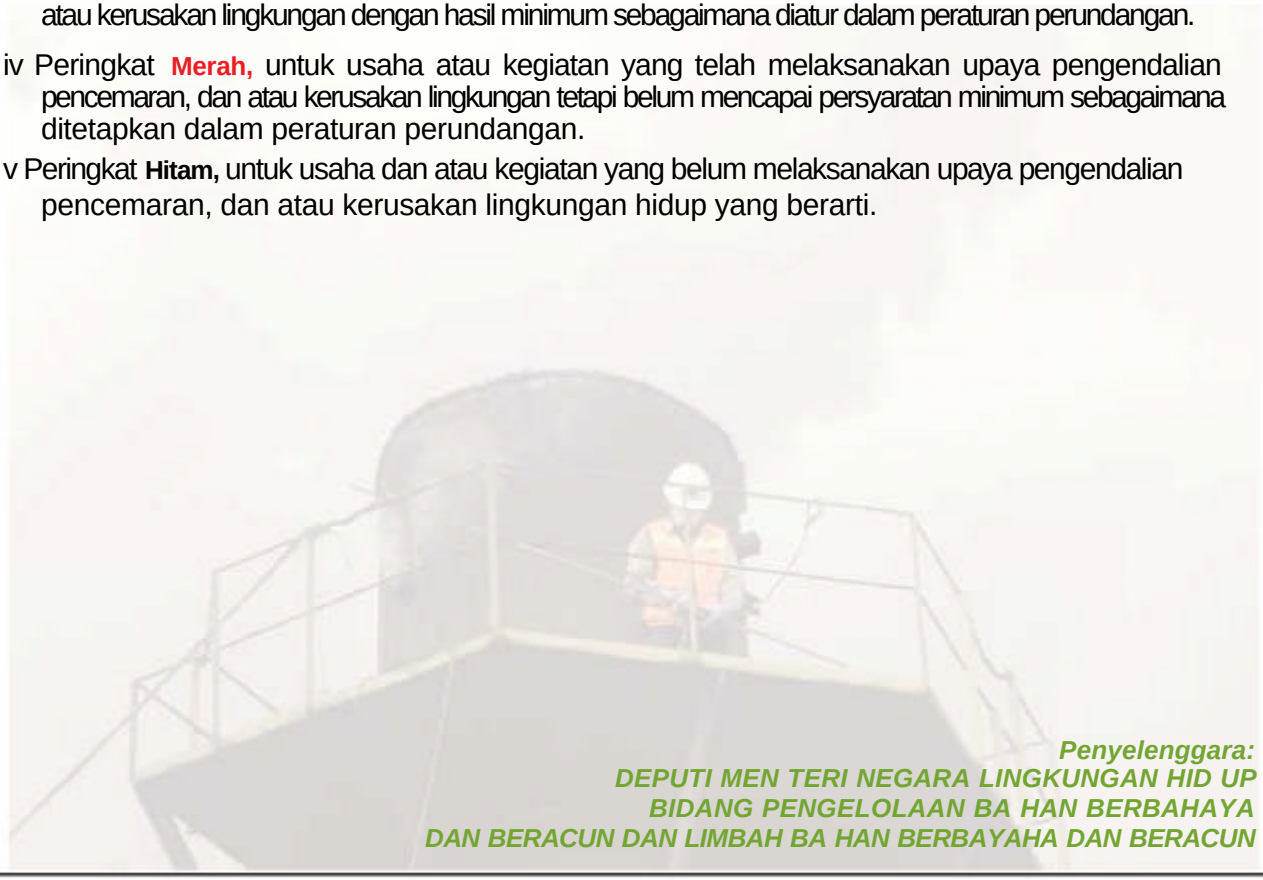

Penyelenggara:
DEPUTI MEN TERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG PENGELOLAAN BA HAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DAN LIMBAH BA HAN BERBAYAHA DAN BERACUN

PROGRAM LANGIT BIRU

Komponen penting dalam Program Langit Biru adalah partisipasi masyarakat dalam pengendalian emisi kendaraan bermotor

Langit Biru adaah salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan mengendalikan pencemaran emisi sumber bergerak melalui implementasi kebijakan secara terkoordinasi dan terpadu. Pada saat ini pengendalian pencemaran masih diprioritaskan dari kendaraan bermotor.

Upaya pengendalian pencemaran emisi kendaraan bermotor pada hakikatnya dipengaruhi oleh empat faktor yaitu (1) Teknologi dan standar emisi, (2) kualitas bahan bakar, (3) pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P) serta (4) penerapan transportasi berkelanjutan. Dua faktor pertama ditetapkan secara nasional dan menjadi kewenangan pusat sementara untuk faktor ke-3 dan ke-4 peran daerah lebih dominan.

Untuk pengaturan standar kendaraan tipe baru, KLH sudah menetapkan Permen LH No. 04/2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Tipe Baru yang merupakan revisi dari Kepmen 141/2003. Untuk kendaraan bermotorlama (in-use) mengacu kepada Peraturan Menteri LH no. 05/2006tentangAmbang Batas Emisi Kendaraan Bermotor di Jalan (in-use).Peraturan ini menjadi acuan bagi semua kendaraan termasuk angkutan umum yang wajib menjalani uji KIR dan program P&P.

Salah satu komponen penting dalam PLB adalah partisipasi masyarakat dalam pengendalian emisi kendaraan bermotor. Masyarakat diharapkan melakukan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotornya secara rutin untuk memastikan emisinya memenuhi baku mutu, kinerja mesin lebih baik serta penghematan bahan bakar.

Untuk menilai pelaksanaan PLB di daerah, maka KLH melaksanakan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan.Kegiatan tersebut mulai diuji coba pada pada tahun 2006 di 3 kota, kemudian tahun 2007 di 12 kota, dan 2008 di1 6 kota. Pada tahun 2007 dan 2008 kota yang mendapat peringkat tertinggi adalah Denpasar dan Tangerang.

Kedepan, pengendalian pencemaran emisi akan dikembangkan juga untuk sumber pencemar lain seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, kendaraan off road, dll.

Penyelenggara:
DEPUTI MEN TERI N EGARA LIN GKUN GAN HID UP
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

AD IWIYATA

AD! W!YA TA mempunyal makna: tempat yang balk dan ldeal untuk dapat memperoleh llmu pengetahuan dan berba gal norma serta etlka yang dapat menjadl dasar bagl manusla menuju terclptanya kesejahteraan hldup dan menuju clta-clta pembangunan berkelanjutan.

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Program Adiwiyata bertujuan menciptakan kondisi sekolah yang baik bagi tempat pembelajaran dan penyadaran seluruh warga sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), sehingga di kemudian hari dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dasar dalam berkehidupan yang antara lain meliputi : kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Prinsip-prinsip dasar Program Adiwiyata adalah partisipatif (komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tanggung jawab dan peran) dan berkelanjutan (seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif).

Dalam mewujudkan Program Adiwiyata telah ditetapkan beberapa indikator yaitu:

i. Pengembangan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
ii. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan
iii. Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif
iv. Pengembangan dan atau Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang ramah lingkungan.

Keempat indikator tersebut dijabarkan lagi menjadi beberapa kriteria yang lebih terperinci dan detail.

Program yang dimulai sejak tahun 2006 ini, setiap tahunnya menyeleksi usulan SD, SMP dan SMU/sederajat yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Hasil seleksi tahun pertama menetapkan sekolah menjadi Calon Sekolah Adiwiyata. Dan pada tahun-tahun berikutnya secara berkesinambungan diadakan evaluasi terhadap sekolah yang telah terseleksi untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata.Apabila sekolah

yang selama 3 tahun berturut-turut dapat menunjukkan peningkatan terhadap kinerja indikator-indikator diatas, maka sekolah tersebutakan ditetapkan sebagai SekolahADIWIYATAMANDIRI.

Antusias sekolah untuk mengikuti program Adiwiyata dari berbagai daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk menjaga kesinambungannya, pada tahun ini, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Sampai dengan tahun 2009, ditetapkan sebanyak 40 Calon Sekolah Adiwiyata, 60 Sekolah Adiwiyata dan 10 Sekolah Adiwiyata Mandiri yang meliputi 29 provinsi. Semua hal tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 232 Tentang Penerima PenghargaanAdiwiyata atas rekomendasi Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata yang diketuai oleh Prof. DR. Arief Rachman, M. Pd.

Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Tahun 2010

a). Sekolah Adiwiyata Mandiri:

1. SDN CIPANENGAH CBM, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
2. SDK THERESIA, Kota Surabaya, Jawa Timur.
3. SD KANISIUS KALASAN, Kabupaten Sleman, DI.Yogyakarta.
4. SDN SUMBERS0N0, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
5. SD TUNJUNG SEKAR I, Kota Malang, Jawa Timur.
6. SDN 03 BALIKPAPAN, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
7. SDN PANGGANG 04, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
8. SDN KEMBANG MALANG, Kabupaten Kulonprogo DI.Yogyakarta.
9. SMPN 7, Kota Bandung, Jawa Barat.
10. SMPN 1 DLANGGU, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
11. SMPN 5, Kota Malang, Jawa Timur.
12. SMPN 1 SUK0D0N0, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
13. SMPN 2, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
14. SMPN 4 MEND0Y0, Kabupaten Jembrana, Bali.
15. SMPN 24, Kota Padang, Sumatera Barat.
16. SMPN 1 LURAGUNG, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
17. SMPN 4, Kota Denpasar, Bali.
18. SMAN 5, Kota Malang, Jawa Timur.
19. SMA SEMEN GRESIK, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
20. SMAN 2, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
21. SMAN 1 KUTASELATAN, Kabupaten Badung, Bali.
22. SMAN 5, Kota Denpasar, Bali.
23. SMAN 2 KRAKATAU STEEL, Kota Cilegon, Jawa Barat.
24. SMKN 1 L0SARANG, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
25. SMKN 3, Kota Sukabumi,

Jawa Barat.

b). Sekolah Adiwiyata:

1. SDN 005 BUKIT RAYA, Kota Pekanbaru, Riau.
2. SDN 36 P0NTIANAK K0TA, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
3. SDN 7 TIANYAR BARAT, Kabupaten Karangasem, Bali.
4. SDN 5 SINGAKERTA, Kabupaten Gianyar, Bali.
5. SDN 001 LIMAPULUH, Kota Pekanbaru, Riau.
6. SDN BANTARJATI 9, Kota Bogor, Jawa Barat.
7. SDN KANDANGAN III, Kota Surabaya, Jawa Timur
8. SDN 20 P0NTIANAK SELATAN, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
9. SDN DIN0Y0 II, Kota Malang, Jawa Timur.
10. SDN GEMARANG VI, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
11. SDN P 12 BENHIL, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
12. SDN 04 METR0 TIMUR, Kota Metro, Lampung.
13. SD ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
14. SMPN 2 KEB0MAS, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
15. SMPN 1 CIG0MB0NG, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
16. SMPN 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
17. SMPN 10, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
18. SMPN 1 MERAKURAK, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
19. SMPN 103 CIJANTUNG, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
20. SMP MUHAMMADIYAH 1, Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta.
21. SMPN 10 Kota Sukabumi, Jawa Barat.
22. SMPN 2 SUSUKAN LEBAK, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
23. SMPN 1 JAKENAN, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
24. SMAN 1 BANDAR, Kabupaten Beuneur Meriah, NAD.
25. SMAN 7 Kota Bekasi, Jawa Barat.
26. SMAN 1 WERINGINAN0M, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
27. SMAN 5 Kabupaten Jember, Jawa Timur.
28. SMAN 1 GEGER, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
29. SMAN 10, Kota Malang, Jawa Timur.
30. SMAN 7, Kota Manado, Sulawesi Utara.
31. SMAN 4, Kota Ternate, Maluku Utara.
32. SMAN 2 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI. Yogyakarta.
33. SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur.
34. SMKN 1 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
35. SMKN 1 Kota Gorontalo, Gorontalo.
36. SDN PETR0KIMIA, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
37. SD AL MUSLIM , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
38. SDN MANGUNHARJ0 VI, Kota Probolinggo, Jawa Timur
39. SDK SANTA MARIA, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
40. SDN N0G0PUR0 CATUR TUNGGAL, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

41. SD YPPSB 2 SANGATTA, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
42. SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN , Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
43. SDN 10, Kota Pangkalpinang , Bangka Belitung
44. SDN 4 PANJER, Kota Denpasar, Bali
45. SDN 007 KECAMATAN SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau
46. SDN 016 KECAMATAN SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau
47. SMPN 8, Kota Cirebon, Jawa Barat
48. SMP YPPSB , Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
49. SMPN 3, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
50. SMPN 4 MARTAPURA, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
51. SMPN 5 KEPANJEN, Kota Malang, Jawa Timur
52. SMPN 1 SUMBER ASIH, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
53. SMPN 1 LEMBAR, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
54. SMPN 2 DAYEUHK0L0T, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
55. SMPN 4, Kota Probolinggo, Jawa Timur
56. SMA Katolik Syuradikara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur
57. SMAN 8, Kota Pekanbaru, Riau
58. SMAN 2 SEKAYU, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
59. SMAN TEMPEH, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
60. SMAN 2, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
61. SMAN 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
62. SMAN 1, Kabupaten Pandeglang, Banten
63. SMAN 6, Kota Denpasar, Bali
64. SMKN 2, Kota Sukabumi, Jawa Barat
65. SMK WIKRAMA, Kabupaten Bogor , Jawa Barat
66. SMKN 1, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung
67. SMKN 6, Kabupaten Malang, Jawa Timur

c). Kategori Calon Sekolah Adiwiyata:

1. SDN Petemon XIII, Kota Surabaya, Jawa Timur
2. SDN 1 WANGUNHARJA, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
3. SDN 050765 GEBANG, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
4. SDN 05 KEC. SINTANG, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
5. SDN IBU DEWI 5, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
6. SD KAT0LIKTARAKANITABUMIJ0, KotaYogya, DI.Yogyakarta
7. SDK SANTA MARIA, Kota Surabaya, Jawa Timur
8. SDN PANDANWANGI 1, Kota Malang, Jawa Timur
9. SDN KANDANGAN I/121, Kota Surabaya, Jawa Timur

10. SDN SUKABUMI 6, Kota Probolinggo, Jawa Timur
11. SDN 13 BATU GADANG, Kota Padang, Sumatera Barat
12. SDN 10 SUNGAI SAPIH, Kota Padang, Sumatera Barat

13. SDN 13 IV K0T0 AUR M ALINTANG, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
14. SDN 1 SELUM BUNG, Kabupaten Karangasem, Bali
15. SM PN 2 PASAWAHAN, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
16. SM PN 1, Kota Palangkaraya , Kalimantan Tengah
17. SM PN 3AIRM ADIDI , Kabupaten M inahasa Utara, Sulawesi Utara
18. SM PN 1 M 0J0TENGAH, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
19. SM PN 4 , Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
20. SM PN 1 DIWEK, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
21. SM PN 7, Kota M adiun, Jawa Timur
22. UPTD SM PN 1 B0Y0LANGU, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
23. SM PN 2 TAM PAKSIRING, Kabupaten Gianyar, Bali
24. SM PN 1, Kota Tarakan, Kalimantan Timur
25. SM PN 54, Kota Palembang, Sumatera Selatan
26. SM PN 1 PANGKAJENE, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan
27. SM P YPJ KUALA KENCANA, Kabupaten M imika, Papua
28. SM AN 1 JETIS, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta
29. SM AN 4, Kota Probolinggo, Jawa Timur
30. SM AN 1 GRATI, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
31. SM AN 1, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
32. SM AN 1 M EJAYAN, Kabupaten M adiun, Jawa Timur
33. SM KN 1 PANJI, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
34. UPTD SM KN 2 B0Y0LANGU, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
35. SM AN 1 SUKAWATI, Kabupaten Gianyar, Bali
36. SM AN 1 TAM PAKSIRING, Kabupaten Gianyar, Bali 37. SM AN 1, Kota Pekanbaru, Riau

Penyelenggara
DEPUTI MEN TERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

REVITALISASI SISTEM AMDAL

(ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN)

AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Kewajiban menyusun dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diduga menimbulkan dampak penting bagi lingkungan diamanatkan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986. Seiring perkembangan waktu dan adanya otonomi daerah, wewenang penilaian AMDAL diserahkan kepada daerah dan menghapuskan komisi-komisi penilai AMDAL pada instansi sektor di Pusat. Peraturan di bidang AMDAL yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2009.

Sampai saat ini, arah penyempurnaan sistem AMDAL menuju pada semangat pemerintah yang *pro growt, pro poor dan pro job* dengan menjadikan AMDAL lebih efisien, efektif dan partisipatif. Dokumen AMDAL juga diharapkan lebih fokus, ringkas dan akurat.

Peningkatan mutu dokumen AMDAL di seluruh Indonesia (Pusat, provinsi, Kabupaten/Kota) sangat tergantung dari kompetesi dan integritas dari komisi penilai AMDAL dan penyusun dokumen AMDAL. Tantang otonomi daerah mendorong Kementerian Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan kapasitas daerah dan melakukan standarisasi sistem AMDAL. Peningatan kapasitas dilakukan dengan pembinaan, asistensi dan pendampingan bagi Komisi Penilai AMDAL Daerah, Lembaga Pelatihan AMDAL dan Konsultan Penyusun AMDAL. Upaya standarisasi dilakukan dengan menerapkan:

- **Lisensi bagi Komsi Penilai AMDAL Pusat, Provinsi dan kabupatenlKota**

  Hal ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup **Nomor 15 tahun 2010** tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL.

- **Sertifikasi Personil Penyusun AMDAL, registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (konsultan) AMDAL dan Lembaga Penyedia Jasa Pelatihan Penyusun (diklat) AMDAL.**

  Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup **Nomor 07 tahun 2010** tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL.

  Melalui program jangka pendek, menengah dan jangka panjang, upaya-upaya berikut ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dokumen AMDAL dan mendukung percepatan investasi, sekaligus sebagai alat pengendali dampak terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Langkah-langkah Pelaksanaan program Revitalisasi AMDAL:

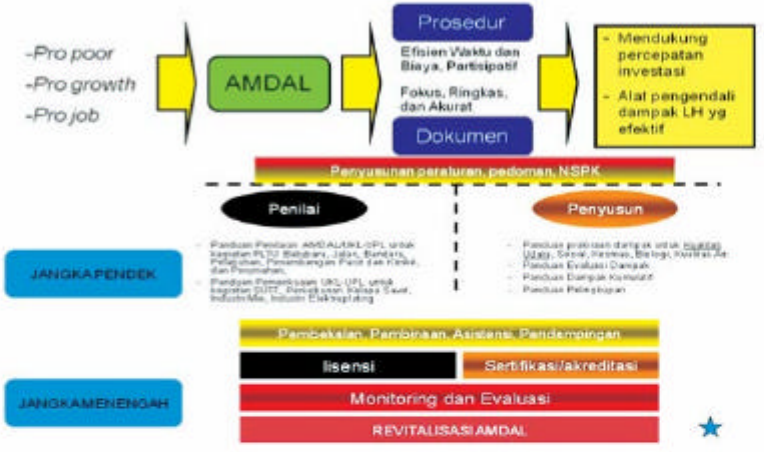

- **AMDAL dan Sanksi Hukum**

  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar hukum. Termasuk juga untuk Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota yang pengambilan keputusannya tidak didasari rekomendasi Komisi Penilai AMDAL. Mereka juga dapat dikenai sanksi jika mengeluarkan izin lingkungan untuk suatu rencana kegiatan yang belum memenuhi kewajiban penyusunan AMDAL/UKL-UPL. Sanksi dapat berupa penjara 3 tahun dan denda 3 milyar rupiah. Sebaliknya hukum juga memberikan perlidungan bagi yang sudah menjalanan kewajiban terkait AMDAL/UKL-UPL dan sudah berkinerja baik, jadi tidak perlu kawatir mengenai sanksi tersebut.

  UU 32 tahun 2009 juga memungkinkan dibatalkannya izin lingkungan yang antara lain dapat disebabkan oleh permohonan izinnya yang cacat hukum dan pencantuman persyaratan yang tidak sama dengan surat kelayakan lingkungan. Izin lingkungan juga dapat dibatalkan jika penanggunjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL. Jika izin lingkungan dibatalan maka izin usaha/izin kegiatan juga akan batal dengan sendirinya.

- **Peraturan-Peraturan lainnya yang telah diterbitkan untuk memenuhi amanat UU 32 tahun 2009, yaitu:**

  - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup **Nomor 13 tahun 2010** tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hdup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup **Nomor 14 tahun 2010** tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Penyelenggara:
DEPUTI MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG TATA LINGKUNGAN

MENUJU INDONESIA HIJAU

Indonesia Hijau meliputi: pen gendalian kerusakan hutan dan lahan, pengelolaan kuallitas dan kuantitas sumber daya air, pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengelolaan keanekaragaman hayati , pen gendalian sumber penyebab kerusakan atmosfer, dan konservasi energi dan pen ggunaan energi alternatif.

INDONESIA HIJAU merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup yang daiharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.ide dasar program ini adalah obsesi untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkiungan sehingga tercipta hubungan yang serasi, seimbang dan selaras antara manusia dengan lingkungannya sehingga mendukung proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Untuk merealisasikan program ini, berbagai upaya yang mengarah terwujudnya Indonesia Hijau dilakukan, di ataranya adalah: (i) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan keiembagaan daiam pengeioiaan iingkungan secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun di daerah, (ii) mengembangiuaskan penerapan pengeioiaan iingkungan meiaiui pengembangan iokasi dan bantuan teknis bagi penerapan program di daerah, bertumpu pada komitmen dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (iii) mendorong diterapkannya secara konsisten prinsip, metodoiogi dan prosedur pengeioiaan iingkungan secara terpadu dan ketataprajaan iingkungan yang baik *(good environmental government)* daiam pengeioiaan dan pemanfaatan sumber daya serta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekoiogis, ekonomis dan sosiai, dan (iv) mengembangkan dan mendorong peiaksanaan program aksi di tingkat nasionai dan daerah di bidang konservasi sumberdaya aiam dan pengendaiian kerusakan iingkungan.

Adapun cakupan program Indonesia Hijau meliputi: pengendalian kerusakan hutan dan lahan, pengelolaan kuallitas dan kuantitas sumber daya air, pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian sumber penyebab kerusakan atmosfer, dan konservasi energi dan penggunaan energi alternatif.

Di dalam pelaksanaan program, strategi yang diterapkan adalah: (i) pemantauan, disertai dengan upaya memfasilitasi dan memperkuat data dasar, (ii) pengawasan dan evaluasi melalui penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam konservasi sumber dan pengendalian kerusakan lingkungan, (iii) publikasi hasil kinerja pemerintah kabupaten/kota, (iv) pemberian insentifdan disinsentifsesuai dengan kinerjanya, (v) review dalam rangka penyelarasan kebijakan, dan (vi) mendorong peningkatan pendapatan alternatif masyarakat dikaitkan dengan konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Penyelenggara:
DEPUTI MEN TERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG PENINGKA TAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

BALAI KLIRING KE HATI

BALAI KLIRING KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pembangunan Ba!a! K!r!ng Keanekaragaman Hayat! d!arahkan pada pencapa!an Konvens! Keanekaragaman Hayat!

Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia berfungsi sebagai pintu masuk (portal) yang memfasilitasi akses serta pertukaran data dan informasi di antara pengguna dan penyedia keanekaragaman hayati di tingkat nasional, regional dan internasional. Sebagai portal, Balai Kliring dirancang untuk menjadi sarana interaktif dalam melayani kebutuhan informasi bagi para penggunanya dengan (i) menyediakan sumber-sumber informasi yang relevan dengan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati, (ii) merespon pertanyaanpertanyaan seputartopik yang relevan dalam implementasi konvernsi keanekaragaman hayati, dan (3) menjawab pertanyaan ilmiah dan teknis yang diajukan oleh para pengguna.

Pembangunan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati diarahkan pada pencapaian Konversi Keanekaragaman Hayati, yaitu (i) konservasi keanekaragaman hayati, (ii) pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponen keanekaragaman hayati, dan (iii) pembangian keuntungan yang adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik.

Hal tersebut dicapai berbagai melalui kegiatan dan program, di antaranya adalah: (i) mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama teknis dan ilmiah di antara pihak terkait, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, (ii) mengembangkan mekanisme global dalam integrasi dan pertukaran informasi mengenai keanekaragaman hayati, dan (iii) mengembangkan jejaring *(network)* antara *National Focal Point* dan mitra kerjanya.

Penyelengara:
DEPUTI MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG PENINGKA TAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sesuai dengan penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragam hayati di luar kawasan hutan. Taman Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi *in-situ* dan/atau *ex-situ* untuk penyelamatan Kehati lokal baik liar maupun yang dibudidayakan.

Program Pembangunan Taman berfungsi sebagai konservasi in situ dan eks situ guna menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan dan satwa lokal, baik yang liar maupun yang dibudidayakan terutama yang langka dan terancam punah. Selain fungsi utamanya sebagai kawasan penyelamatan tumbuhan lokal, Taman Keanekaragaman Hayati ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber bibit/pemuliaan, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan penyuluhan, serta wisata alam dan sebagai ruang terbuka hijau.Kami mengharapkan dengan adanya Program Taman Keanekaragaman

Hayati ini, maka akan bisa menjadi posisi tawar pada saat proses Akses dan Pembagian Keuntungan (*Acces and Benefit Sharing*/ABS) dari pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia. Saat ini mekanisme ABS ini sedang dibahas pada tingkat internasional.

Salah satu fungsi Taman Kehati yang juga sangat penting adalah sebagai sarana penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati, termasuk pengembangan bioteknologi. Dengan adanya penelitian dan pengembangan bioteknologi ini diharapkan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan melimpah sehingga pada akhirnya akan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati bervariasi menurut masing-masing daerah. Di samping itu, dalam batas tertentu, masing-masing daerah menunjukkan kekhasan, baik tumbuhan, tanaman maupun satwa dan hewannya. Secara alami komponen keanekaragaman makhluk hidup mempunyai keterbatasan persebaran, sehingga tiap daerah pun menunjukkan kekhasan dalam menampilkan keanekaragaman hayatinya.Tingginya tingkat keanekaragaman hayati suatu daerah memberikan peluang pemanfaatan yang lebih tinggi, karena semakin banyaknya pilihan dan cadangan (dalam bentuk barang dan jasa) yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar pula untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan bagian-bagiannya. Untuk mewujudkan manfaat keanekaragaman hayati secara nyata, penguasaan pengetahuan dan tersedianya dokumen mengenai keanekaragaman hayati merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, maka setiap daerah harus menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah. Profil Keanekaragaman Hayati Daerah merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang terdapat atau dimiliki oleh daerah. Keanekaragaman hayati ini mencakup tingkatan ekosistem, spesies, dan tingkatan di dalam spesies atau genetik, baik yang alami maupun yang telah dibudidayakan.

Profil keanekaragaman hayati mempunyai manfaat dan nilai penting bagi daerah sebagai:

a. Data dasar mengenai keanekaragaman hayati daerah.
b. Kekuatan tawar pada saat komponen keanekaragaman hayati akan diakses oleh pemohon.
c. Pendukung pengambilan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati
d. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.

PERLINDUNGAN LAPISAN OZON

Selama dekade terakir, terfadi peningkatan emisi bahan perusak ozon (BPO) ke atmos~ir, fika tidak ada upaya penanggulangan dikhawatirkan akan menghancurkan seluruh lapisan ozon yang menyelimuti permukaan bumi~

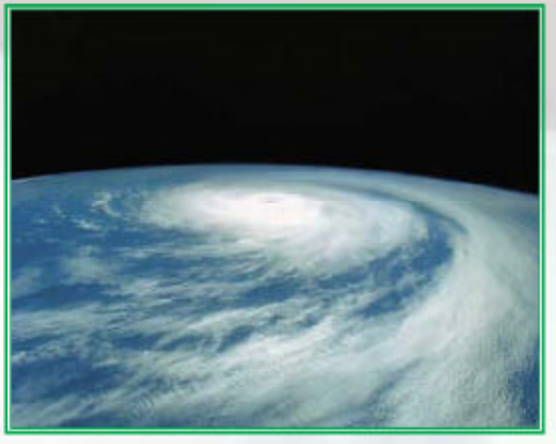

Fenomena terbentuknya luban ozon stratosfir di atas Antartika atau Kutub Selatan ditemukan padaawal 1930. Pentamatan intensif pada tahun-tahun beriktunya memastikan bahwa penurunan konsentrasi ozon di stratosfir dalam jumlah besar terjadi juga di atas Kutub Utara dan daerah tropis.

Selama dekade terahir, terjadi peningkatan emisi bahan perusak ozon (BPO) ke atmosfir, sehingga jika tidak ada upaya penanggulangan dikhawatirkan akan menghancurkan seluruh lapisan ozon yang menyelimuti permukaan bumi.

Penipisan lapisan ozon akan mengacam kesehatan manusia dan kehidupan di bumi karena penyerapan radiasi UV-B olah lapisan ozon menjadi berkurang. Akibatnya, intensitas radiasi yang mencapai permukaan bumi akan meningkat. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa setiap 10 persen penipisan lapisan ozon akan menyebabkan kenaikan radiasi UV-B sebesar 20 persen. Paparan radiasi yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman dan bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak dan mengurangi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Selain itu, peningkatan radiasi juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah dan berdapak pada penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, hujan asam dan peningkatan gangguan pernapasan.

PERLINDUNGAN LAPISAN OZON

Pengisian freon

Selama ini, bahan kimia perusak ozon digunakan secara intensif oleh manusia pada berbagai kegiatan rumah tangga dan industri. CFC dan HCFC digunakan sebagai bahan pengembang dalam pembuatan busa dan panel insulasi, alat pendingin dan bahan pendorong (*propelan)* dalam tabung *spray.* Selain itu, *carbon tetrachloride* dan *methyl chloroform* juga digunakan sebagai bahan pelarut dan pembersih. *Halon* merupakan bahan kimia yang efektif untuk memadamkan api. *Metilbromida* digunakan sebagai pestisida untuk membasmi hama dalam tanah, selain digunakan sebagai bahan *fumigasi* di pergudangan. Sampai saat ini barang yang diproduksi dengan menggunakan BPO masih banyak dijumpai di pasaran seperti kulkas, AC mobil, kasur busa, jok kursi, aksesori kendaraan, kosmetik berbentuk *spray,* dll.

Sebagai tanggapan terhadap kerusakan lapisan ozon di stratosfir, padatahun 1981 UNEP memulai proses negosiasi pengembangan langkah-langkah internasional untuk melindungi lapisan ozon melalui Konvensi Wina yang disahkan pada bulan Maret 1985.Pada bulan September 1987 ditindaklanjuti dengan pengesahan Protokol Montreal yang memuat aturan pengawasan produksi, konsumsi dan perdagangan bahan-bahan perusak ozon.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina, Protokol Montreal dan Amandemen London melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993. Selanjutnya pelaksanaan program perlindungan lapisan ozon di Indonesia difasilitasi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab pada upaya pelestarian lingkungan.

Penyelenggara
DEPUTI MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

PANTAI DAN LAUT LESTARI

Program Pan tai dan Laut Lestari adalah n ama atau label dari program kerja pen gen dalian pen cemaran dan kerusakan lin gkun gan wilayah pan tai dan laut...

Program Pantai dan Laut Lestari merupakan kegiatan aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan lautan.

Program Pantai dan Laut Lestari adalah nama atau label dari program kerja pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pantai dan laut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan I atau Perusakan Laut berskala nasional dan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Daerah Otonom. Program Pantai dan Laut Lestari terdiri atas tiga paket program kerja, yaitu: Pantai Wisata Bersih, Bandar lndah dan Teman (Terumbu Karang dan Mangrove) Lestari.
Pantai Wisata Bersih adalah program kerja pengendalian pencemaran, kerusakan dan kebersihan wilayah pantai dan laut yang merupakan tujuan wisata; Bandar lndah adalah program kerja pengendalian pencemaran di wilayah pelabuhan laut sedangkan Teman (Terumbu Karang dan Mangrove) Lestari adalah program kerja pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan terumbu karang dan mangrove.

Tujuan Program Pantai dan Laut Lestari adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi ekosistem pesisir dan laut, sehingga mutu perairannya dapat terjaga dengan baik dan tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Mengelola fungsi wilayah pelabuhan laut dan wilayah pantai wisata dengan mempertahankan kualitas dan kebersihannya.
3. Menurunkan beban pencemaran yang masuk ke wilayah pesisir.
4. Melestarikan hutan mangrove, terumbu karang dan menjaga tidak terjadinya abrasi pantai.

Penyelenggara:
DEP UT! METER! NEGARA L!NGK UNGAN H!D UP
B!DANG PEN!NGKA TAN KONSERVAS! S UMBER DAYA ALAM DAN PENGENDAL!AN
KER USA KAN L!NGK UNGAN

SUPERKASIH

•••mendorong percepatan penaatan industri pada peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air, dengan membuat surat pernyataan bahwa industri bersangkutan akan melakukan upaya penaatan dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan faktor teknis dan adminstrasi•

Selain untuk mengurangi beban pencemaran industri masuk ke lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas air sungai.

Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota melaksanakan program SUPERKASIH (Surat Perjanjian Kali Bersih).

Program ini bertujuan untuk mendorong percepatan penaatan industri pada peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air, dengan membuat surat pernyataan bahwa industri bersangkutan akan melakukan upaya penaatan dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan faktor teknis dan adminstrasi.

Dalam tahun 2005, telah dilakukan kegiatan SUPERKASIH di 7 provinsi guna melindungi 5 Daerah Liran Sungai (DAS) dan 2 daerah pesisir dan laut dengan jumlah industri mencapai 263 perusahaan. SUPERKASIH mencakup 7 provinsi di 7 DAS, yaitu: (i) Riau (DAS Sungai Siak)= 43 perusahaan, (ii) Kepulauan Riau/Batam (Tanjung Ucang)= 48 perusahaan, (iii) DKI Jakarta (Teluk Jakarta)= 25 perusahaan, (iv) Banten (Sungai Cisadane)= 25 perusahaan, (v) Jawa Barat (DAS Citarum)= 75 perusahaan, (vi) Jawa Tengah (DAS Serayu)= 22 perusahaan, dan Jawa Timur (Kali Tengah)= 25 perusahaan.

Penyelenggara:
DEPUTI MEN TERI N EGARA LIN GKUN GAN HID UP
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Pengelolaan ekosistem gambut merupakan program yang dilakukan dalam pengendalian kerusakan lingkungan pada lahan gambut.

Gambar: Salah satu contoh binatang (ikan, buaya, orang hutan) yang hidup di lahan gambut

Dari hutan alam gambut dihasilkan berbagai jenis pohon yang menghasilkan kayu komersial. Di samping itu juga dihasilkan berbagai hasil hutan non-kayu seperti getah, rotan, madu, buah-buahan hutan, tanaman hias, bahan baku obat-obatan tradisional, bulu binatang buruan, serta tumbuhan bawah sebagai sumber pakan satwa liar. Pada lahan gambut juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis primata seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus),* Lutung (*Prebytis cristata),* Lutung Merah (*Presbytis rubicunda)* dan Bekantan (*Nasalis larvatus).* Hewan mammalia lain seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae)* dan Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis)* dan Gajah Sumatera (*Elephas maxim us sumatrensis)* juga menghuni pada lahan/ hutan rawa gambut. Jenis jenis lain yang sudah terancam punah secara global seperti Mentok Rimba (*Cairina scutulata)* dan Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii)* memiliki populasi yang semakin mengecil dan terbatas.

Gambut diibaratkan sebagai spon, dapat mengandung lebih dari 90 % air dari satuan volumenya sehingga berperan sebagai penyimpan airyang mengamankan lingkungan dari bahaya banjirdan kekeringan.

Gambut memiliki kandungan unsur *Carbon* (C) yang sangat besar. kandungan karbon yang terdapat dalam gambut di dunia sebesar 329-525 Gt atau 35% dari total C dunia. Sedangkan gambut di Indonesia memiliki cadangan karbon sebesar46 GT(catatan 1 GT sama dengan 109 ton) atau 8-14% dari karbon yang terdapat dalam gambut di dunia. Apabila gambut tersebut terbakar atau mengalami kerusakan, materi ini akan mengeluarkan gas terutama CO_2, N_2O, dan CH_4 ke udara dan siap menjadi perubahan iklim dunia.

Secara ekonomi lahan gambutjuga berperan penting karena berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Hasil kayu dari lahan/hutan gambutjuga memberikan kontribusi yang signifikan

bahkan beberapa jenis diantaranya seperti ramin merupakan jenis dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hasil hutan non kayu seperti getah, rotan sayur-sayuran dan buah-buahan dan ikan terbukti berperan penting bagi kehidupan masayarakat lokal.
Untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan pembangunan pada ekosistem gambuttersebut perlu dilakukan:

Gambar: lahan gambut sebagai pengatur hidrologis
(suplai air dan pengendali banjir)

5. Program aksi pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Gambar: Buah naga, nanas dan kacang panjang sebagai hasil pertanian
di lahan gambut yang memiliki nilai ekonomi

Penyelenggara;
Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

PRO KASI H

Selama periode 2003-2005 masing-masing propinsi dan kabupaten/kota mengembangkan mekanisme pelaksanaan SUPERKA S/H sesuai dengan kemampuannya, sehingga hasilnya berbeda antara satu dengan yang lain.

Prokasih merupakan Program Nasional pengendalian pencemaran air yang mulai dilaksanakan pada tahun 1989. Kegiatannya di daerah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini diperbaharui pada tahun 2003 melalui penandatanganan Surat Pernyataan Program Kali Bersih (Superkasih). SUPERKASIH adalah pernyataan yang dibuat oleh industri, Disaksikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, yang isinya merupakan komitmen pengusaha untuk melakukan upaya penaatan dalam batas waktu tertentu.

Selama periode 2003-2005 masing-masing propinsi dan kabupaten/kota mengembangkan mekanisme pelaksanaan SUPERKASIH sesuai dengan kemampuannya, sehingga hasilnya berbeda satu dengan yang lain. Tahap kegiatan yang umum dilakukan dalam Prokasih adalah (i) Rapat koordinasi untuk penentuan peserta Prokasih; (ii) Sosialisasi kepada industri yang menjadi sasaran program; (iii) Pemantauan kinerja pengelolaan limbah cair sebagai *base line* program; (iv) Penandatanganan Superkasih; (v) Ekspose pelaksanaan; (vi) Pembinaan perbaikan pengelolaan limbah cair industri; dan (vii) Monitoring dan tindak lanjut kinerja pengelolaan limbah industri.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Prokasih yang telah disempurnakan, lingkup kegiatan diperluas sehingga mencakup: (i) Pertemuan koordinasi; (ii) Penetapan lingkungan perairan; (iii) Inventarisasi industri dan identifikasi air limbah untuk mengetahui beban pencemaran; (iv) Penetapan industri prioritas; (v) Penetapan ruas sungai prioritas; (vi) Penetapan titik pantau; (vii) Sosialisasi program kepada industri; (viii) Penandatanganan Surat Pernyataan; (ix) Pemantauan industri dan sungai; dan (x) Evaluasi dan pelaporan.

Selain memberikan arahan mekanisme pelaksanaan program yang lebih jelas dan baku, pendekatan Prokasih juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika selama periode tahun 2003-2005 indikator keberhasilan program didasarkan atas jumlah perusahaan-perusahaan yang telah memiliki unit pengolahan dan memenuhi baku mutu effluent, maka mulai tahun 2005 indikator keberhasilan program juga didasarkan atas outcome dari perbaikan unit pengolahan, yaitu penurunan beban pencemaran pada badan air penerima buangan air limbah.

Penyelenggara:
DEPUTI MEN TERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMA RAN LINGKUNGAN

PENAATAN HUKUM

...meliputi pengembangan peraturan perundang-undangan dan perfanfian internasional, penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan, penegakan hukum perdata dan sengketa di luar pengadilan, dan pen yelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.

Penaatan hukum di bidang lingkungan hidup oleh para pelaku kegiatan di bidang lingkungan hidup mutlak diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Menurut struktur ketatanegaraan di era otonomi daerah, koordinasi pengelolaan lingkungan termasuk penaatan hukum perada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara institusi di tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Bapedalda Provinsi, utamanya dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan di bidang penegakan hukum.

Berkenaan dengan itu, peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam kaitannya kerja sama tersebut adalah: (i) memberikan masukan substansi peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi konsultasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, (ii) mengoptimalkan fungsi PPLH dan PPNS, (iii) menjadi mitra daerah dalam penangan kasus, (iv) memantau gelar perkara, dan (v) memberikan masukan *(feeding)* atas pengaduan masyarakat.

Adapun instrumen-instrumen yang digunakan meliputi pengembangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan, penegakan hukum perdata dan sengketa di luar pengadilan, dan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.

Di bidang pengembangan peraturan perundang-undangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menyusun RUU Pengelolaan Sampah, Rancangan Revisi UU 23/1 997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan RPP Sumber Daya Genetik. Selain itu juga dilakukan kajian hukum pada berbagai perjanjian internasional, pengembanganjaringan hukum lingkungan dan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah di bidang lingkungan, penegakan hukum, advokasi litigasi kasus pidana linkgungan, pembinaan dan optimalisasi PPLH dan PPNS, dan pengembangan Sistem Penegakan Hukum Satu Atap di Daerah.

Berkaitan dengan penegakan hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dilakukan berbagai kegiatan seperti: penegakan hukum perdata, pengembangan jaringan "ahli-ornop-pengacara" dalam penangan gugatan lingkungan hidup, khususnya di Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.Selain itu juga dikembangkan tata cara gugatan perdata mengenai *Strict Liability and Polluters Pay Principle,* dan pengembangan kemampuan litigator perdata lingkungan di Banten, DKI Jakata, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan, dikembangkan sistem pengaduan, pembentukan Pos Pengaduan di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Pandeglang dan Bantul. Juga dilakukan asistensi pembentukan dan akreditasi sumber daya manusia penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa di Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah advokasi penyelesaian kasus sengketa di luar pengadilan di daerah, serta pemantauan dan penyelesaian sengketa atas perjanjian internasional.

http://puu-pi.menlh.go.id/

Penyelenggara:
DEPUTI MEN TERI N EGARA LIN GKUN GAN HID UP
BIDAN G PEN AATAN HUKUM

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Di bidang pengembangan peraturan perundang-undangan, saat ini sudah terbit 3 (tiga) undang-undang di bidang lingkungan hidup yaitu UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persistent Organics Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar 0rganik Yang Persisten), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyusun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan Sampah;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Sampah;
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PEnanganan Sampah Spesifik.
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Ekosisitem Gambut;
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
7. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administrasi;
8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Lingkungan.

PENEGAKAN HUKUM

REKAPITULASI PENANGANAN KASUS TAHUN 2010

No	Status Penanganan	Total
1	Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	15
2	Sanksi administrasi	25
3	Penanganan selesai karena penanggung jawab usaha telah melaksanakan perintah perbaikan yang diperintahkan	5
4	Penyidikan	12
5	Penyerahan berkas perkara ke pihak kejaksaan	2
6	Sidang	3
7	Putusan pengadilan	4
	Total	66

Daftar Kasus yang Telah Mendapat Putusan Pengadilan

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. Ragam Jaya Utama	Kota Cimahi, Jawa Barat
2	PT. Rosalia Texindo	Kab. Bogor, Jawa Barat
3	PT. Gede Karang	Kab. Purwakarta, Jawa Barat
4	PT. Almas Metal Indonesia	Kota Cimahi, Jawa Barat

W
ARGA MADANI

... prasyarat dipenuhi , yaitu: (i) sadar dan paham akan lingkungannya, (ii) mendapatkan informasi yang benar, (iii) termotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan ujmum, (iv) men getahui caranya, (v) tidak ada risikonya, dan (vi) mendapat respon yang cukup dari eksektif dan legislatif.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia di masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika dan kerataman persoalan sosial ekonomi dan politik yang bersifatkontradiktif sehingga perlu penangan dari pemerintah pusat, dan seluruh potensi masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung sekelompok kecil masyarakat kelompok menengah sehingga kurang mempunyai kekuatan politk dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu diarahkan agar: (i) kekuatan pelestari lingkungan perlu mendapt dukungan dari kekuatan politik primer, (ii) masyarakat luas perlu memiliki keberdayaan, kemampuan dan aktif berperan serta dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi, (iii) pemerintah, khsususnya di daerah perlu memiliki ketataprajaan di bidang lingkungan hidup *(good environmental governance)* agar mempu menjawab tantangan masyarakat yang telah diberdayakan, dan (iv) penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan penaatan, selain instrumen pengelolaan lainnya.

Potensi masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi. Di masa depan potensi ini perlu dikembangkannya keterlibatannya pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosialnya dalam memecahkan masalah-masalah di lingkungan.

Potensi masyarakat yang diartikan sebagai "masyarakat madani" ini akan terwujud apabila beberapa prasyarat dipenuhi, yaitu: (i) sadar dan paham akan lingkungannya, (ii) mendapatkan informasi yang benar, (iii) termotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, (iv) mengetahui caranya, (v) tidak ada risikonya, dan (vi) mendapat respon yang cukup dari eksektifdan legislatif.

Dengan terwujudnya kondisi yang "madani", diharapkan masyarakat mampu: (i) melakukan tuntutan *(demand)* secara aktif untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dengan indikator-indikator antara lain meningkatnya jumlah anggota dan masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan, meningkatnya keberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melalui pendekatan agama, adat dan budaya, (ii) melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya, yang dicirikan dengan adanya pola kemitraan yang berkembang, terlindunginya

hak-hak ulayat, pemanfaatan kearifan tradisional, perlindungan teknologi tradisional yang ramah lingungan, dan kepatuhan dunia usaha & masyarakat pada peraturan perundangan, termasuk tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam rangka menyikapi permasalah lingkungan hidup, maka pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sejak tahun 2005 adalah membangun 2 (dua) aliansi strategis, yaitu:(i) Aliansi Strategis Advokasi Komunikasi Lingkungan dan (ii) Aliansi Strategis Masyarakat Peduli Lingkungan melalui jalur organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi sosial keagamaan dan jalur non organisasi sebagai masyarakat peduli lingkungan.

Aliansi Strategis Advokasi Komuniasi dengan kostituen utama adalah komunitas media cetak dan elektronik, komunitas kesenian tradisional dan komunitas edukasi.

Di samping itu, secara rutin Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan updating secara harian berita dalam website http://www.menlh.go.id, penerbitan majalah bulanan SERASI dan secara mingguan menyebarkan newsletter Berita Lingkungan Hidup Terkini, melalui mailing-list dan dikirim melalui jalur pos kepada konstituen terpilih di daerah-daerah.

Aliansi Strategis Masyarakat Peduli Lingkungan mempunyai konstituen yang dibangun melalui jalur organisasi, seperti yang sudah dilakukan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan: Pimpinan Umum Nasional Karang Taruna, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB), dan dengan organisasi sosial keagamaan, seperti Muslimat Nahdlatul 'Ulama (NU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pengurus Besar Muhammadiyah dan akan diteruskan dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Wali Umat Budha Indonesia (WALUBI), Hindu Dharma, dll.

Di samping aliansi dengan organisasi kemasyarakatan, perwujudan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui proses demokrasi dimunculkan dalam gerakan Environmental Parliament Watch (EPW).

KementerianLingkungan Hidup memprakarsai dibentuknya Kaukus Lingkungan di lembaga legislatif DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang beranggotakan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lintas fraksi dan lintas komisi.Yang menyatukan adalah misi anggota dewan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup melalui fungsi dewan dalam legislasi (penyusunan/penetapan peraturan daerah), persetujuan pendanaan dan fungsi kontrol.

Kementerian Lingkungan Hidup di samping membangun aliansi strategis melalui jalur organisasi, juga melalui jalur non-organisasi dalam bentuk Kader Lingkungan Individu dan Kader Lingkungan Kelompok.

Penyelenggara
DEPUTI MEN TERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

EKOLABEL INDONESIA

...ekolabel dapat dimanfaatkan untuk mendorong konsumen agar memilih produk-produk yang memberikan dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan produk lain sejenis.

Menyikapi hasil konvensi tingkat tinggi dunia mengenai pembangunan berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development, WSSD),* Indonesia telah berkomitmen untuk mulai melakukan perubahan pola produksi dan konsumsi menjadi ramah lingkungan. Dalam rangka penerapan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan tersebut, saat ini KLH telah mengembangkan penerapan perangkat lingkungan proaktif seperti Sistem Manajemen Lingkungan, Produksi Bersih dan Ekolabel Indonesia.

Ekolabel Indonesia merupakan salah satu perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat proaktif sukarela dan diharapkan sebagai perangkat yang efektif untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, kepentingan masyarakat dan peningkatan efisiensi produksi serta daya saing. Selain itu ekolabel juga dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi pengendalian dampak negatif ke lingkungan sepanjang daur hidupnya serta mendorong *supply and demand* produk dan jasa ramah lingkungan.

Sebagai program yang berperan dalam kebijakan pola produksi dan konsumsi, ekolabel dapat dimanfaatkan untuk mendorong konsumen agar memilih produk-produk yang menimbulkan dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan produk lain yang sejenis.Penerapan ekolabel oleh para pelaku usaha dapat mendorong inovasi industry yang berwawasan lingkungan. Selain itu ekolabel dapat memberikan citra yang positif bagi *"brand"* produk maupun perusahaan yang memproduksi dan/atau mengedarkannya ke pasar, yang sekaligus menjadi inovasi bagi peningkatan daya saing pasar.

Program ekolabel yang sudah dikembangkan adalah ekolabel tipe I yang berdasarkan multi-kriteria dan sertifikasi oleh pihak ketiga yang kompeten dan berfokus pada produk manufaktur nasional. Berbagai infrastruktur telah dikembangkan untk pelaksanaan program tersebut meliputi logo dan skema ekolabel, criteria ekolabel dan metode pengujian, laboratorium penguji, lembaga sertifikasi ekolabel, perangkat akreditasi KAN serta berbagai pedoman dan panduan akreditasi dan sertifikasi.

Kriteria yang telah dikembangkan sebagai rujukan bagi penerapan sertifikasi ekolabel meliputi kriteria ekolabel untuk kategori produk serbuk deterjen pencuci sintetik untuk rumah tangga, tekstil dan produk tekstil, kulit jadi, sepatu kasual dari kulit, kertas cetak tanpa salut, kertas kemas, kertas tisu untuk kebersihan, kertas cetak salut, cat tembok, dan beterei kering.

Saat ini *19* merk produk sudah memperoleh sertifikat ekolabel Indonesia khususnya untuk kategori produk kertas cetak tanpa salut, produk tersebut telah beredar di pasaran dengan mencantumkan logo Ekolabel Indonesia. Ada 2 (dua) lembaga sertifikasi ekolabel (LSE) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Saat ini KLH juga sedang mengembangkan pelabelan lingkungan untuk klaim lingkungan swadeklarasi (ekolabel tipe II) dengan menggunakan logo yang ditetapkan oleh KLH. Penggunaan label atau logo ekolabel swadeklarasi yang ditetapkan oleh KLH bukan merupakan pilihan satu satunya, karena pada prinsipnya pelaku usaha dibebaskan untuk memilih label atau logo klaim lingkungan swadeklarasi yang akan digunakan pada produknya.

Berbagai infrastruktur sedang disiapkan oleh KLH yaitu mekanisme pelaksanaan verifikasi dan registrasi, PERMEN LH tentang penggunaan logo ekolabel swadeklarasi Indonesia.Sedangkan Infrastruktur yang telah tersedia adalah label atau logo ekolabel swadeklarasi Indonesia, SNI ISO 14021: 2009 Label lingkungan dan deklarasi - klaim lingkungan swadeklarasi (Pelabelan lingkungan tipe II) ISO 14021:1999, IDI dan pedoman klaim lingkungan swadeklarasi.

Adapun logo ekolabel swadeklarasi yang ditetapkan oleh KLH adalah sebagai berikut:

Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

(Aspek Lingkungan yang diklaim)

Penyelenggara:
DEPUTI MEN TERI NEGARA LINGKUNGAN HID UP
BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS DAN PENINGKA TAN KAPASITAS

DANA ALOKASI KHUSUS

ftut a~ft autft ft a ~ a~ftft~a fteEa 4 a a

EKOLABEL INDONESIA

DANAALOKASI KHUSUS LINGKUNGAN HIDUP

Salah satu hakekat DAK-LH adalah untuk menutupi celah fiskal

Salah satu hakekat Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk menutupi celah fiskal (fiscal gap) termasuk di bidang lingkungan hidup (LH). Melalui tersedianya DAK-LH diharapkan Pemda mulai bergerak dan menata kembali kualitas lingkungan hidup didaerah masing-masing dan berkoordinasi secara reguler dengan Pemda lainnya dan Pemerintah Pusat.

Pemanfaatan DAK-LH diarahkan untuk memperbaiki pengelolaan kualitas sungai dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.

DAK-LH dari tahun ke tahun, sejak 2006 selalu meningkat, dan peningkatan DAK-LH ini selalu diikuti dengan kenaikan jumlah daerah penerima.

Di samping alokasi DAK-LH Kabupaten/kota, Kementerian Negara Lingkungan Hidup memotivasi alokasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah/institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi dengan tujuan untuk pengembangan program dan monitoring pemanfaatan DAK-LH di daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan bahwa peningkatan kualitas lingkungan di daerah akan mudah terkontrol dan terwujud sebagaimana cita-cita yang diharapkan.

Penyelenggara:
SEKRETARIS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentunya haruslah didukung oleh informasi mengenai status lingkungan hidup itu sendiri. Semakin akurat informasi status lingkungan hidup ini, maka akan semakin sesuai kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan dan dikembangkan.

Penerbitan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2009 merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggambarkan kondisi lingkungan hidup Indonesia di tahun 2009, dampak aktivitas manusia yang menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam, serta berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan sebagai respon untuk mengurangi dampaktersebut. SLHI 2009 ini juga mencoba menampilkan kecenderungan sebab dan akibatterjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan penerbitan SLHI 2009 ini dapat berkontribusi memperkaya data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

TATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pembinaannya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Sampai dengan bulan Mei 2010 tercatat 22 provinsi, 140 kabupaten, dan 45 kota telah menyusun SLHD 2009 dan mengirimkannya ke KLH.

Evaluasi terhadap SLHD Provinsi dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional, sedangkan evaluasi terhadap SLHD Kabupaten/Kota di setiap provinsi dilakukan oleh BLH Provinsi. Tiga SLHD Provinsi terbaik hasil evaluasi setiap PPLH Regional dan tiga SLHD Kabupaten/Kota terbaik hasil evaluasi setiap BLH Provinsi kemudian dievaluasi secara nasional oleh Tim Evaluasi Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 102 Tahun 2010. Pelibatan peran BLH Provinsi dalam mengevaluasi SLHD Kabupaten/Kota di provinsinya dimaksudkan untuk meningkatkan peran masing-masing BLH Provinsi untuk mengkoordinasikan data dan informasi lingkungan di daerahnya dengan mempertimbangkan otonomi daerah.

Evaluasi terhadap SLHD Provinsi dan SLHD Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama oleh KLH dan BLH Provinsi yaitu lebih menekankan pada kelengkapan data dan analisis yang dilakukan terhadap data tersebut. Hasil evaluasi PPLH Regional dan BLH Provinsi adalah sebagai berikut:

A. Hasil evaluasi PPLH Regional terhadap SLHD Provinsi yang diusulkan untuk dievaluasi secara nasional:

1. PPLH Regional Sumatera:
   a. Provinsi Sumatera Barat;
   b. Provinsi Kepulauan Riau;
   c. ProvinsiAceh.
2. PPLH Regional Bali dan Nusa Tenggara hanya mengusulkan provinsi Bali karena hanya provinsi Bali yang menyusun SLHD Provinsi.
3. PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua:
   a. Provinsi Sulawesi Utara;
   b. Provinsi Sulawesi Tengah;
   c. Provinsi Maluku Utara.
4. PPLH Regional Jawa:
   a. Provinsi DKI Jakarta;
   b. Provinsi Dl Yogyakarta;
   c. Provinsi Jawa Timur.
5. PPLH Regional Kalimantan mengusulkan provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat karena hanya dua provinsi tersebut yang menyusun SLHD Provinsi.

B. Provinsi yang tidak menyampaikan SLHD Provinsi adalah:

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Jambi
3. Provinsi Riau
4. Provinsi Bangka Belitung
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Jawa Tengah
7. Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. Provinsi Kalimantan Selatan
10. Provinsi Kalimantan Tengah
11. Provinsi Sulawesi Selatan

C. Hasil evaluasi beberapa BLH Provinsi terhadap SLHD Kabupaten/Kota di provinsinya:

1. Provinsi Aceh: (a) Kabupaten Pidie, (b) Kabupaten Aceh Tamiang, dan (c) Kota Sabang.
2. Provinsi Sumatera Utara: (a) Kabupaten Labuhan Batu, (b) Kabupaten Serdang Bedagai; dan (c) Kabupaten Samosir.
3. Provinsi Sumatera Barat: (a) Kabupaten Pesisir Selatan, (b) Kota Padang, dan (c) Kota Pariaman.
4. Provinsi Riau: (a) Kabupaten Kampar, (b) Kabupaten Siak, dan (c) Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Provinsi Kepulauan Riau: (a) Kabupaten Bintan, (b) Kota Tanjung Pinang, dan (c) Kabupaten Natuna.
6. Provinsi Jambi: (a) Kabupaten Sarolangun, (b) Kabupaten Batang Hari, dan (c) Kota Jambi.
7. Provinsi Bengkulu: (a) Kabupaten Bengkulu Utara, (b) Kabupaten Kapahiang, dan (c) Kabupaten Kaur.
8. Provinsi Lampung: (a) Kabupaten Pesawaran, (b) Kabupaten Lampung Tengah, dan (c) Kabupaten Lampung Selatan.
9. Provinsi Jawa Barat: (a) Kabupaten Bandung, (b) Kota Depok, dan (c) Kota Cimahi.
10. Provinsi DI Yogyakarta: (a) Kabupaten Kulon Progo, (b) Kabupaten Gunung Kidul, dan (c) Kabupaten Bantul.
11. Provinsi Jawa Timur: (a) Kabupaten Probolinggo, (b) Kota Blitar, dan (c) Kota Probolinggo.
12. Provinsi Bali: (a) Kabupaten Buleleng, (b) Kabupaten Gianyar, dan (c) Kabupaten Karangasem.
13. Provinsi Nusa Tenggara Barat:(a) Kabupaten Lombok Barat, (b) Kabupaten Dompu, dan (c) Kpta Mataram.
14. Provinsi Nusa Tenggara Timur: (a) Kabupaten Alor, (b) Kabupaten Ende, dan (c) Kabupaten Ngada.
15. Provinsi Kalimantan Barat: (a) Kabupaten Kapuas Hulu, (b) Kabupaten Melawi, dan (c) Kota Pontianak.
16. Provinsi Kalimantan Timur: (a) Kota Balikpapan, (b) Kota Tarakan, dan (c) Kabupaten Kutai Timur.
17. Provisn Sulawesi Selatan: (a) Kabupaten Luwu Timur, (b) Kabupaten Enrekang, dan (c) Kabupaten Barru.
18. Provinsi Sulawesi Tenggara: (a) Kabupaten Kolaka, (b) Kabupaten Wakatobi, dan (c) Kota Kendari.
19. Provinsi Gorontalo: (a) Kabupaten Gorontalo, dan (b) Kota Gorontalo.

D. Provinsi yang tidak melakukan evaluasi terhadap SLHD Kabupaten/Kota di provinsinya adalah:

1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Provinsi Bangka Belitung
3. Provinsi Banten
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi Kalimantan Selatan

6. Provinsi Kalimantan Tengah
7. Provinsi Sulawesi Tengah
8. Provinsi Sulawesi Utara
9. Provinsi Sulawesi Barat
10. Provinsi Maluku
11. Provinsi Maluku Utara
12. Provinsi Papua
13. Provinsi Papua Barat.

Tim Evaluasi Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah kemudian mengevaluasi secara nasional seluruh SLHD Provinsi dan SLHD Kabupaten/Kota terbaik yang diusulkan oleh PPLH Regional dan BLH Provinsi. Dari hasil evaluasi tersebut ditentukan 6 (enam) SLHD Provinsi terbaik dan 6 (enam) SLHD Kabupaten/Kota terbaik secara nasional. Peringkat pertama sampai dengan peringkat ketiga akan mendapatkan trophi sedangkan peringkat keempat sampai dengan peringkat keenam akan mendapatkan sertifikat penghargaan.

Padatahun 2010, penerima penghargaan SLHDterbaiktersebutadalah:

A. SLHD Provinsi Terbaik
   1. Penerima Trophi
      a. Terbaik Pertama: Provinsi Bali
      b. Terbaik Kedua: Provinsi Sumatera Barat c. Terbaik Ketiga: Provinsi Dl Yogyakarta
   2. Penerima Sertifikat Penghargaan
      a. Provinsi Kepulauan Riau
      b. Provinsi Aceh
      c. Provinsi Sulawesi Utara

B. SLHD Kabupaten/Kota Terbaik
   1. Penerima Trophi
      a. Terbaik Pertama: Kabupaten Pesisir Selatan
      b. Terbaik Kedua: Kota Balikpapan
      c. Terbaik Ketiga: Kabupaten Gianyar
   2. Penerima Sertifikat Penghargaan
      a. KotaPadang
      b. Kabupaten Luwu Timur
      c. KotaTarakan

IND

EKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

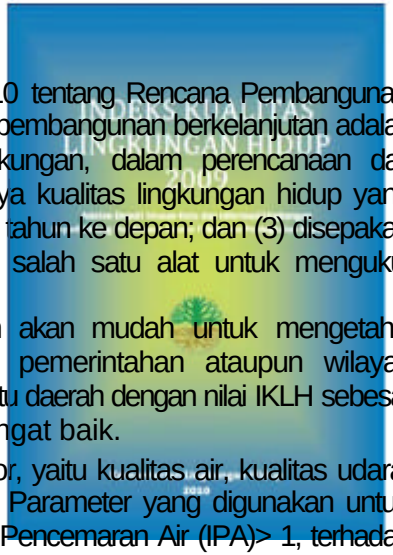

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014, sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan adalah (1) teradopsinya secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektordan daerah; (2) terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan; dan (3) disepakati, disusun, dan digunakannya indeks kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berdasarkan pada suatu "indeks", para pemangku kepentingan akan mudah untuk mengetahui sejauhmana kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah administrasi pemerintahan ataupun wilayah ekosistem. IKLH dinyatakan dalam angka antara 0 sampai dengan 100. Suatu daerah dengan nilai IKLH sebesar 100 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut sangat baik.

Sebagai tahap awal, KLH menghitung IKLH berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.Masing-masing indikatorterdiri dari 1 (satu) parameter. Parameter yang digunakan untuk indikator kualitas air adalah proporsi jumlah sampel air dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)> 1, terhadap total jumlah sampel. Untuk kualitas udara digunakan indeks standar pencemaran udara (ISPU) sebagai indikator, sedangkan untuk tutupan lahan adalah proporsi luas hutan primer dan sekunder terhadap luas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, IKLH tingkat nasional untuk tahun 2006-2009 adalah sebesar 59,79.
Untuk tingkat kepulauan, nilai IKLH adalah sebagai berikut:

1. Maluku dan Papua, nilai 79,56
2. Sulawesi, nilai 75,40
3. Bali dan Nusa Tenggara, nilai 68,53
4. Sumatera, nilai 63,76
5. Kalimantan, nilai 60,31
6. Jawa, nilai 54,41

TATUS LINGKUNGAN HIDUP DAS CILIWUNG BAGIAN HULU

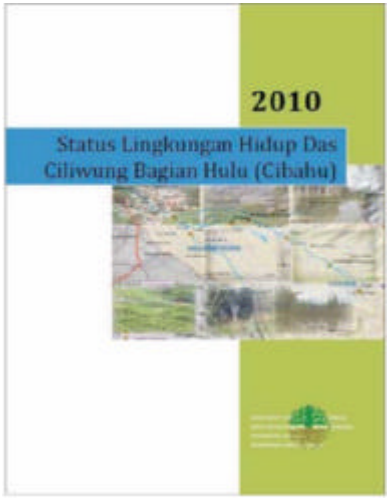

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung merupakan u*rban watershed* yang perlu dikelola secara khusus, terlebih dengan adanya tiga isu permasalahan utama di daerah tersebut, yaitu inkonsistensi pemanfaatan ruang, sampah dan pencemaran air sungai. Sampai saat ini pengelolaan DAS Ciliwung masih bersifat parsial, sekalipun telah diupayakan berbagai program terpadu seperti Program Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Sekitar 37% dari luas areal DAS Ciliwung (± 41.437 hektar), merupakan wilayah Sub DAS Ciliwung Bagian Hulu (Cibahu). Dalam luasan Sub DAS Cibahu inilah, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya memberikan gambaran mengenai Status Lingkungan Hidup DAS (SLHD) Cibahu pada tahun 2010.

Sebagaimana diutarakan di atas, tiga isu permasalahan utama pada DAS Ciliwung adalah inkonsistensi pemanfaatan ruang, sampah dan pencemaran air sungai. SLHD Cibahu membahas sejauhmana dampak akibat aktivitas manusia, terutama aktivitas pengembangan kawasan pariwisata, memberi tekanan terhadap sumberdaya alam yang mengakibatkan munculnya tiga isu permasalahan utama pada kawasan tersebut.

Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan sebagai respon untuk mengurangi dampak aktivitas manusia di DAS Cibahu juga dibahas dalam SLHD Cibahu ini. Salah satunya adalah upaya pengurangan limbah kotoran sapi sebesar 1.321 ton/tahun melalui instalasi biogas di peternakan sapi. Penataan ruang di kawasan tersebutjuga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka mengurangi inkonsistensi pemanfaatan ruang.

Penyelenggara:
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS DAN PENINGKA TAN KAPASITAS

INSENTIF DAN PENDANAAN LINGKUNGAN

Dalam konteks kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup, maka sangat penting untuk penerapan berbagai instrumen, termasuk instrumen ekonomi. Salah satu bentuk penerapan instrumen ekonomi adalah melalui program insentifdan pendanaan lingkungan.

Sejak pertengahan I 990an, KLH telah mengembangkan program insentif dan pendanaan lingkungan yang ditujukan untuk menyediakan dukungan (insentif) dalam bentuk moneter, baik fiskal maupun finansial. Dukungan insentif ini diharapkan dapat merubah pola pikir dan sikap para pemangku kepentingan agar menjadi lebih ramah lingkungan. Beberapa program insentifdan pendanaan lingkungan yang telah dikembangkan, antara lain: I) insentif fiscal, berupa pengurangan atau penghapusan bea masuk (impor) peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, dan 2) insentif financial, berupa fasilitas pembiayaan investasi lingkungan melalui skema pinjaman lunak lingkungan. Upaya pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi tersebut diselenggarakan melalui kerjasama dengan berbagai institusi dan pemangku kepentingan.

Pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi tersebut juga dibarengi dengan pengembangan perhitungan nilai ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan (*economic valuation and accounting of natural resources and environment).*

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PERENCANAAN TATA RUANG

KLHS merupakan instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* sebagai instrument pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terasa semakin diperlukan. Hal ini disebabkan karena degradasi lingkungan hidup yang terjadi umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor serta terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan berawal dari proses pengambilan keputusan. Sebagai suatu instrument pengelolaan lingkungan hidup, KLHS diimplementasikan pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam difokuskan pada perencanaan tata ruang.

Relung aplikasi KLHS berbeda dengan AMDAL. Bila AMDAL diaplikasikan di tingkat proyek, maka KLHS diaplikasikan pada rangkaian kebijakan, rencana dan program.

Tujuan KLHS:

1. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP),
2. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP,
3. Membantu mengarahkan, memfokuskan, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan

Adapun manfaat yang didapat dari KLHS adalah:

1.Merupakan instrument proaktifdan sarana pendukung pengambil keputusan,

2.Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru atas opsi-opsi pembangunan,

3. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
4. Mencegah kesalahan investasi akan adanya potensi pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan,
5. Tata pengaturan (*governance)* yang lebih baik dengan terbangunnya partisipasi para pihak *(stakeholders)* dalam proses pengambilan keputusan
6. Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan,

7. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumber daya alam, dan menangani masalah kumulatifdampak lingkungan.

STANDARDISASI LINGKUNGAN

Penerapan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan *(sustainable production and consumption)* pada urusan pemenuhan kebutuhan hidup dan kegiatan sehari-hari semua pelaku pembangunan merupakan wujud yang lebih nyata dari konsep Pembangunan Berkelanjutan *(sustainable development).* Penerapan konsumsi dan produksi berkelanjutan dapat mensinergikan perolehan manfaat pada berbagai aspek, antara lain keamanan energi, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya, konservasi pemanfaatan sumberdaya alam, perbaikan kualitas lingkungan hidup lokal, peningkatan peluang usaha.

Dalam penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dalam rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang terpadu dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai dengan produk akhir yang digunakan.Standardisasi Lingkungan menawarkan pendekatan atau perangkat yang dapat menunjang pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, yaitu dengan mengembangkan perangkat pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan dari hulu sampai ke hilir. Selain itu, perangkat tersebut dapat digunakan oleh sektor swasta (organisasi, industri, asosiasi dan lain-lain) dan juga sektor publik.

Program perangkat pendukung Standardisasi Lingkungan dalam rangka penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan adalah sbb.: Produksi Bersih dan Teknologi berwawasan lingkungan, Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan, Pengujian Parameter Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Ekolabel. Dasar substansi program tersebut berkenaan dengan praktek pencegahan pencemaran, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup dengan perbaikan secara berkelanjutan, dan pengembangan produk yang ramah lingkungan. Cakupan substansi tersebut relatif luas namun kesemuanya berkaitan dan merupakan komponen penting bagi pencapaian sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

Secara umum tujuan pengembangan Standardisasi Lingkungan yaitu:

- peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam,
- penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup secara efisien, dan
- peningkatan daya saing usaha dan/atau produk.

Fokus utama dalam pengembangan Standardisasi Lingkungan adalah penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, sasaran efisiensi juga perlu menjadi bagian penting dari upaya pengelolaan lingkungan, mengingat bahwa banyak isu efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam yang belum diatur dalam perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Sasaran akhirnya yang lebih komprehensifadalah peningkatan daya saing usaha dan/atau produk.

INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP

Dalam konteks kebijakan dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai instrumen, termasuk instrumen ekonomi lingkungan hidup. Sebagaimana dicantumkan dalam UU 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 42 dan 43, instrumen ekonomi lingkungan hidup diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yakni: instrumen perencanaan pembangunan, instrumen pendanaan lingkungan, dan instrumen insentifdan/atau disinsentif.

Pengembangan instrumen ekonomi sebagaimana dimaksud di atas telah dirintis oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama sektor terkait dan berkepentingan sejak pertengahan 1990 an. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan dukungan (insentif) dalam bentuk moneter, baik fiskal, financial, maupun non finansial. Dukungan insentif ini dharapkan tidak hanya mampu mendorong penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih efisien, tetapi juga akan mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang telah dikembangkan dalam konteks insentifdan/atau disinsentif, antara lain: 1) insentiffiskal, seperti penerapan pajak, retribusi, pengurangan atau pengapusan bea masuk (impor) peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, pemberian fasiltas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan, mekanisme pajak penghasilan ditanggung pemerintah dan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik, dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan eksplorasi panas bumi; 2) insentiffinansial, berupa fasilitasi pembiayaan investasi lingkungan melalui empat skema pinjaman lunak lingkungan, pengembangan asuransi lingkungan hidup, dan pembayaran jasa lingkungan; serta 3) insentif non finansial, berupa pengembangan sistem label ramah lingkungan, dan sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

Pengembangan dan penerapan insentifdan/atau disisentiftersebutdiikuti pula oleh pengembangan panduan valuasi ekonomi lingkungan untuk mendukung perhitungan nilai ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan di berbagai tipe ekosistem (*natural resources and environmental accounting).* Sampai saat ini telah dikembangkan 8 (delapan) panduan valuasi ekonomi sebagai berikut:

- Panduan Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan
- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang
- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Padang Lamun

- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Lahan Bahan
- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove
- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut
- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Karst

Dalam rangka menginternalisasikan nilai deplisi sumber daya alam dan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi, maka telah dikembangkan perhitungan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) Hijau. Sampai saat ini telah diterbitkan Pedoman Perhitungan PDRB Hijau yang dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk menghitung PDRB Hijau.

KESEPAKATAN BALI

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

Dengan dilandasi komitmen untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan dan dalam mengantisipasi perubahan iklim global, kami sepakat untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya melalui :

1. **Pengelolaan Ekosistem Danau,** dengan melakukan upaya pengendalian pencemaran air, konservasi keanekaragaman hayati, pengaturan dan pengawasan kegiatan budidaya pada perairan, pengaturan dan penertiban tata guna lahan, pengaturan perijinan sertifikasi lahan bangunan, pengendalian tata ruang Daerah Tangkapan Air (DTA) dan pengendalian erosi.

2. **Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau** untuk berbagai pemenuhan kebutuhan air hanya dapat diizinkan setelah melakukan kajian mendalam berdasarkan azas-azas ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi serta antisipasi terhadap dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.

3. **Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Informasi Danau,** dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya informasi peringatan dini kerusakan ekosistem danau dan potensi risiko bencana.

4. **Penyiapan Langkah-Langkah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Danau,** berdasarkan penerapan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim global terhadap keberlanjutan fungsi danau sebagai sumber air tawar, keanekaragaman hayati danau dan jasa lingkungan lainnya.

5. **Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan dan Koordinasi** dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas berbagai program/ kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem danau

6. **Peningkatan Peran Masyarakat,** melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar danau untuk menjaga kelestariannya.

7. **Pendanaan Berkelanjutan,** dengan penyediaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, investasi swasta dan bantuan luar negeri serta swadaya masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan danau secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kesepakatan bersama ini, kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak melalui sinkronisasi dan sinergisitas Program/Kegiatan Pengelolaan Danau Berkelanjutan (terlampir) pada danau prioritas dan menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disepakati di Bali, 13 Agustus 2009

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Rachmat Witoelar

Menteri Dalam Negeri

Mardiyanto

Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto

Menteri Pertanian

Anton Apriyantono

Menteri Kehutanan

M. S. Kaban

Menteri Kelautan dan Perikanan

Freddy Numberi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Jero Wacik

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Kusmayanto Kadiman

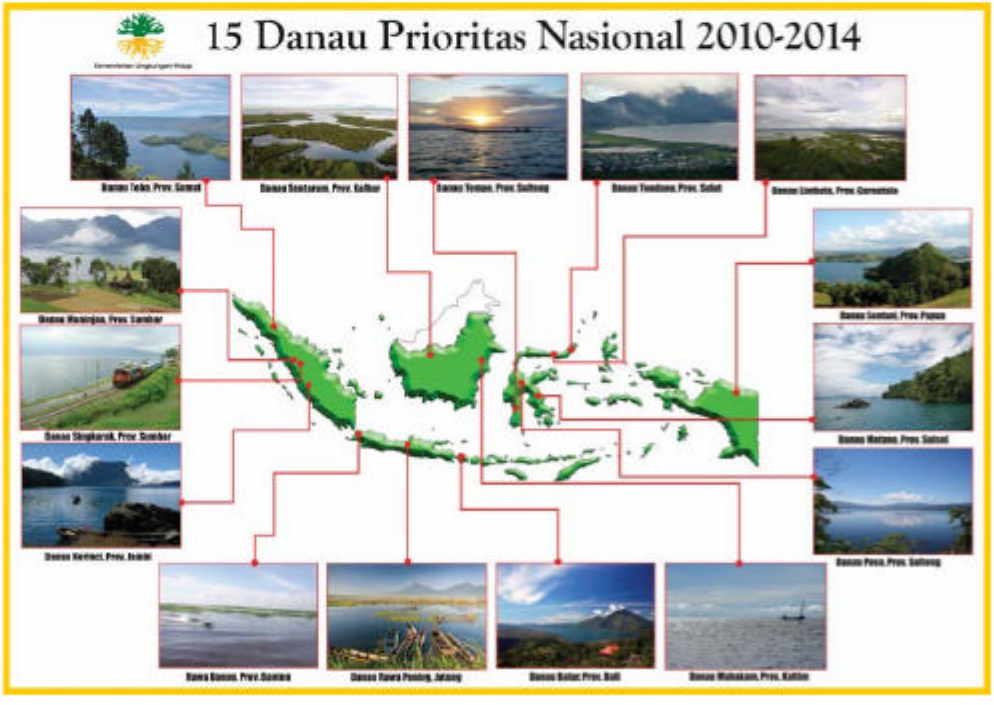

GerakanAksiUntukLingkungan
kampanye nasional untuk hidup ramah lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup

apa sih "g.a.u.l." itu ?

- g.a.u.l yang satu ini adalah gerakan aksi untuk lingkungan yang akan menjaga bumi dan kita tetap eksis, dengan menjadikan ramah lingkungan sebagai gaya hidup
- "gaul" adalah sebuah kata yang populer di kalangan usia muda yang selau mengikuti tren yang ada.
- *Dengan target sasaran usia muda diharapkan judul kampanye ini dapat langsung diterima.*
- "gaul" merupakan kampanye nasional tentang hidup ramah lingkungan yang diselengga-rakan oleh **Kementerian Lingkungan Hidup** (KLH)

kenapa mesti "gaul" ?

- Perlu peningkatan tahapan kesadaran masyarakat dari sekedar tahu menjadi berbuat/aksi
- Perlunya sebuah kampanye nasional yang berkesinambungan untuk tetap mengajak, mengingatkan dan memberikan solusi hidup ramah lingkungan
- Pendekatan melalui kampanye yang populer sesuai target sasaran dan mengedepankan *tips dan solusi praktis*

siapa yang diajak ber-gaul ?

- target sasaran utama adalah orang muda dengan rentang usia 15 - 35 tahun (populasi ± 85 juta orang – sumber data BPS 2009)
- pendekatan dilakukan antara lain melalui kegiatan berbasis komunitas (hobby, olahraga, kuliner, dsb), melalui public figure yang sudah menjalani hidup ramah lingkungan, dan lainnya

Logo GAUL

GerakanAksiUntukLingkungan

PEMANTAUAN DAN ANALISA MEDIA UNTUK ISU LINGKUNGAN HIDUP

Pemantauan dan analisa media untuk isu lingkungan hidup (Media Monitoring) dilakukan pada periode 20 Februari -29 Mei 2010.Media monitoring dilakukan terhadap pemberitaan pada 11 media cetak (Koran) yang berbasis di Jakarta yang distribusinya cukup banyak dan tersebar di daerah: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Indo Pos, Republika, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Jakarta Globe, dan Rakyat Merdeka.

Metode audit menggunakan analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif adalah metode yang dapat dipakai untuk melihat kecenderungan pemberitaan dan informasi media. Analisis media dapat digunakan untuk mengantisipasi isu yang aktual dan juga opini media, serta mengevaluasi efektifitas kegiatan komunikasi yang telah dilakukan. Hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi. Beberapa aspek yang terpantau adalah jumlah berita masing-masing media, identifikasi isu lingkungan hidup, sebaran berita/informasi isu lingkungan hidup secara spasial dan kecenderungan peningkatan pemberitaan/ informasi setiap tahunnya yang mana hal tersebut dapat mengindikasikan komitmen media terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Grafik Perkembangan Berita/Informasi

Pemberitaan dan penyebaran isu lingkungan hidup meningkat sekitar 6% dari Tahun 2009 ke Tahun 2010 dengan berbasis *'year on year'* untuk periode 28 Maret - 29 mei. Data selama 9 minggu tersebut digunakan karena masalah ketersediaan data pada kurun waktu yang sama untuk dua tahun berturut-turut, yaitu 2009 dan 2010.

Berdasarkan data periode 20 Februari hingga 29 Mei 2010 (100 hari) isu lingkungan masih lebih diperhatikan dengan porsi yang besar oleh tiga media cetak nasional, yaitu Kompas, The Jakarta Post dan Media Indonesia.

Berdasarkan data periode 20 Februari hingga 29 Mei 2010(100 hari) isu lingkungan masih lebih diperhatikan dengan porsi yang besar oleh tiga media cetak nasional, yaitu Kompas, The Jakarta Post dan Media Indonesia.

Tabel Pemantauan 20 Februari - 29 Mei 2010

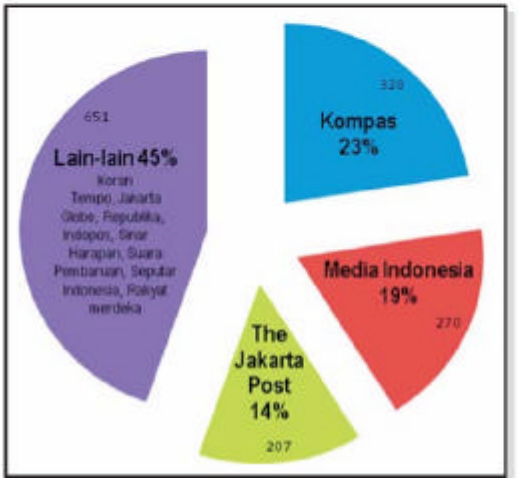

Grafik Perbandingan Media Cetak Nasional

Berdasarkan pemantauan didapat hasil lainnya, yaitu mengenai isu yang beredar di media massa. Pemuatan berita/informasi di media massa mengindikasikan tingkat perhatian public terhadap isu tertentu. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel Pemantauan Isu Lingkungan

No.	Nama Media	Persentase	Total
1	**Kompas**	**23%**	**328**
2	**Media Indonesia**	**19%**	**270**
3	**The Jakarta Post**	**14%**	**207**
4	Koran Tempo	9%	**129**
5	Jakarta Globe	7%	**95**
6	Republika	6%	**90**
7	IndoPos	6%	**84**
8	Sinar Harapan	5%	**80**
9	Suara Pembaruan	5%	**78**
10	Seputar Indonesia	4%	**62**
11	RakyatMerdeka	2%	**33**
	Total		**1456**

No	Isu Lingkungan	Presentase	Jumlah
1	**Kampanye Lingkungan**	**23%**	**1,508**
2	**Hutan dan Lahan**	**11%**	**789**
3	**Bencana Lingkungan**	**11%**	**712**
4	Konservasi Keanekaragaman Hayati	8%	527
5	Sampah	7%	450
6	Penegakan Hukum Lingkungan	7%	435
7	Perubahan Iklim dan Pemanasan Global	6%	382
8	Tata Ruang	4%	242
9	Standar Lingkungan	3%	219
10	Pendidikan Lingkungan	3%	176

Kampanye lingkungan hidup seperti menanam pohon, bersepeda, biopori, dan lain sebagainya telah semakin 'mewabah' di Indonesia. Berita dan informasi mengenai kampanye untuk berperilaku ramah lingkungan sudah cukup mendominasi masyarakat secara luas. Adapun isu lingkungan yang bersifat sangat teknis, yaitu Pencemaran Air, Limbah B3 dan B3, Pencemaran Udara, Laut dan pesisir sertaAMDAL masih relatif rendah untuk menjadi perhatian media massa, yaitu sekitar 1%.

Hal terakhir yang didapatdari pemantauan media adalah lokus terjadinya pemberitaan/ informasi. Data yang didapat sudah dapat diduga namun tetap memberikan catatan penting bahwa terjadi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, dimana berita/informasi di jawa mendominasi sebesar 63%.

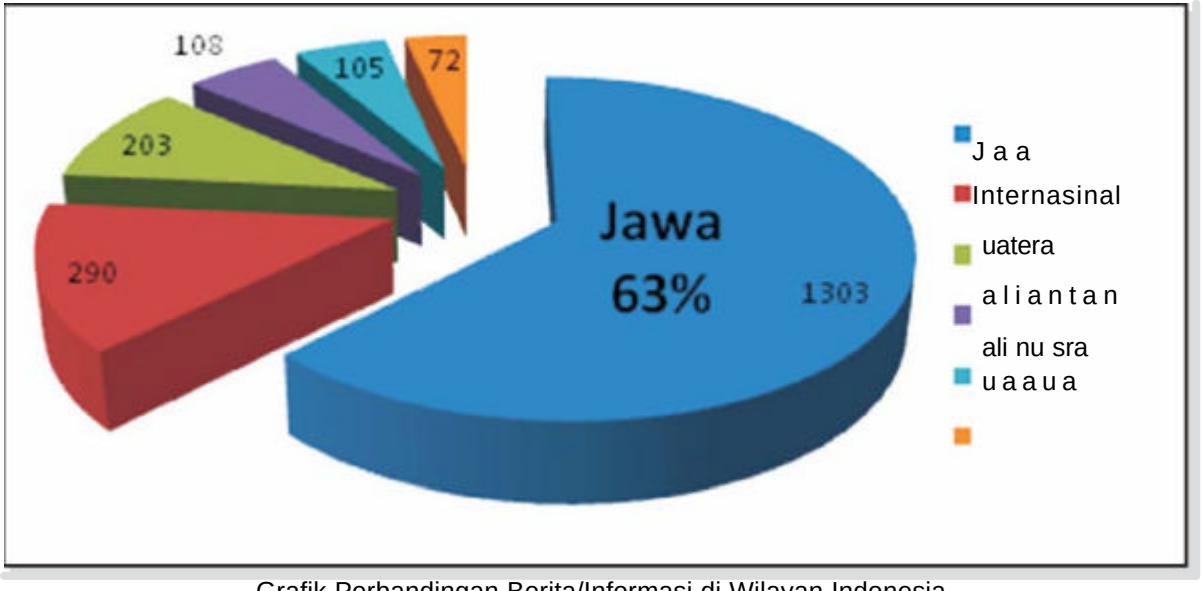

Grafik Perbandingan Berita/Informasi di Wilayan Indonesia

Berita dan informasi di Jawa yang sebanyak 1303 atau 63% didominasi provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 660 berita/informasi (32%) yang dalam hal ini sebagian besar merupakan skala nasional. Berturut-turut diikuti Jawa barat (348 berita/informasi) dan Jawa Timur (100 berita/informasi). Selain daripada itu berita/ informasi lingkungan lingkup internasional cukup mendapatkantempat, yaitu sebesar 290 atau sekitar 14%.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sangat minimnya berita ataupun informasi yang berasal Kawasan Indonesia Timur, dimana Provinsi Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Dalam kurun waktu 100 hari (20 Februari —29 mei 2010) hanya terdapat kurang dari 5 berita/informasi.

ANUGERAH MEDIA MASSA 2010

Kunci penyelesaian permasalahan lingkungan hidup adalah *'masyarakat sadar, peduli dan bergerak'* dengan menjunjung lingkungan hidup pada posisi strategis dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan informasi yang benar dan terus menerus yang dikomunikasikan dengan tepat.Komunikasi yang tepat adalah komunikasi yang dapat mendorong masyarakat/ pemangku kepentingan untuk bergerak "membela kepentingan lingkungan hidup".

Peran media massa sebagai media komunikasi massa memiliki posisi penting dalam upaya diseminasi informasi kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Peran dan posisi pers tersebut sangat penting karena kebutuhan masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup semakin meningkat, sementara itu permasalahan lingkungan semakin hari semakin kompleks.

Anugerah Kementerian Lingkungan Hidup untuk Media Massa, diharapkan dapat mendorong meningkatnya kemitraan antara KLH dan media massa untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran pers dapat dilihat dari dua unsur, yaitu pers sebagai perusahaan atau organisasi dan peran wartawan itu sendiri. Perusahaan atau organisasi pers dapat dilihat dari berbagai sisi untuk mengetahui komitmennya terhadap lingkungan, salah satunya yang paling signifikan adalah dengan menempatkan sebanyak-banyaknya ruang bagi pemberitaan dan informasi lingkungan. Oleh karenannya

PEMANTAUAN MEDIA

Anugerah Kementerian Lingkungan Hidup untuk Media Massa diberikan dengan didasari pada jumlah pemberitaan/informasil lingkungan dari suatu Media Massa. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari kaum jurnalis atau wartawan sebagai individual profesi. Kegigihan dan dedikasi wartawan dalam menulis berita lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari dimuatnya tulisan dalam media massa tempatnya bekerja.

Melalui Monitoring pemberitaan/informasi isu lingkungan hidup dilakukan pada periode 20 Februari -26 Mei 2010 yang dilakukan terhadap 11 media cetak: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Indo Pos, Republika, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Jakarta Globe dan Rakyat Merdeka, dengan menggunakan metode audit analisis isi kuantitatif, maka **Anugerah Media Massa Kementerian Lingkungan Hidup 20010 diberikan kepada KOMPAS untuk kategori Media/Surat Kabar Peduli Lingkungan.**

Sedangkan untuk Wartawan diberikan Plakat Kementerian Lingkungan Hidup untuk Jurnalis, berturut-turut diberikan kepada sbb.:

1. Adianto P. Simamora, wartawan The Jakarta Post
2. Aryo Wisanggeni G., wartawan Kompas
3. Fidelis E Satriastanti, wartawan Jakarta Globe

Anugerah dan Plakat ini adalah bentuk apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen media massa untuk menyambung informasi lingkungan hidup bagi masyarakat luas.Peran Pers tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kesadaran masyarakat.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 65 TAHUN 2010

TENTANG

PANITIA PERINGATAN
HARI LINGKUNGAN HIDUP 2010

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

A L I N A N

Menimbang : a. bahwa Hani Lingkungan Hidup se-Dunia tanggal 5 Juni 2010 penlu dipeningati dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tenkait dengan pnognam pembangunan benkelanjutan yang benwawasan lingkungan hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tensebut dipandang penlu membentuk Panitia Peningatan Hani Lingkungan Hidup 2010;

c. bahwa meneka yang namanya tensebut dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syanat dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Panitia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomon 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembanan Negana Tahun 1997 Nomon 68, Tambahan Lembanan Negana Nomon 3699) ;

2. Penatunan Pnesiden Nomon 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 0nganisasi dan Tata Kenja Kementenian Negana Republik Indonesia sebagaimana telah bebenapa kali diubah, tenakhin dengan Penatunan Pnesiden Nomon 94 Tahun 2006;

3. Penatunan Menteni Negana Lingkungan Hidup Nomon 01 Tahun 2005 tentang 0nganisasi dan Tata Kenja Kementenian Negana Lingkungan Hidup.

4. Keputusan Pnesiden Republik Indonesia Nomon 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bensatu II

5. Penatunan Pnesiden Republik Indonesia Nomon 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan onganisasi Kementenian Negana

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peningatan Hani Lingkungan Hidup 2009 dengan susunan keanggotaan sebagai benikut :

Pengarah : 1. Menteni Negana Lingkungan Hidup

LAMPIRAN

2. Seknetanis MENLH
3. Deputi I MENLH
4. Deputi II MENLH

5. Deputi III MENLH
6. Deputi IV MENLH
7. Deputi V MENLH
8. Deputi VII MENLH
9. StafAhli MENLH Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga

Pelaksana :
Ketua : DR. Henry Bastaman, MES
Wakil Ketua : Dra. Pudjihastuti
Sekretaris : Drs. Nur Rochman
Seksi-seksi :

1. Kalpataru
   Penanggung Jawab: Dra. Wiwiek Wikoyah
   Wakil : Drs. Jonny Purba
2. Status Lingkungan Hidup
   Penanggung Jawab: Drs. Nursiwan Taqim, M.Si.
   Wakil : Dra. Hardini Agustina
3. Adipura
   Penanggung Jawab: Drs. Tri Bangun Laksana
   Wakil : Ratna Kartikasari, M.Sc.
4. Adiwiyata
   Penanggung Jawab: Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc.
   Wakil : Dini Maryani, S.Kom.
5. Publikasi dan Pekan Lingkungan
   Penanggung Jawab: Dra. Siti Aini Hanum, M.A.
   Wakil : Dida Gardera, ST., M.Sc.
6. Penyiapan materi pengarahan
   Penanggung Jawab: Ir. Sri Hudyastuti
   Wakil : Ir. Sinta Saptarina, M.Sc.
7. Keuangan
   Penanggung Jawab: Amat Sukur, S.Sos.
   Wakil : Siti Muzayamah, SE
8. Persuratan/Dokumentasi
   Penanggung Jawab: Diah Rina Ariyati, SE
   Wakil : Uneng Daniar Delyana
9. Protokol/Acara
   Penanggung Jawab: Drs. Tugiyo
   Wakil : Usep Sugiyono

10. Transportasi, Akomodasi dan Logistik
    Penanggung Jawab: Bambang Budi Setiawan
    Wakil : M. Chotman Rismanto, S.Sos.
11. Kerjasama Antar Lembaga
    Penanggung Jawab: Ir. Dionisius Johny P. Kusumo, MBA
    Wakil : EndahAmbarwati, S.Si., M.Si.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup;

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur dengan Keputusan Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Panitia Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2010, dibebankan kepada anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 serta dana-dana bantuan yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 07 April 2010

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

TTD

Prof. DR. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS

SALI NAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1.Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Kepala Biro Umum KLH, Up. Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala KPKN Jakarta III
4.Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Dra. Rudimastuti
NIP 195512031982102001

LAMPIRAN

ALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 113 TAHUN 2010

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TAHUN 2010

Menimbang :a.bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah memandang perlu memberikan penghargaan kepada setiap orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;

b. bahwa salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada setiap orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup berupa penghargaan Kalpataru;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hiduptentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2010;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 87/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor57 Tahun 2010 tentang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru Masa Bakti 2010.

Memperhatikan: Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Kalpataru Masa Bakti 2010 tentang Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional Kalpataru 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TAHUN 2010

PERTAMA : Memberikan penghargaan KALPATARU,

a) Kategori Perintis Lingkungan, kepada:

1) **Djohan Riduan Hasan,** beralamat di Jalan Thai Kap Sun, Gang Tapak Jalak I Nomor53, Kelurahan Girimaya, Kecamatan BukitIntan, Kota PangkalPinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2) **Mateus Bere Bau,** beralamat di Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3) **Kholifah,** beralamat di Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
4) **Mahyiddin,** beralamat di Kelurahan Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi NanggroeAceh Darussalam
5) **Ujang Solikhin,** beralamatdi Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

b) Kategori Pengabdi Lingkungan, kepada:

1) **Yohanes Ebo, SP,** beralamat di Jalan Trans Waiwerang-Sagu, RT 021 RW 006, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2) **Sumadi,** beralamat di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

c) Kategori Penyelamat Lingkungan, kepada:

1) **LSM PILIHI Dairi,** beralamatdi Jalan Sidikalang-Medan, KM 6,2 Panji Bako II Nomor 62, Kecamatan Sitinjo, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

2) **KPSA Pupita Hijau,** beralamat di RI 12 RW 02 Dusun Sulek Timur, Desa Sulek, Kecamatan Ilogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

3) **LSM Rekonvasi Bumi,** beralamatdi Jalan R.H. Joenus Soemantri Nomor4/20 RI 1 RW 1 Kelurahan lembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

d) Kategori Pembina Lingkungan, kepada:

1) **Dra. Endang Sulistyowati,** beralamat di Jalan Kinibalu I Nomor 22, RI 001 RW 003, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa limur

2) **Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si,** beralamat di Jalan Kendeng Barat II No. 44, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Iengah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 2010

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

Prof. Dr. Ir.Gusti Muhammad Hatta, MS

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Dra. Pudjihastuti

ALI NAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 230 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN ADIWIYATA

MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menter i Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata perlu dibentuk Dewan Pertimbangan PenghargaanAdiwiyata;

b. bahwa sekolah yang telah ditetapkan sebagai SekolahAdiwiyata Mandiri, SekolahAdiwiyata, dan Calon SekolahAdiwiyata, perlu dinilai oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menter i Negara Lingkungan Hidup tentang Dewan Pertimbangan Pengahargaan Adiwiyata;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor23Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Menter i Negara Lingkungan Hidup Nomor2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Pertimbangan PenghargaanAdiwiyata

KEDUA : Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMAterdiri atas:

1	Prof. DR. H.AriefRachman, M.Pd	: Ketua
2	Deputi Menter i Negara Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	: Wakil Ketua merangkap anggota
3	Sekretaris Menter i Negara Lingkungan Hidup	: Sekretaris merangkap anggota
4	DirekturJenderal Manajemen Sekolah Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional	: Anggota

5. StafAhli Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan : Anggota
6. Prof. Dr. PaulusWirutomo : Anggota
7. Prof. Dr. RukaesihA. Maolani : Anggota
8. Dr. Eka Budianta : Anggota
9. Drs. Dibjo Sartono : Anggota

KETIGA : Dewan Pertimbangan PenghargaanAdiwiyatasebagaimanadimaksud padadiktum KEDUAbertugas:

a. melakukan penilaian terhadap hasil isian pertanyaan dan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Peninjau terhadap calon penerima penghargaan SekolahAdiwiyata Mandiri, SekolahAdiwiyata dan Calon SekolahAdiwiyata;
b. mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup terhadap calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri , Sekolah Adiwiyata dan Calon Sekolah Adiwiyata yang dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan Adiwiyata dan ditetapkan sebagai sekolan Calon SekolahAdiwiyata.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan PenghargaanAdiwiyata dapat meminta informasi kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, para ahli, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan warga masyarakat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan PenghargaanAdiwiyata dibantu oleh tim sekretariat dan tim peninjau lapangan yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup.

KEENAM : Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Menter i Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi yang bertanggungjawab di bidang penghargaanAdiwiyata.

KETU&UH : Biaya pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan PenghargaanAdiwiyata dibebankan pada anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, SekolahAdiwiyata dan Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2011.

Ditetapkan di : Jakarta PadaTanggal : 22 Mei 2009

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

Ir. RACHMAT WITOELAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 112 TAHUN 2010

ALINAN

TENTANG

PENERIMAPENGHARGAAN ADIWIYATATAHUN 2010

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

b. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pendidikan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah memandang perlu memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan formal atau sekolah yang dinilai telah menunjukkan kinerja pengembangan pendidikan lingkungan hidup berupa Penghargaan Adiwiyata;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Penerima Penghargaan Adiwiyata Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

LAMPIRAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan penghargaan Adiwiyata kepada sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 2010

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI,

ttd

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
Kementerian Lingkungan Hidup

Dra. Pudjihastuti
NIP. 19551203 198210 2 001

Lampiran
Surat Keputusan
Menterl Negara Llngkungan Hldup
Nomor : 112
Tanggal : 25 Mel 2010

Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Tahun 2010

a). Sekolah Adiwiyata Mandiri:

1. SDN CIPANENGAH CBM, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
2. SDK THERESIA, Kota Surabaya, Jawa Timur.
3. SD KANISIUS KALASAN, Kabupaten Sleman, Dl.Yogyakarta.
4. SDN SUMBERSONO, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
5. SD TUNJUNG SEKAR I, Kota Malang, Jawa Timur.
6. SDN 03 BALIKPAPAN, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
7. SDN PANGGANG 04, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
8. SDN KEMBANG MALANG, Kabupaten Kulonprogo, Dl.Yogyakarta.
9. SMPN 7, Kota Bandung, Jawa Barat.
10. SMPN 1 DLANGGU, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
11. SMPN 5, Kota Malang, Jawa Timur.
12. SMPN 1 SUKODONO, Kabupaten Lumajang, JawaTimur.
13. SMPN 2, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
14. SMPN 4 MENDOYO, Kabupaten Jembrana, Bali.
15. SMPN 24, Kota Padang, Sumatera Barat.
16. SMPN 1 LURAGUNG, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
17. SMPN 4, Kota Denpasar, Bali.
18. SMAN 5, Kota Malang, Jawa Timur.
19. SMA SEMEN GRESIK, Kabupaten Gresik, JawaTimur.
20. SMAN 2, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
21. SMAN 1 KUTASELATAN, Kabupaten Badung, Bali.
22. SMAN 5, Kota Denpasar, Bali.
23. SMAN 2 KRAKATAU STEEL, Kota Cilegon, Jawa Barat.
24. SMKN 1 LOSARANG, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
25. SMKN 3, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

b). Sekolah Adiwiyata:

1. SDN 005 BUKIT RAYA, Kota Pekanbaru, Riau.
2. SDN 36 PONTIANAK KOTA, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
3. SDN 7 TIANYAR BARAT, Kabupaten Karangasem, Bali.
4. SDN 5 SINGAKERTA, Kabupaten Gianyar, Bali.
5. SDN 001 LIMAPULUH, Kota Pekanbaru, Riau.
6. SDN BANTARJATI 9, Kota Bogor, Jawa Barat.
7. SDN KANDANGAN III, Kota Surabaya, Jawa Timur
8. SDN 20 PONTIANAK SELATAN, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
9. SDN DINOYO II, Kota Malang, JawaTimur.
10. SDN GEMARANG VI, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
11. SDN P 12 BENHIL, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
12. SDN 04 METRO TIMUR, Kota Metro, Lampung.
13. SD ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
14. SMPN 2 KEBOMAS, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
15. SMPN 1 CIGOMBONG, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
16. SMPN 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
17. SMPN 10, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
18. SMPN 1 MERAKURAK, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
19. SMPN 103 CIJANTUNG, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
20. SMP MUHAMMADIYAH 1, Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta.
21. SMPN 10 Kota Sukabumi, Jawa Barat.
22. SMPN 2 SUSUKAN LEBAK, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
23. SMPN 1 JAKENAN, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
24. SMAN 1 BANDAR, Kabupaten Beuneur Meriah, NAD.
25. SMAN 7 Kota Bekasi, Jawa Barat.
26. SMAN 1 WERINGINANOM, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
27. SMAN 5 Kabupaten Jember, Jawa Timur.
28. SMAN 1 GEGER, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
29. SMAN 10, Kota Malang, Jawa Timur.
30. SMAN 7, Kota Manado, Sulawesi Utara.
31. SMAN 4, Kota Ternate, Maluku Utara.
32. SMAN 2 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI.Yogyakarta.
33. SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur.

34. SMKN 1 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
35. SMKN 1 Kota Gorontalo, Gorontalo.
36. SDN PETROKIMIA, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
37. SDAL MUSLIM, Kabupaten Sidoarjo, JawaTimur
38. SDN MANGUNHARJO VI, Kota Probolinggo, Jawa Timur
39. SDK SANTA MARIA, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
40. SDN NOGOPU RO CATUR TUNGGAL, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
41. SD YPPSB 2 SANGATTA, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
42. SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN , Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
43. SDN 10, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung
44. SDN 4 PANJER, Kota Denpasar, Bali
45. SDN 007 KECAMATAN SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau
46. SDN 016 KECAMATAN SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau
47. SMPN 8, Kota Cirebon, Jawa Barat
48. SMP YPPSB, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
49. SMPN 3, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
50. SMPN 4 MARTAPURA, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
51. SMPN 5 KEPANJEN, Kota Malang, Jawa Timur
52. SMPN 1 SUMBERASIH, Kabupaten Probolinggo , JawaTimur
53. SMPN 1 LEMBAR, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
54. SMPN 2 DAYEUHKOLOT, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
55. SMPN 4, Kota Probolinggo, Jawa Timur
56. SMA Katolik Syuradikara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur
57. SMAN 8, Kota Pekanbaru, Riau
58. SMAN 2 SEKAYU, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
59. SMAN TEMPEH, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
60. SMAN 2, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
61. SMAN 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
62. SMAN 1, Kabupaten Pandeglang, Banten
63. SMAN 6, Kota Denpasar, Bali
64. SMKN 2, Kota Sukabumi, Jawa Barat
65. SMK WIKRAMA, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
66. SMKN 1, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung
67. SMKN 6, Kabupaten Malang, Jawa Timur

c). Kategori Calon Sekolah Adiwiyata:

1.SDN Petemon XIII, Kota Surabaya, Jawa Timur
2.SDN 1 WANGUNHARJA, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
3. SDN 050765 GEBANG, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
4. SDN 05 KEC. SINTANG, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
5. SDN IBU DEWI 5, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
6. SD KATOLIK TARAKANITA BUMIJO, Kota Yogya, DI. Yogyakarta
7. SDK SANTA MARIA, Kota Surabaya, Jawa Timur
8. SDN PANDANWANGI 1, Kota Malang, Jawa Timur
9.SDN KANDANGAN I1121, KotaSurabaya, JawaTimur
10. SDN SUKABUMI 6, Kota Probolinggo, Jawa Timur
11. SDN 13 BATU GADANG, Kota Padang, Sumatera Barat
12. SDN 10 SUNGAI SAPIH, Kota Padang, Sumatera Barat
13. SDN 13 IV KOTOAUR MALINTANG, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
14. SDN 1 SELUMBUNG, Kabupaten Karangasem, Bali
15. SMPN 2 PASAWAHAN, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
16. SMPN 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
17. SMPN 3AIRMADIDI , Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
18. SMPN 1 MOJOTENGAH, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
19. SMPN 4, Kabupaten Boyolali, JawaTengah
20. SMPN 1 DIWEK, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
21. SMPN 7, Kota Madiun, Jawa Timur
22. UPTD SMPN 1 BOYOLANGU, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
23. SMPN 2 TAMPAKSIRING, Kabupaten Gianyar, Bali
24. SMPN 1, Kota Tarakan, Kalimantan Timur
25. SMPN 54, Kota Palembang, Sumatera Selatan
26. SMPN 1 PANGKAJENE, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan
27. SMP YPJ KUALA KENCANA, Kabupaten Mimika, Papua
28. SMAN 1 JETIS, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta
29. SMAN 4, Kota Probolinggo, Jawa Timur
30. SMAN 1 GRATI, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
31. SMAN 1, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
32. SMAN 1 MEJAYAN, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
33. SMKN 1 PANJI, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

34. UPTD SMKN 2 BOYOLANGU, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
35. SMAN 1 SUKAWATI, Kabupaten Gianyar, Bali
36. SMAN 1 TAMPAKSIRING, Kabupaten Gianyar, Bali
37. SMAN 1, Kota Pekanbaru, Riau

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 2010

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP RI,

ttd

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
Kementerian Lingkungan Hidup

Dra. Pudjihastuti
NIP. 19551203 198210 2 001

PEKAN LINGKUNGAN INDONESIA 2010

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PEKAN LINGKUNGAN INDONESIA 2010

Jakarta, 3- 6Juni 2010

Kementerian Lingkungan Hidup kembali menyelenggarakan Pekan Lingkungan Indonesia ke-14, yang tahun ini mengusung tema **"Keanekaragaman Hayati, Masa Depan Bumi Kita",** selaras dengan tema internasional yang ditetapkan *United Nations Environment Programme* (UNEP), yaitu *'Many Species. One Planet. One Future".*

Dalam rangka menanamkan kepedulian, kesadaran dan partisipasi masyarakat atas pentingnya keanekaragaman hayati dan isuisu lingkungan lainnya, Pekan Lingkungan Indonesia 2010 diselenggarakan sebagai sarana bagi para pemangku kepentingan dalam menyampaikan dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan program dan kinerja di bidang lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu, saat ini berkembang tuntutan *"green consumerism"* yang mendorong peningkatan iklim usaha yang ramah lingkungan, kondusifserta mengutamakan prinsip produksi bersih atau eko-efisiensi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada kesempatan ini, Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia. Saat ini KLH sedang mengembangkan pelabelan lingkungan untuk klaim lingkungan swadeklarasi (ekolabel tipe II) dengan menggunakan logo yang ditetapkan oleh KLH. Label atau logo ekolabel swadeklarasi yang ditetapkan oleh KLH merupakan alternatifklaim lingkungan swadeklarasi yang akan digunakan pada produknya.

Di samping meluncurkan Logo tersebut, diluncurkan pula Buku Panduan Menyelam Ramah Lingkungan. Buku tersebut disusun agar aktifitas penyelamanan tidak merusak lingkungan dan biota laut serta seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pekan Lingkungan Indonesia 2010 merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang puncaknya akan diselenggarakan di Istana Negara pada tanggal 8 Juni 2010.Kegiatan nasional lain yang akan diselenggarakan adalah Pemberian Anugerah Lingkungan 2010, Kemah Hijau Nasional IV serta Peluncuran Kampanye Lingkungan Bersama: GAUL atau Gerakan Aksi Untuk Lingkungan. Kampanye Lingkungan "GAUL" yang diperuntukkan khususnya untuk usia muda ini akan diluncurkan bertepatan Hari Lingkungan Hidup Seduni 2010, yaitu tanggal 5 Juni 2010 melalui berbagai aksi nyata lingkungan. Berbagai kegiatan peringatan dan penyelamatan lingkungan juga dilakukan serentak di berbagai penjuru daerah di Indonesia atas prakarsa Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat.

Selain menyelenggarakan pameran yang diikuti oleh 180 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga masyarakat dan lembaga donor, PLI 2010 diisi kegiatan-kegiatan interaktif seperti seminar, lokakarya, talkshow, presentasi produk ramah lingkungan, aneka lomba, bazaar serta aktifitas ramah lingkungan seperti *zero waste event* yang akan dipandu oleh relawan muda "brigade sampah".Pengenalan program lingkungan seperti ADIPURA, PROPER, WARGA MADANI, Reformasi Birokrasi, Eco-Office, Etika Birokrasi Lingkungan, Pendanaan Lingkungan, Menuju Indonesia Hijau, Perlindungan Lapisan Ozon, insentifdan pendanaan lingkungan serta RevitalisasiAMDALdiharapkan dapattersosialisasi dengan baik melalui PLI 2010 yang berkolaborasi dengan Pameran Energi Terbarukan Indonesia dan CSR Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, Kementerian Lingkungan Hidup meningkatkan kemitraannya dalam mengarusutamakan lingkungan hidup dengan berbagai sektor strategis. Untuk itu, dilakukan penandatangan naskah kerjasama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Panglima TNI dan Kepala BPS.

Secara garis besar inti dari kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk sinergi dalam hal pengendalian dampak kesehatan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
2. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari agar upaya pelestarian lingkungan hidup dapat berkelanjutan.
3. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Panglima TNI bertujuan untuk pengarusutamaan lingkungan hidup dalam menunjang aspek pertahanan nasional.
4. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik bertujuan untuk sinergi dalam data statistik khususnya menunjang data dan informasi lingkungan hidup.

Selain daripada itu, BapakWakil Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan penghargaan bagi mitra utama KLH, yaitu media massa yang telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan informasi lingkungan hidup bagi masyarakat luas.Pe ran media massa sebagai media komunikasi massa memiliki posisi penting dalam upaya diseminasi informasi kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Anugerah Kementerian Lingkungan Hidup untuk Media Massa, diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan menggunakan metode audit analisis isi kuantitatif melalui media monitoring selama bulan Februari hingga bulan Mei 2010 terhadap 11 media cetak diberikan **Plakat untuk Wartawan,** kepada : **Adianto P. Simamora,** wartawan The Jakarta Post; **Aryo Wisanggeni G,** wartawan Kompas dan **Fidelis E Satriastanti,** wartawan Jakarta Globe.

Dengan tetap menjaga konsitensi dan komitmennya terhadap lingkungan, **Anugerah Media Massa 2010** diberikan kepada **KOMPAS** untuk **Kategori Media/Surat Kabar Peduli Lingkungan**.Selain Anugerah dan Plakat tersebut diberikan hadiah yang merupakan dukungan dari AQUA DANONE, yaitu sejumlah alat-alat untuk menunjang perilaku ramah lingkungan.

Stand Kementerian Lingkungan Hidup 2010

Peresmian Pekan Lingkungan Indonesia 2010

Penanda Tanganan MOU antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Panglima TNI dan Kepala BPS

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000
Telepon : 021 - 8517148 (hunting) 8580067 - 69 • Faksimile : 021 - 8517147 • Website : www.menlh.go.id